

BAB 3

Peranan Pangeran Norodom Sihanouk dalam Proses Pembentukan *Coalition Government of Democratic Kampuchea*

Untuk menjelaskan peranan Sihanouk dalam proses pembentukan CGDK, bab ini akan diuraikan secara kronologis dalam 4 subbab yang terbagi dalam empat bahasan, yaitu: keterlibatan awal Sihanouk dalam konflik Kamboja; keterlibatan awal ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Kamboja pada tahun 1979—1981; tiga kelompok perlawanan Kamboja anti-Vietnam; dan peranan Sihanouk dalam proses pembentukan CGDK.

3.1 Keterlibatan Awal Pangeran Norodom Sihanouk dalam Konflik Kamboja

Ketika pada awal Januari 1979, pasukan Vietnam serta *National Union Front the Salvation of Kampuchea* (NUFSK) ‘Front Persatuan Nasional Penyelamatan Kampuchea,’ sudah jauh memasuki kawasan Kamboja dan mulai menguasai beberapa daerah Kamboja.¹⁵³ Pada saat itu pula Pangeran Norodom Sihanouk yang sedang menjalani tahanan rumah telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Pol Pot. Hal ini terlihat dari tiga surat Sihanouk yang disiarkan oleh suara radio Kamboja. Isi surat tersebut memperlihatkan bahwa Sihanouk memberikan dukungan penuh terhadap langkah dan tindakan yang diambil oleh *Democratic Kampuchea* (DK) dan Pol Pot dalam memerangi serbuan Vietnam.¹⁵⁴

Sementara itu, pemerintah DK yang diwakili PM II, Leng Sary mengirim surat kawat kepada Ketua Dewan Keamanan PBB yang berisi bahwa pemerintahan DK akan mengirim delegasi ke New York untuk menjelaskan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai serangan Vietnam ke Kamboja.

¹⁵³ Berdasarkan berita *Kompas* dari tanggal 2 Januari—5 Januari 1979, pasukan Vietnam dan pasukan Front Persatuan Nasional Penyelamatan Kampuchea telah berhasil menguasai daerah Kratie, sebagian besar propinsi Ratanakiri dan Kompong Cham. Jatuhnya Kompong Cham berarti lepasnya Kamboja bagian timur yang merupakan 1/5 dari seluruh wilayah Kamboja yang dikuasai pemerintah pusat Kamboja (DK). Bahkan pada 5 Januari 1979, pasukan Vietnam juga telah berhasil merebut daerah paruh bebek (daerah kawasan Kamboja yang menjorok ke dalam wilayah Vietnam Selatan).

¹⁵⁴ Lihat *Kompas*, 5 Januari 1979. “Pasukan Vietnam Rebut Svay Rieng di Paruh Bebek.”

Kemudian meminta Dewan Keamanan PBB untuk ikut ambil bagian dalam permasalahan ini.¹⁵⁵ Sejalan dengan pemerintah DK, Wakil PM RRC, Deng Xiao Ping menghimbau PBB agar memberikan dukungan moril kepada pemerintah DK sehubungan dengan serangan Vietnam. Sebagai negara pendukung rezim Pol Pot, RRC mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat mengenai serangan Vietnam ke Kamboja untuk menahan usaha hegemoni Vietnam di Indochina.¹⁵⁶

Gerakan-gerakan menusuk yang dilakukan oleh pasukan Vietnam ke utara, selatan, dan timur Phnom Penh seakan-akan mau merebut ibukota Kamboja. Dengan memotong urat nadi kehidupan Kamboja yang ada di daratan, telah membuat China khawatir bahwa Kamboja akan segera dikuasai oleh Vietnam. Oleh karena itu, China bermaksud mengangkut keluar para pemimpin Kamboja, termasuk Sihanouk dari Phnom Penh ke Beijing untuk mengantisipasi serangan Vietnam yang semakin hebat.¹⁵⁷

Kekhawatiran China pun akhirnya terjadi ketika pasukan Vietnam menguasai Phnom Penh pada 7 Januari 1979. Menanggapi Kamboja yang telah dikuasai oleh Vietnam dan pasukan pemberontak, Sihanouk memberikan pernyataan dari Beijing bahwa Kamboja akan tetap melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir dan tidak akan menyerah.¹⁵⁸ Di dalam pernyataan tersebut, Sihanouk juga melukiskan bahwa Pol Pot adalah seorang pemimpin nasional Kamboja yang tulus dan Sihanouk akan terus memberikan dukungan kepada Pol Pot dalam menghadapi serangan Vietnam.¹⁵⁹

Untuk menghadapi situasi Kamboja yang sudah dikuasai oleh Vietnam, pada 9 Januari 1979, Sihanouk memutuskan pergi ke New York, Amerika Serikat, untuk berbicara di depan Dewan Keamanan PBB.¹⁶⁰ Kepergian Sihanouk ke New York dilakukannya guna mewakili pemerintahan DK untuk menyampaikan permasalahan Kamboja setelah sebelumnya Pol Pot telah meminta Sihanouk

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Lihat *Kompas*, 6 Januari 1979. "RRC Himbau PBB Dukung Kamboja."

¹⁵⁷ *Ibid.* Dalam usahanya membawa para pemimpin Kamboja, RRC menggunakan pesawat terbang khusus yang melintasi Thailand, setelah sebelumnya RRC telah meminta izin terlebih dahulu kepada Thailand untuk melintasi negara tersebut.

¹⁵⁸ Lihat *Kompas*, 9 Januari 1979. "Dengan Jatuhnya Kamboja, Asia Tenggara dalam Bahaya."

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Lihat *Kompas*, 10 Januari 1979. "Wilayah Muangthai Diserang Pesawat Tempur dari Kamboja."

mewakilinya di PBB.¹⁶¹ Sihanouk ingin mengutarakan protesnya terhadap tindakan Vietnam yang berani menginvasi Kamboja. Sihanouk berharap dengan dirinya berbicara di depan Dewan Keamanan PBB, PBB dapat membantu Kamboja dan berperan aktif dalam mencari penyelesaian masalah Kamboja.¹⁶² Selain itu, kunjungan Sihanouk ke Amerika Serikat juga merupakan upayanya meminta dukungan politik dan diplomatik dari Amerika. Sihanouk berharap dapat menjalin persahabatan kembali dengan Amerika yang dulu pada tahun 60-an telah rusak. Tujuannya supaya Amerika dapat membantu Kamboja mengusir pasukan Vietnam dari Kamboja.

Dalam usaha Sihanouk mencari dukungan pemerintahan Pol Pot di PBB, ia langsung memberikan pernyataan dan komentarnya terhadap pers setelah ia tiba di New York. Dalam keterangan persnya, Sihanouk menyatakan bahwa masalah Kamboja bukan hanya masalah Kamboja sendiri, tetapi sudah meluas menjadi masalah internasional. Konflik ini akan meningkat dan menuju perang antara Uni Soviet dan RRC. Sihanouk berharap dunia internasional dapat membantu Kamboja. Apabila tidak, dunia akan dihadapkan pada kesulitan keamanan yang lebih berbahaya.¹⁶³

Ada yang menarik dari beberapa kali pernyataan pers Sihanouk, yaitu ketika ia mengatakan bahwa ia tidak mau mewakili Kamboja (Pemerintahan DK) di PBB. Walaupun dalam setiap pernyataan pers, Sihanouk selalu mengatakan dukungannya terhadap pemerintahan Pol Pot dalam menghadapi pasukan Vietnam. Dalam beberapa kali wawancara pers, Sihanouk mengutarakan keengganannya untuk mewakili DK di Kamboja. Meskipun ia sendiri diminta langsung oleh Pol Pot untuk memimpin delegasi Kamboja ke PBB.

Sikap ini diambil Sihanouk karena pada masa kekuasaan DK, ia dijadikan tahanan rumah selama tiga tahun di Phnom Penh. Selain itu, ia juga merasa tidak nyaman dengan citra buruk yang dimiliki oleh Khmer Merah karena telah membunuh jutaan rakyat Kamboja ketika Khmer Merah menguasai Kamboja. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa ia tidak menyetujui semua

¹⁶¹ Lihat *Kompas*, 6 Mei 1979. "Sihanouk Mengungkapkan Semuanya."— Mengutip berita dari *Asiaweek*, 27 April 1979.

¹⁶² Lihat *Kompas*, *Loc.Cit.*, "Wilayah Muangthai Diserang Pesawat Tempur dari Kamboja."

¹⁶³ Lihat *Kompas*, 11 Januari 1979. "Konflik Kamboja Bisa menjurus ke Arah Perang antara RRC—Uni Soviet."

kebijaksanaan dalam negeri kaum komunis yang tidak menghargai HAM dan ia pun juga mengatakan bahwa ia bukan anggota Pol Pot walaupun ia mewakili pemerintahan DK di PBB.¹⁶⁴

Meskipun Sihanouk sering kali menyatakan keenggannya, tetapi ia pada saat itu masih menjadi pemimpin delegasi DK untuk mempresentasikan masalah Kamboja di PBB. Dengan tujuan supaya PBB tetap mengakui DK sebagai pemerintahan yang sah Kamboja dan diakui oleh dunia internasional. Hal ini dilakukannya karena melihat China yang juga memintanya untuk berbicara mengenai Kamboja di depan sidang Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ia juga mau mengutarakan protesnya atas sikap Vietnam yang telah berani menginvasi Kamboja. Ia juga menginginkan pemerintahan yang dibentuk Vietnam—PRK tidak diakui di PBB. Hal ini disebabkan pemerintahan tersebut bukanlah pemerintahan sah yang diinginkan rakyat, melainkan pemerintahan boneka Vietnam.

Kendati Sihanouk melancarkan kritikan pedas terhadap kebijaksanaan dalam negeri DK. Namun, Pol Pot tidak menarik kembali permintaannya terhadap Sihanouk untuk mewakilinya di PBB. Alasan yang diutarakan Pol Pot adalah karena Sihanouk merupakan tokoh Kamboja yang bisa menarik simpati dan perhatian dunia internasional.¹⁶⁵ Ia juga tokoh nasional Kamboja yang telah lama dikenal dunia internasional sehingga sosoknya tidak diragukan lagi. Pol Pot percaya bahwa Sihanouk dapat membantu Kamboja karena Sihanouk mempunyai banyak teman di luar negeri.¹⁶⁶ Selain itu, Sihanouk juga sangat dihormati oleh pemerintah China yang merupakan pendukung utama Khmer Merah.

Khmer Merah menilai bahwa akan lebih menguntungkan bagi DK apabila Sihanouk yang telah dikenal oleh dunia internasional menjadi orang yang mewakili pemerintahannya di PBB. Hal ini disebabkan mengingat pemerintahan Khmer Merah yang selama masa kekuasaannya di Kamboja lebih dikenal oleh masyarakat internasional sebagai pemerintahan teror yang tidak menghargai HAM

¹⁶⁴ Lihat *Kompas*, 12 Januari 1979. “Ketika Pangeran Sihanouk Singgah di Beijing. Ia Mengadakan Konferensi Pers Selama 6 jam.”

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Permintaan Pol Pot kepada Sihanouk dapat dilihat di *Kompas, Loc.Cit.*, “Sihanouk Mengungkapkan Semuanya.”Berita ini mengutip artikel dari *Asiaweek* 27 April oleh Anthony Paul.

sehingga mengakibatkan jutaan manusia Kamboja menjadi korbannya. Dengan demikian, sosok Sihanouk dapat dipakai sebagai penarik simpati internasional supaya DK dapat mempertahankan kursi sah Kamboja di PBB yang diincar oleh pemerintahan Heng Samrin, pemerintahan yang menguasai Kamboja sejak 7 Januari 1979. Oleh karena itu, pihak Khmer Merah tidak menggubris kecaman tajam yang dilontarkan Sihanouk.

Setelah China mengeluarkan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang mengecam dengan keras invasi bersenjata Vietnam ke Kamboja serta menyerukan agar semua tembak-menembak dihentikan disamping penarikan mundur semua tentara Vietnam di Kamboja. PBB langsung mempertimbangkan untuk mengambil tindakan menanggapi invasi Vietnam ke Kamboja.

Dalam usaha pertimbangan, PBB mendengarkan pidato Sihanouk yang berbicara selama 40 menit di depan sidang Dewan Keamanan PBB pada 11 Januari 1979.¹⁶⁷ Dalam pidatonya, Sihanouk menuturkan bahwa Vietnam memulai usaha untuk menelan Kamboja secara perlahan-lahan. Usaha ini sudah dimulai dari abad ke-15 hingga ke-20. Hal ini terbukti dengan jelas karena sebagian besar wilayah Vietnam Selatan sekarang adalah dulunya milik wilayah Kamboja. Ia juga menyatakan bahwa front nasional yang kini berkuasa di Kamboja hanyalah boneka Vietnam yang digunakan Vietnam sebagai kedok terhadap invasinya di Kamboja.

Walaupun, Phnom Penh dan sebagian besar wilayah Kamboja sudah jatuh ke tangan pasukan pemberontak pro-Vietnam, tetapi rezim lama masih melakukan perlawanan dari beberapa kota perbatasan di dekat perbatasan Thailand, di barat laut Kamboja, tepatnya di Siem Reap. Menanggapi Vietnam yang kini menguasai Kamboja, Sihanouk mengatakan bahwa rakyat Kamboja akan bertempur melawan penjajah, kami tidak akan menyerah sehingga negara kami tidak akan pernah kehilangan kebanggaan nasional.¹⁶⁸ Sihanouk juga meminta PBB untuk menghentikan usaha Vietnam yang berupaya menginvasi Kamboja serta meminta

¹⁶⁷ Pidato sihanouk ini terdapat dalam *Kompas*, 13 Januari 1979. "Uni Soviet Dengan Hak Veto Merintang Pelaksanaan Resolusi RRC."

¹⁶⁸ *Ibid.*

PBB untuk tidak mengakui rezim boneka Vietnam. Selain itu, ia pun menyerukan kepada semua negara untuk menanggukhan bantuan kepada Vietnam.¹⁶⁹

Pada awalnya, dalam sidang Dewan Keamanan ini, Sihanouk dihadapkan pada posisi yang sulit karena Uni Soviet dan Cekoslavia menuduhnya sebagai wakil pemerintahan yang sudah tidak ada lagi.¹⁷⁰ Hal ini dituduhkan karena Khmer Merah sudah tergulingkan dan sekarang pemerintahan PRK-lah yang memegang tampuk pemerintahan Kamboja. Meskipun ada pertentangan di dalam sidang tersebut. Namun, ketika ada pemungutan suara dalam sidang tersebut yang beranggotakan 15 negara, hasil voting tersebut ternyata menyetujui masalah Kamboja dicantumkan dalam agenda sidang PBB dengan suara 13 setuju dan 2 menentang.¹⁷¹

Pada saat itu, 15 negara anggota Dewan Keamanan gagal dalam memutuskan suatu resolusi bagi Kamboja. Tujuh negara anggota Dewan Keamanan PBB, yakni Inggris, China, Perancis, Norwegia, Portugal, dan Amerika Serikat, sudah menyetujui gagasan resolusi China yang menginginkan genjatan senjata serta penarikan mundur semua pasukan asing dari Kamboja.¹⁷² Akan tetapi, resolusi ini gagal ditetapkan karena penolakan Uni Soviet dan Cekoslovakia.

Walaupun tidak membuat resolusi penyelesaian damai Kamboja, namun PBB telah menyetujui untuk tetap mengakui pemerintahan DK sebagai wakil sah pemerintahan Kamboja di PBB pada 12 Januari 1979.¹⁷³ Bisa dilihat bahwa dengan sosok Sihanouk yang tampil di depan PBB, pemerintah DK yang diwakilinya dapat mempertahankan kursinya di PBB. Sihanouk adalah tokoh yang telah lama dikenal oleh dunia internasional karena dengan tampilnya ia di depan PBB maka dunia berharap dirinya dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik ini. Dengan pengakuan tersebut, pemerintahan Heng Samrin dan Vietnam gagal untuk merebut kursi perwakilan Kamboja di

¹⁶⁹ Ross Russel R. (ed.). *Cambodia a Country Study*. Washington: Federal Result Library Division of Congres. 1990. hlm 192.

¹⁷⁰ Lihat *Kompas, Loc.Cit.*, "Uni Soviet Dengan Hak Veto Merintang Pelaksanaan Resolusi RRC."

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 192.

¹⁷³ The Institute of Asian Studies Chulalongkorn University. *The Kampuchean Problem in Thai Perspective*. Bangkok. 1985. hlm 97.

PBB. Sehingga PRK hanya berkuasa secara *de facto*, namun tanpa pengakuan oleh dunia internasional.

Sementara itu, pada 19 Maret 1979, di saat konflik Kamboja belum menemukan resolusi damai yang tepat dan pasukan Vietnam masih bercokol di Kamboja, Pangeran Norodom Sihanouk tiba-tiba menyatakan tidak mau lagi mewakili pemerintahan DK di PBB.¹⁷⁴ Ia berpendapat bahwa kursi Kamboja di PBB sebaiknya dikosongkan saja karena kedua pemerintahan baik DK maupun PRK sama-sama mengklaim bahwa mereka-lah pemegang pemerintahan Kamboja yang berasal dari rakyat.¹⁷⁵ Pada tahap ini, Sihanouk belum siap untuk berasosiasi dengan kelompok yang pernah memenjarakannya dan kelompok yang sudah banyak membunuh rakyat kamboja termasuk keluarga dan kerabatnya.¹⁷⁶ Ia kembali mengecam Pol Pot dan rezimnya sebagai pemerintah teror yang banyak membunuh rakyat Kamboja. Satu-satunya pemimpin Khmer Merah yang dibelanya hanyalah Khieu Samphan, yang menurutnya pada saat itu tidak memiliki kekuasaan apapun ketika Khmer Merah berkuasa.¹⁷⁷

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyatakan seruannya agar konflik Kamboja diselesaikan lewat konferensi internasional seperti Perundingan Jenewa dan suatu gencatan senjata yang diawasi internasional oleh pasukan perdamaian internasional sebelum diadakan pemilu. Ia menegaskan bahwa konflik di Kamboja hanya bisa diselesaikan lewat Perundingan Jenewa yang dihadiri oleh kelima negara anggota Dewan Keamanan PBB, negara-negara Indocina, dan negara-negara ASEAN. Sedangkan pemilu yang ia maksud ialah pemilu yang dilaksanakan dengan semua unsur parpol yang ada di Kamboja, yaitu kelompok pro-Sihanouk, pro-Vietnam, pro-China. Pada intinya, semua golongan harus ikut serta dalam pemilu yang dilaksanakan di bawah pengawasan internasional. Dengan pemilu yang berada di bawah pengawasan internasional, rakyat Kamboja

¹⁷⁴ Pada hari Senin, 19 Maret 1979 di Beijing bertempat di kediaman Sihanouk, Sihanouk melakukan wawancara dengan belasan wartawan asing. wawancara ini dimuat dalam *Kompas*, 21 Maret 1979. "Pangeran Sihanouk: Saya Ingin Jadikan Kamboja Negara Swiss di Asia."

¹⁷⁵ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 193.

¹⁷⁶ Milton Osborne. *Sihanouk: Prince of Light, Prince of Darkness*. Sidney: Allen & Unwin. 1994. hlm 250.

¹⁷⁷ Lihat *Kompas*, *Loc.Cit.*, "Pangeran Sihanouk: Saya Ingin Jadikan Kamboja Negara Swiss di Asia."

akan bebas memilih pemimpin yang akan menjadi pemerintahan sah Kamboja dan menjadi wakil Kamboja di PBB.¹⁷⁸

Pada Januari 1979, Sihanouk pun pernah ditawari menjadi presiden Kamboja untuk bekerjasama dengan Heng Samrin oleh Vietnam dan Uni Soviet.¹⁷⁹ Akan tetapi, ia menolaknya karena Sihanouk hanya menganggap pemerintahan PRK hanyalah pemerintahan boneka Vietnam. Sihanouk menghendaki Kamboja sebaiknya tetap netral, tidak memihak, dan non-komunis. Sihanouk menginginkan Kamboja seperti negara Swiss di Asia yang tetap bisa bersikap netral walaupun berhubungan dengan semua negara di dunia. Namun, usulan dan seruan Sihanouk ini agar diadakan suatu konferensi internasional mengenai Kamboja ditolak oleh Hanoi dan RRC juga tidak menyukainya.

3.2 Keterlibatan Awal ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Kamboja pada tahun 1979—1981

Dari awal, ASEAN selalu menyatakan penolakan atas usaha Vietnam menguasai Kamboja. Selain itu, ASEAN juga bersikeras menolak pemerintahan PRK yang didirikan oleh Vietnam dengan kepala negara Heng Samrin karena pemerintahannya tidak sah dan ilegal. ASEAN menganggap Vietnam telah melanggar dan melakukan kekerasan terhadap kedaulatan dan hak menentukan nasib Kamboja sendiri. Untuk menanggapi invasi Vietnam ke Kamboja, para menlu ASEAN bertemu dan mengadakan rapat di Bangkok pada 12—13 Januari 1979.¹⁸⁰

Dari hasil pertemuan tersebut lahir pernyataan bersama para menlu ASEAN pada 13 Januari 1979. Pertemuan tersebut menyatakan bahwa para menlu tersebut amat menyesalkan intervensi bersenjata Vietnam ke Kamboja. *“ASEAN kembali menegaskan mengenai hak rakyat Kamboja untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan atau dipengaruhi dari pihak luar dalam menentukan nasibnya sendiri.”*¹⁸¹ Pernyataan terdiri dari 5 pasal, yang pada

¹⁷⁸ Peter Schier Manola Schier-Oum In Colaboration with Waldtraut Jarke. *Prince Sihanouk On Cambodia : Interviewa and Talks With Prince Norodom Sihanouk*. Hamburg: Mitteilungen des Instituts Fur Asienkunde. 1985. hlm 125.

¹⁷⁹ Lihat *Kompas*, 22 Januari 1979. “Sihanouk Tolak Tawaran Menjadi Presiden Kamboja.”

¹⁸⁰ *Kompas*, 15 Januari 1979. “ASEAN Siap Ambil Langkah Apapun.”

¹⁸¹ *Ibid.*

intinya menyatakan seruan penarikan mundur segera seluruh pasukan Vietnam di Kamboja dan menyambut baik keputusan Dewan Keamanan PBB untuk membicarakan masalah Indocina dalam agenda PBB serta mendorong diambilnya tindakan seperlunya untuk memulihkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.¹⁸²

Pada Maret 1979, pernyataan bersama para menlu ASEAN tersebut diadopsi oleh PBB untuk menjadi *draft* resolusi untuk konflik Kamboja. Namun, pada 16 Maret Uni Soviet memveto *draft* resolusi tersebut karena tidak menyetujui butir resolusi tersebut yang mengharuskan penarikan mundur dengan segera seluruh pasukan asing di Kamboja.¹⁸³ Meskipun resolusi damai belum dapat tercapai mengenai konflik Kamboja tetapi, keadaan regional Asia Tenggara sudah mulai membaik. Hal ini dapat dilihat ketika China sudah menarik seluruh pasukannya dari wilayah Vietnam pada 15 Maret 1979.¹⁸⁴ Dengan demikian perhatian dunia internasional akan lebih terfokus terhadap masalah Kamboja dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan sikap China yang cenderung provokatif, yang mungkin dapat menimbulkan masalah keamanan regional Asia Tenggara lebih terancam.

Pada bulan September, Uni Soviet, Kongo, dan Panama melakukan usaha ke PBB untuk menantang keabsahan pemerintahan DK di PBB.¹⁸⁵ Pada 21 September 1979, Majelis Umum PBB bersidang mengenai kursi Kamboja yang dipegang oleh DK.¹⁸⁶ Dalam sidang tersebut, ASEAN dan China tetap mendukung DK untuk mewakili Kamboja di PBB, sedangkan India mengusulkan kursi Kamboja di PBB dikosongkan. Usul ini sama dengan usul Sihanouk yang mengirimkan surat kepada PBB yang berisi bahwa sebaiknya kursi Kamboja di PBB dikosongkan sampai pemerintah nasional Kamboja yang baru didirikan.¹⁸⁷

Usul tersebut ditolak oleh ASEAN karena apabila kursi Kamboja dikosongkan, maka secara tidak langsung mengakui Vietnam sukses melakukan agresi ke Kamboja. Penolakan ini merefleksikan strategi ASEAN yang

¹⁸² Penjelasan mengenai isi pasal-pasal tersebut terdapat dalam *Kompas. Ibid.*

¹⁸³ Macalister Brown dan Joseph J. Zasloff. *Cambodia Confounds the Peacemakers 1979—1998*. New York: Cornell University Press. 1998. hlm 13.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 193.

¹⁸⁶ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 13.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm 16.

mendukung usaha DK baik secara politik maupun militer untuk menyingkirkan Vietnam dan pemerintahan Heng Samrin mengambil alih Kamboja. Sikap ASEAN ini berbanding terbalik dengan Kuba dan Uni Soviet yang meragukan dan menentang kursi Kamboja dipegang oleh DK. Mereka menganggap bahwa DK bukanlah pemerintahan yang menguasai dan mengontrol semua wilayah Kamboja. Bagi mereka, pemerintahan DK sudah tidak ada, karena kini yang memegang pemerintahan Kamboja adalah pemerintahan PRK.

Perbedaan pendapat mengenai menyetujui atau menolak, dalam voting untuk menempatkan DK di kursi PBB mewarnai sidang Majelis Umum PBB tersebut. Walaupun ada suara pertentangan yang tidak menyetujui DK menduduki kursi Kamboja di PBB namun, hasil voting tersebut menyatakan bahwa DK berhak tetap meneruskan kursi Kamboja di PBB.¹⁸⁸

Untuk segera menyelesaikan masalah Kamboja yang belum usai, Majelis Umum PBB segera mengeluarkan resolusi damai yang diprakarsai oleh ASEAN. Resolusi ini adalah resolusi pertama PBB mengenai masalah Kamboja yang menyatakan gencatan senjata dengan segera supaya rakyat Kamboja dapat memilih pemerintahannya sendiri tanpa intervensi, subversi, dan paksaan dari pihak luar.¹⁸⁹ Resolusi ini juga menuntut kepada Vietnam agar segera menarik mundur pasukannya dari Kamboja. Resolusi ini telah disetujui oleh PBB pada 14 November 1979 setelah perdebatan panjang dan sengit yang kemudian diputuskan melalui pemungutan suara.¹⁹⁰ Keputusan resolusi ini langsung ditentang dan tidak diakui oleh PRK, negara-negara blok Soviet, dan India.

ASEAN terus berusaha untuk menyelesaikan dengan segera masalah politik Indochina. Agar tidak terus menerus terjadi sehingga secara tidak langsung dapat membahayakan keamanan Asia Tenggara secara keseluruhan. Untuk itu, negara-negara ASEAN setuju pada September 1980 untuk mengusulkan diadakannya suatu konferensi internasional tentang Kamboja di bawah pelaksanaan PBB yang menyerukan penarikan seluruh pasukan Vietnam dari

¹⁸⁸Gareth Porter. Kampuchea's UN Seat: "Cutting the Pol Pot Connection." dalam *Indochina Issues* 1980. Washington: The Center For Internasional Policy, Indochina Report. hlm 3-5.

Hasil voting tersebut memperlihatkan 71 menyetujui, 35 menolak. dan 34 abstain.

¹⁸⁹ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 13-14.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm 14. Dijelaskan bahwa 91 negara anggota Majelis Umum PBB menyetujui resolusi tersebut, 21 menolak, dan 29 negara abstain.

Kamboja dan pelaksanaan pemilu di bawah pengawasan PBB.¹⁹¹ Akhirnya usulan ASEAN disetujui PBB dan dijadikan resolusi Majelis Umum PBB nomor 35/6 Oktober 1980.¹⁹²

Upaya diplomasi yang diprakarsai ASEAN ini terwujud dalam penyelenggaraan konferensi internasional yang disebut *International Conference on Kampuchea-ICK* di New York pada 13—17 Juli 1981.¹⁹³ Pertemuan tersebut dihadiri oleh 79 delegasi dan para pengamat dari 14 negara.¹⁹⁴ Uni Soviet, Laos, Vietnam, dan PRK tidak menghadiri pertemuan tersebut karena mereka tidak setuju dengan penyelenggaraan konferensi internasional mengenai Kamboja. Hal ini dilatarbelakangi karena bagi mereka Kamboja tidak mempunyai masalah apa-apa untuk diselesaikan secara internasional.

Dalam pertemuan tersebut, ASEAN mengusulkan *draft* proposal penyelesaian politik masalah Kamboja, yaitu:

1. Penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja di bawah pengawasan PBB.
2. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB di Kamboja untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
3. Perlucutan senjata semua kelompok bersenjata dengan segera setelah penarikan mundur pasukan Vietnam.
4. Diadakannya pemilu untuk membentuk pemerintahan baru dengan pengawasan PBB.
5. Membentuk pemerintahan sementara hingga terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu, dan

¹⁹¹ *Indochina Issues*. "Diplomacy of the Kampuchea Conflict: Key Documents." Washington: A Publication for the Center International Policy, Indochina Project. November 1981 nomor 21, hlm 3.

¹⁹² *Ibid.*, hlm 3-4. Resolusi menyebutkan penarikan mundur pasukan Vietnam; pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Kamboja secara bebas; serta penyelenggaraan suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan masalah Kamboja.

¹⁹³ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 18.

¹⁹⁴ *Ibid.*

6. Memastikan kelompok-kelompok di Kamboja yang kini konflik, tidak akan menjalankan politik bermusuhan dengan negara-negara tetangganya di masa yang akan datang.¹⁹⁵

Usulan ASEAN ini ternyata tidak disukai oleh China dan Khmer Merah. Cina tidak setuju dengan usulan ASEAN yang meminta perlucutan senjata semua faksi di Kamboja segera setelah pasukan Vietnam ditarik dari Kamboja. China menganggap bahwa kelompok-kelompok Kamboja tersebut, khususnya Khmer Merah tidak akan menghalangi pelaksanaan pemilu di bawah pengawasan PBB. Oleh karena itu, China pun mengusulkan bahwa diperlukan perjanjian di antara semua kelompok Kamboja untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas tanpa adanya gangguan dan kekerasan dari kekuatan bersenjata kelompok-kelompok Kamboja.¹⁹⁶

Walaupun adanya keberatan dari China atas usulan ASEAN dan ketidakhadiran dari negara-negara yang pro-invasi Vietnam atas Kamboja, *International Conference on Kampuchea* akhirnya menghasilkan 15 butir penyelesaian komprehensif politik masalah Kamboja.¹⁹⁷ Pada intinya, butir-butir tersebut menginginkan penyelesaian konflik Kamboja yang diawali dengan penarikan mundur seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja.

3.3 Tiga Kelompok Perlawanan Kamboja anti-Vietnam

Walaupun Pemerintahan DK telah berhasil digulingkan pasukan Vietnam, namun ternyata pertempuran antara pasukan Khmer Merah dengan pasukan Heng Samrin dan pasukan Vietnam masih berlangsung. Hal ini karena Khmer Merah berhasrat untuk memukul mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan berusaha untuk mendapatkan kekuasaannya kembali. Di dalam negeri Kamboja sendiri, Khmer Merah bukanlah satu-satunya kelompok perlawanan anti-Vietnam. Setelah Vietnam menginvasi Kamboja dan mendudukkan Heng Samrin di kursi pemerintahan Kamboja—PRK, munculah tiga kelompok besar yang menentang

¹⁹⁵ Warner, Draguhn. "The Indochina Conflict and the position of Countries Involved" dalam *Contemporary Of Southeast Asia*. Volume 5, No.1 Januari 1983. California: University of California Press. hlm 112.

¹⁹⁶ *Indochina Issues*. "Diplomacy of the Kampuchea Conflict: Key Documents", *Op. Cit.*, hlm 4.

¹⁹⁷ 15 butir hasil ICK dapat dilihat di lampiran.

PRK dan Vietnam sebagai reaksi ketidaksukaan rakyat Kamboja atas campur tangan Vietnam di Kamboja. Tiga kelompok tersebut, yaitu:

3.3.1 Khmer Merah

Khmer Merah adalah kelompok pertama yang menentang rezim Heng Samrin dan invasi Vietnam atas Kamboja karena rezim Heng Samrin yang dibantu oleh pasukan Vietnam telah berhasil menggulingkan Pemerintahan DK. Setelah Phnom Penh jatuh dan dikuasai oleh Heng Samrin, Khmer Merah dengan sisa-sisa pasukannya masih melakukan perlawanan terhadap pasukan pemerintahan rezim Heng Samrin dan Vietnam di sepanjang perbatasan Thailand—Kamboja. Pasukan bersenjata Khmer Merah ini dinamakan *National Army of Democratic Kampuchea* (NADK). Diperkirakan jumlah pasukannya hingga tahun 1985 telah mencapai 35.000 pasukan.¹⁹⁸ Dilihat dari jumlah pasukan, pengalaman berperang, dan kelengkapan militer, Khmer Merah merupakan kelompok anti-Vietnam yang paling kuat di antara kelompok lainnya. Perlengkapan militer Khmer Merah sendiri didukung kuat oleh China yang mengirimkan bantuan perseniataannya lewat Thailand.¹⁹⁹

Di satu sisi, Khmer Merah merupakan kelompok penentang yang paling kuat, namun di sisi lain juga merupakan kelompok yang paling lemah dari kelompok perlawanan lainnya. Citra buruk yang dimiliki Khmer Merah karena selama 3 tahun masa kekuasaannya, kelompok ini telah banyak melanggar HAM karena membunuh jutaan rakyat Kamboja. Oleh sebab itu, Khmer Merah banyak dikecam oleh masyarakat internasional.

Untuk memperbaiki citra buruk Khmer Merah, jabatan Perdana Menteri Pemerintahan DK yang selama ini dipegang oleh Pol Pot dialihkan Khieu Samphan yang lebih moderat pada Desember 1979.²⁰⁰ Untuk menarik dukungan

¹⁹⁸ Jonathan Stromseth. *Time On Whose Side in Cambodia?* Dalam *ISIS Paper*. Bangkok: Chulalongkorn. 1988. hlm 9.

¹⁹⁹ Segera setelah Khmer Merah jatuh, China berjanji memberikan bantuan keuangan dan material kepada pasukan Pol Pot. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kapal RRC yang membawa perlengkapan militer sebagai bantuan kepada pasukan Pol Pot. RRC menggunakan Pulau Karang, Khemara Phumin yang terletak antara perairan teritorial Muangthai dengan Pulau Kong, pulau yang paling besar di Teluk Siam, yang menghadap Pegunungan Cardamon dan Pegunungan Gajah, basis pertahanan perlawanan pasukan Pol Pot. Untuk lebih jelasnya, lihat *Kompas*, 1 Februari 1979. “Bantuan Militer RRC Kepada Khmer Merah Melalui Pulau Karang Khemara Phumin.”

²⁰⁰ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 17.

internasional ditempatkanlah Khieu Samphan sebagai orang yang tampak terdepan di Khmer Merah. Menurut Sihanouk dan beberapa pengamat politik, Khieu Samphan adalah penguasa Khmer Merah yang bukan dalang di balik kekejaman Khmer Merah pada masa kekuasaan pemerintahan DK. Dengan demikian Khmer Merah berharap dengan perubahan tersebut dapat merubah *image* buruk mereka.

3.3.2 *the Khmer People's National Liberation Front (KPNLF)*

Setelah Phnom Penh diambil alih oleh Khmer Merah pada 17 April 1975. Sebuah komunitas kecil yang terdiri dari kaum intelektual penganut politik bebas bertemu di Paris dan memutuskan untuk membentuk asosiasi orang Kamboja perantauan di luar negeri, yaitu *Association des Cambodiens a L'Etranger* (ACE) '*Association of Overseas Cambodian*.'²⁰¹ Seorang anggota pendiri ACE mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menolong Sihanouk, mereka berupaya menyakinkan Sihanouk supaya tidak bekerjasama dengan Khmer Merah karena Khmer Merah belum menunjukkan sikap aslinya.²⁰² Beberapa anggota ACE ini pernah bersama dengan Sihanouk di Beijing dan mereka aktif menentang Lon Nol. Hal ini terbukti dengan Sekjen ACE, yaitu Kolonel Nguon Pythoureth yang merupakan dubes GRUNK.

Pemimpin ACE ini adalah Son Sann. Ia adalah seorang mantan PM Kamboja pada tahun 1967—1968. Selain itu, Son Sann pernah menjadi penasehat Sihanouk selama 20 tahun dan juga merupakan pendiri dan pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Nasional Kamboja. Kemudian ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri Kamboja. Setelah kudeta Lon Nol yang mengasingkan Sihanouk pada tahun 1970, Son San meninggalkan Kamboja dan menetap di Perancis.

Pertengahan tahun 1975, ACE merubah namanya menjadi *Association Generale des Khmer a L'Etranger* (AKGE) '*General Association of Khmer Overseas*' dalam usahanya untuk memperluas kegiatannya dalam bidang politik,

²⁰¹ Jacques Bekaert. "Kampuchea the Year of The Nationalist?." dalam *Southeast Asia Affairs*. Singapore, Pasir Panjang : ISEAS. 1985. hlm 166.

²⁰² *Ibid.*

sosial dan sekaligus militer.²⁰³ Kepemimpinan AGKE tetap dipegang oleh Son Sann dan Troung Mealy sebagai sekjen.²⁰⁴ Salah satu tujuan *public* AGKE ini adalah kebudayaan.²⁰⁵ Para anggotanya menginginkan kebudayaan Khmer dapat diselamatkan, dilindungi, dan dilestarikan karena rezim Pemerintahan DK menghilangkan semua bentuk jenis kesenian Kamboja. Di bidang militer, AGKE juga berusaha untuk menentang dan melawan rezim Khmer Merah. Oleh karena itu, para anggota inti AGKE yaitu Son Sann, Nguon Pytoureth dan Troung Mealy memutuskan untuk membentuk kekuatan bersenjata untuk melawan Khmer Merah.

Untuk menciptakan pergerakan konkrit melawan Khmer Merah, Son Sann, Dien Del²⁰⁶ dan para pengikutnya merencanakan membuat pergerakan melawan Khmer dari wilayah Kamboja sendiri. Pada pertengahan tahun 1978, Jenderal Dien Del dan Kolonel Nguon Pythoureth secara diam-diam masuk ke dalam wilayah perbatasan Kamboja. Akan tetapi, ketika mereka di sana, mereka kesulitan untuk mengorganisasi banyak kelompok kecil yang terpencar-pencar. Beberapa di antara kelompok-kelompok tersebut juga hanya beranggotakan tidak lebih dari selusin pasukan seperti kelompok *Reaksa Sambok, Kok Sar, dan Baksei Cham Krong*²⁰⁷

Untuk menghadapi Vietnam, setelah Sihanouk meninggalkan Kamboja, Son San langsung mendekati Sihanouk beberapa kali.²⁰⁸ Hal ini bertujuan untuk mengajak Sihanouk masuk ke dalam organisasi nasionalis ini. Namun, Sihanouk menolak tawaran tersebut. Sihanouk pada saat itu, berharap dapat berbicara langsung dengan Vietnam untuk membuat kesepakatan bersama dan menyatakan bahwa aksi militer bukan cara yang baik untuk memecahkan masalah Kamboja.²⁰⁹ Dalam penolakannya, Sihanouk juga mengatakan bahwa bila ia bergabung dengan kelompok nasionalis ini, ia tidak dapat mengemukakan pendapatnya dengan bebas karena setiap pernyataannya harus dibicarakan dahulu dengan organisasi ini.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm 167.

²⁰⁶ Pada tahun 1977, Dien Del, mantan seorang jenderal Lon Nol tiba di Perancis dari Amerika. Kemudian AGKE langsung merekrutnya untuk masuk ke dalam kelompok nasionalis ini.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

Sikap ini mungkin disebabkan pengalamannya ketika ia berkoalisi dengan khmer Merah. Sihanouk tidak mau mempunyai pengalaman yang sama dengan organisasi Son Sann ini. Dengan penolakan Sihanouk untuk bergabung dengan kelompok nasional ini, munculah pertentangan kecil antara pengikut Son Sann dengan Sihanouk.

Untuk menghadapi pasukan Vietnam di Kamboja, Jenderal Dien Del dan Nguon Pythoureth pergi ke daerah perbatasan Thailand—Kamboja untuk memperkuat dan mengorganisasi kelompok militer nasionalis ini setelah mendapat izin dari pemerintah Thailand untuk melintasi perbatasan. Mengenai kekuatan bersenjata, para pemimpin pergerakan nasionalis lokal Kamboja yang menentang invasi Vietnam di Kamboja ini setuju membentuk kekuatan militer yang lebih besar untuk mengusir Vietnam dari Kamboja. Oleh karena itu, pada 5 Maret 1979 dibentuklah *the Khmer People's national Liberation Armed Forces* (KPNLAF) di Perancis yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok lokal seperti *Reaksa Sambok, Kok Sar, Khleang Moeung, Nenraung, dan Baksei Chamkrong*.²¹⁰

Presiden dari KPNLAF adalah Son Sann sedangkan Dien Del adalah panglima tertinggi KPNLAF. Tujuan KPNLAF ini adalah untuk kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan netralitas bagi Kamboja. KPNLAF menuntut penarikan mundur pasukan Vietnam dengan segera dari wilayah teritorial Kamboja.²¹¹

Diperkirakan pada tahun 1987, anggota KPNLAF berjumlah 14.000 personil.²¹² Untuk melandasi pergerakan politik KPNLAF, pada 9 Oktober dibentuklah *the Khmer People's National Front* (KPNLF) yang diproklamasikan

²¹⁰ *Ibid.* Pada peringatan ulang tahun KPNLF yang pertama (9 Oktober 1980), sudah 13 pergerakan lokal nasionalis Kamboja penentang Vietnam telah bergabung dalam KPNLF. Diantaranya adalah *Prey Veng, the Nationalist Movement, Okhna Son Kuy, Kauk Tjlok, the Khmer Neutralist Movement, the Black Indra, Khleang Moeung, Cobra, United Free Khmer, ASW, Tonle Basak, Kompong Thom Movement, dan the Khmer Islam Movement.*

²¹¹ Pergerakan KPNLAF terorganisasi dalam tiga zona yaitu utara, tengah, dan selatan. Di bagian utara kepemimpinan dipegang oleh Im Chhoodeth, di bagian selatan dipimpin oleh Kolonel Prom Vith, dan Jenderal Dien Del memimpin di bagian tengah. *Ibid.*, hlm 168.

²¹² Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 274.

di barat daya Kamboja, di daerah Phum Sokh Sann oleh Son San.²¹³ KPNLF mempunyai tiga prinsip yang melandasi pergerakannya, yaitu:

1. Pembebasan Kamboja dari pendudukan pasukan militer Vietnam.
2. Mencegah berkuasanya kembali rezim yang dapat membahayakan rakyat Kamboja yang telah menerapkan *genocide*.
3. Pembaharuan kembali kemerdekaan Kamboja yang bebas dan berkedaulatan penuh serta bersih dari korupsi.²¹⁴

Kepemimpinan KPNLF tetap dipegang oleh Son Sann.²¹⁵

Sebagai langkah untuk diakui dunia internasional, Son Sann kerap kali mengunjungi beberapa negara sahabat seperti negara-negara Eropa, China, dan ASEAN untuk mencari dukungan moral, politik, dan material terhadap KPNLF. Usaha ini tidak sia-sia dan membuahkan hasil, terbukti pada November 1979 dan Juni 1981, KPNLF menerima bantuan perlengkapan militer dari China sebanyak 3000 senjata.²¹⁶ Dengan *image* KPNLF yang nasionalis, yang terdiri dari kaum intelektual Kamboja, KPNLF pun mendapat dukungan dan simpati dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan ASEAN.

3.3.3 *Front Uni National pour un Cambodge Independent, Neutre, Pacifique, et Cooperatif* (FUNCIPEC)

FUNCIPEC adalah *Front Uni National pour un Cambodge Independent, Neutre, Pacifique, et Cooperatif*. FUNCIPEC adalah partai politik yang didirikan oleh Sihanouk pada maret 1981 di daerah perbatasan Thailand.²¹⁷ FUNCIPEC ini bertujuan untuk melandasi pergerakan politik Sihanouk dalam upayanya mengusir Vietnam dari Kamboja. FUNCIPEC sendiri dibentuk oleh Sihanouk dalam

²¹³ Jaques Bekaret. "Kampuchea "Loose Coalition": a Shotgun Wedding." dalam *Indochina Issues*. December 1981: a Publication of the Center for International Policy, Indochina Project. hlm 2

²¹⁴ Abdulgaffar Peang-Meth. "A Study of the Khmer People's National Liberation Front and The Coalition Government of Democratic Kampuchea", dalam *Contemporary Southeast Asia*. Volume 12, Number 3, December 1990. hlm. 173.

²¹⁵ Jabatan wakil presiden dipegang oleh Chhean Vam. Neang-Chin sebagai Sekjen KPNLF. Hing Kunthon sebagai Ketua Komite Ekonomi. Kolonel PromVith sebagai Ketua komite yang mengurus masalah agama dan sosial. Dien del sebagai panglima tertinggi militer dan Im Chhoodet sebagai Ketua Komite Dalam Negeri yang dibantu oleh Abdulgaffar Peang Meath dan Boun Sai. Jacques Bekaert. "the Year of The Nationalist," *Loc.Cit.*, hlm 168.

²¹⁶ *Ibid.*, hlm 168.

²¹⁷ Michael Leifer. *Dictionary of the Modern Politic of Southeast Asia 3rd Edition*. London: Routledge. 1995. hlm 116

upaya melakukan langkah konkret dalam bidang politik dan diplomatiknya untuk mencari dukungan internasional atas masalah Kamboja. Saat itu, ia menyadari bahwa konflik Kamboja sudah berlangsung lama dan tampaknya belum ada niat baik dari Vietnam untuk meninggalkan Kamboja. Oleh karena itu, Sihanouk membentuk FUNCIPPEC untuk mencari penyelesaian damai Kamboja.

FUNCIPEC awalnya adalah organisasi politik saja yang menyokong kegiatan diplomasi Sihanouk. Akan Tetapi, di bidang militer ada satu kelompok organisasi Khmer pendukung Sihanouk. Kelompok ini adalah kelompok nasionalis Khmer yang mengklaim mempunyai kesetiaan terhadap Sihanouk. Kelompok ini bernama Moulinaka, *Mouvement de Liberation National du Kampuchea*, yang didirikan pada 31 Agustus 1979 oleh Kong Sileah dan Nhem Saphon di Provinsi Battambang.²¹⁸

Sampai musim semi 1981, komunitas pengikut setia Sihanouk diketahui hanya ada satu kelompok, yaitu Moulinaka. Namun, pada musim semi 1981, In Tam, mantan PM Republik Khmer, Lon Nol, meminta Sihanouk untuk mengorganisasi sebuah pasukan bersenjata pengikut Sihanouk dari berbagai grup perlawanan kecil penentang Vietnam. Beberapa grup yang mau bergabung dengan Sihanouk dan FUNCIPPEC tersebut, antara lain seperti *the Sihanoukist* yang dipimpin oleh In Tam, *Khleang Moeung*, pimpinan Tuon Chay, dan Moulinaka.

Kelompok *Khleang Moeung*, pimpinan Tuon Chay sudah lama beroperasi di sepanjang perbatasan Kamboja—Thailand untuk memerangi Khmer Merah. Namun, setelah Vietnam melakukan invasinya, pergerakan ini beralih memerangi Vietnam. Sebelumnya, *Khleang Moeung*, berhubungan baik dengan KPNLF. Namun, dalam perkembangannya Tuon Chay tidak sepaham dengan Dien Del dalam menjalankan pergerakannya. Tuon Chay pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Sihanouk. Tuon Chay percaya bahwa hanya Sihanouk yang dapat bernegosiasi dengan Vietnam dan akhirnya menyelamatkan Kamboja.

Awalnya, Sihanouk kurang menyukai pembentukan kekuatan bersenjata dalam kelompok perlawanan Kamboja. Ia menganggap bahwa kekuatan militer tidak akan mengalahkan Vietnam. Menurutnya, cepat atau lambat Vietnam akan berbicara dengan dirinya dan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan di

²¹⁸ Jacques Bekaert. "the Year of The Nationalist," *Loc.Cit.*, hlm 170-171.

antara Kamboja dan Vietnam. Namun, saat itu, keadaan membuatnya berpikir ulang mengenai kekuatan militer. Hal ini disebabkan Vietnam masih berada di Kamboja dan belum menunjukkan indikasi perdamaian. Oleh karena itu, Sihanouk akhirnya memutuskan untuk menyetujui pembentukan kekuatan bersenjata dengan tujuan memaksa Vietnam meninggalkan Kamboja.

Akhirnya, Moulinaka, *the Sihanoukist, Khleang Moeung* bergabung dan melebur ke dalam *Armee Nationale Sihanoukienne* (ANS) yang merupakan sayap militer dari FUNCIPPEC di bawah pimpinan Svi Toeun.²¹⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sayap militer dari FUNCIPPEC, ANS adalah barisan orang-orang yang setia terhadap Sihanouk dan mereka pun yakin Sihanouk satu-satunya pemimpin kamboja yang dapat mengusir Vietnam dari kamboja. Diperkirakan hingga tahun 1983, ANS mempunyai 5000 pasukan.²²⁰

3. 4 Peranan Norodom Sihanouk dalam Proses Pembentukan CGDK

Pada 23—27 September 1979, Sihanouk mencoba untuk melakukan usaha diplomatik untuk menangani masalah Kamboja dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para pengikut-pengikutnya di kediamannya di pengasingan, Pyonyang, Korea Utara.²²¹ Dalam pertemuan tersebut, Sihanouk menekankan perlunya diadakan konferensi untuk Kamboja seperti, Perundingan Jenewa pada tahun 1954 terdahulu dan perlunya dibentuk pengawasan internasional oleh negara-negara di dunia (India, Polandia, dan Kanada). Hal ini bertujuan untuk membuktikan penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, perlucutan senjata semua pasukan Kamboja (rakyat Kamboja dari segala kubu), serta menyediakan keadaan damai di Kamboja untuk melaksanakan pemilu agar rakyat Kamboja dapat memilih pemerintahan representatif Kamboja secara benar.²²²

Namun, segala usulan dan tindakan usaha Sihanouk ini terasa sia-sia karena sampai tahun 1980, Vietnam juga belum menarik pasukannya dari Kamboja. Keadaan ini membuat Sihanouk tertekan dan frustrasi sehingga membuatnya pada Juni 1980 mengumumkan bahwa dirinya pensiun dari segala

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ Jonathan Stromseth, *Loc.Cit.*, hlm 7.

²²¹ Macalister Brown, *Op.Cit.*, hlm 17.

²²² *Ibid.*

kegiatan politik Kamboja.²²³ Beberapa kali ia menyatakan bahwa dirinya menolak berpolitik lagi dan hanya akan kembali ke Kamboja sebagai warga negara biasa saja.²²⁴

Sementara itu, Pada tahun 1979—1980, Khmer Merah mulai didesak oleh China untuk membentuk front pemerintahan persatuan anti-Vietnam bersama Sihanouk atau Son Sann. Pada tahun yang sama, negara-negara ASEAN pun menganjurkan Khmer Merah untuk memperbaiki diri dan meninggalkan *image* yang buruk agar berangsur-angsur citra buruk tersebut dapat habis sehingga Khmer Merah dapat berhubungan baik dengan kelompok-kelompok anti-Vietnam yang non-komunis. PBB pun juga menyatakan bahwa perubahan sikap Khmer Merah ke arah yang lebih baik mutlak diperlukan jika Khmer Merah mau mempertahankan kursinya di PBB.

Untuk memperbaiki citra buruk tersebut, Khmer Merah pada Desember 1981 mengumumkan bahwa mereka tidak lagi berhasrat untuk membangun masyarakat sosialis-komunis dan menyukai gagasan mengenai pemilu yang bebas untuk memilih pemerintahan Kamboja selanjutnya.²²⁵ Mereka bahkan mengganti konstitusinya yang menegaskan bahwa Khmer Merah menghargai HAM.²²⁶

Untuk merealisasi pembentukan koalisi, pada 30 November 1980, Khmer Merah secara resmi mengajukan usul kepada Sihanouk untuk bekerja sama dengan mereka dalam suatu pemerintahan koalisi. Usul tersebut dikeluarkan oleh wakil PM merangkap Menlu DK, Leng Sary, dalam suatu wawancaranya yang diterbitkan oleh *Xinhua*.²²⁷ Bentuk pemerintahan yang diusulkan tersebut ialah serupa dengan bentuk pemerintahan yang pernah dipimpin oleh Sihanouk di pengasingan, Beijing pada tahun 1970—1975 ketika menghadapi rezim Lon Nol. Leng Sary yakin bahwa Sihanouk dan pemerintahan koalisi yang akan dibentuk dapat menghimpun semua pasukan Kamboja untuk menentang agresi dan membebaskan Kamboja dari Vietnam.²²⁸ Usulan Leng Sary mengenai pembentukan koalisi langsung ditolak oleh Sihanouk. Karena saat itu, Sihanouk

²²³ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 196.

²²⁴ Lihat *Kompas*, 9 Februari 1981. "Sihanouk Sedia Pimpin Regim Baru dan Front Nasional anti-Vietnam."

²²⁵ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 204.

²²⁶ Jacques Bekaret. "Kampuchea "Loose Coalition" : a Shoutgun Wedding," *Loc.Cit.*, hlm 2.

²²⁷ Lihat *Kompas*, 1 Desember 1980. "Leng Sary Usul Sihanouk Ikut dalam Pemerintahan koalisi."

²²⁸ *Ibid*

masih enggan berkoalisi dengan rezim yang telah banyak membunuh rakyat Kamboja serta keluarganya ketika mereka berkuasa.

Setelah Sihanouk menanggapi dingin usul koalisi tersebut, Khieu Samphan dalam pertemuan rahasia di Bangkok pada Januari 1981 menawarkan Son Sann untuk bergabung dengan kekuatan Khmer Merah untuk menghadapi Vietnam dalam sebuah landasan politik yaitu, pemerintahan koalisi.²²⁹ Dalam pertemuan tersebut, Khieu Samphan juga menawarkan posisi perdana menteri kepada Son Sann. Karena KPNLF menginginkan jabatan perdana menteri tersebut, KPNLF pun mengajukan syarat kepada Khmer Merah. Syarat yang diberikan adalah Khmer Merah harus mengurangi kekuatannya dan melebur ke dalam pemerintahan koalisi tersebut di bawah pimpinan KPNLF. KPNLF juga mengajukan syarat bahwa mayoritas portofolio penting pemerintahan koalisi ini berada di tangan KPNLF serta pemimpin-pemimpin DK harus diasingkan keluar Kamboja.²³⁰ Syarat-syarat KPNLF tersebut ditanggapi dingin oleh Khmer Merah yang tentu saja tidak mau mengurangi dan melepaskan kekuatannya.

Pada 9 Februari 1981, Sihanouk berkata lain mengenai pemerintahan koalisi tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya kembali dalam dunia politik dan bersedia memimpin suatu pemerintahan persatuan nasional Kamboja melawan Vietnam di Kamboja dengan syarat RRC harus memberikan bantuan kepada semua pihak dalam koalisi ini.²³¹ Sihanouk setuju memimpin suatu pemerintahan dan suatu front persatuan untuk berjuang melawan kolonialisme Vietnam di Kamboja jika persyaratan diterima oleh Khmer Merah dan RRC.

Dalam pernyataannya, Sihanouk mengemukakan bahwa komitmennya untuk memimpin suatu front koalisi tersebut adalah dengan syarat RRC memberikan bantuan material, senjata, dan bantuan keuangan kepada front ini seperti yang sudah dilakukan RRC ke Khmer Merah.²³² Saat itu, Sihanouk melihat bahwa Vietnam tak kunjung memberikan niat baik untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari Kamboja. Oleh karena itu, ia tidak mempunyai pilihan lain dan

²²⁹ Jacques Bekaret. "Kampuchea "Loose Coalition": a Shoutgun Wedding," *Loc.Cit.*, hlm 2.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ Pernyataan Sihanouk ini dari Pyonyang yang dikawatkan kepada AFP di Beijing. Lihat, *Kompas, Loc.Cit.*, "Sihanouk Sedia Pimpin Regim Baru dan Front Nasional Bersatu anti-Vietnam."

²³² *Ibid.*

akhirnya ia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Khmer Merah. Hal ini dilakukannya karena Sihanouk melihat bahwa China-lah yang dapat memberi bantuan besar baginya termasuk senjata dan kemanusiaan. China juga hanya mau memberikan bantuan tersebut ketika Sihanouk mau bergabung dengan Khmer Merah dan membentuk pemerintah koalisi.²³³

Selain itu, ia juga menyerukan agar dilakukan perlucutan senjata menyeluruh terhadap semua kelompok bersenjata di Kamboja setelah Vietnam keluar dari Kamboja dan koalisi ini sudah menguasai seluruh Kamboja. Perlucutan senjata ini penting untuk mencegah Khmer Merah membuat teror baru dan perang sipil kembali. Sebagai jaminan, Sihanouk juga menginginkan agar dibentuk pasukan perdamaian internasional di Kamboja untuk menjaga keamanan Kamboja setelah seluruh pasukan Vietnam keluar dari Kamboja.

Di samping itu, ia juga menyerukan agar dibentuk komisi pengawas internasional di bawah pengawasan PBB yang bertugas selama 5-10 tahun di Kamboja untuk mengawasi perpolitikan di Kamboja. Sihanouk juga menyarankan bahwa nama pemerintahan pemerintahan koalisi tersebut baiknya tidak mengandung nama pemerintahan DK. Hal ini dikarenakan nama tersebut sudah dipakai oleh Khmer Merah yang telah banyak melakukan kejahatan kemanusiaan di Kamboja. Setelah Sihanouk menyatakan kesediaannya untuk memimpin suatu koalisi tersebut, ia membentuk FUNCIPPEC dan ANS sebagai wadah organisasi Sihanouk.

Sebulan setelah Sihanouk menyatakan kesediaannya untuk memimpin suatu koalisi, pada 10–11 Maret 1981, Sihanouk dan Khieu Samphan mengadakan pertemuan pertama di Pyongyang tanpa Son Sann.²³⁴ Pertemuan tersebut dilaksanakan karena Khieu Samphan merasa berkeberatan atas usulan Sihanouk yang menginginkan perlucutan senjata seluruh pasukan Kamboja di masa depan ketika Vietnam sudah keluar dari Kamboja. Setelah pertemuan tersebut, Sihanouk

²³³ Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sihanouk. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa China telah menghidupkan kembali gagasan membentuk suatu persatuan nasional. Pernyataan ini rupanya menunjuk pada pernyataan PM RRC, Zhou Enlai di Bangkok, dua minggu sebelum Sihanouk menyatakan kesediaannya untuk memimpin koalisi. Saat itu, PM RRC menyatakan bersedia mendukung kepemimpinan Sihanouk memimpin suatu koalisi anti-Vietnam dan akan memberikan bantuan jika koalisi tersebut dapat terbentuk. Lihat, *Ibid.* Selain itu, keterangan tersebut dapat juga dilihat dari *Antara*, 22 Juni 1982. “Pangeran Sihanouk akan Kembali ke Kampuchea.”

²³⁴ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 198.

mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan militer. Ia pun mencoba bekerja sama dengan Son Sann. Namun, ia segera menyadari bahwa China-lah yang dapat menyediakan bantuan militer dan keuangan. Bantuan tersebut juga hanya akan diberikan China jika Sihanouk bekerjasama dengan Khmer Merah.

Setelah Sihanouk menyadari hal tersebut, pada April 1981, Sihanouk menyatakan permintaan perlucutan senjata Khmer Merah di masa depan akan ditarik kembali oleh Sihanouk jika China memberikan bantuannya kepada FUNCIPPEC.²³⁵ Pertemuan Sihanouk dan Khieu Samphan ini ditanggapi hati-hati oleh Son Sann yang masih menaruh curiga terhadap Khmer Merah atas usaha pembentukan suatu koalisi. Son Sann pun juga tidak mengakui FUNCIPPEC buatan Sihanouk. Hal ini disebabkan Sihanouk pernah menolak tawaran Son Sann agar Sihanouk menjadi pemimpin KPNLF. Dalam tahap ini, Son Sann masih belum mau bekerja sama dengan Sihanouk maupun Khieu Samphan.

Untuk mempererat hubungan antara dua pergerakan non-komunis anti-Vietnam, pada 3 Agustus, Sihanouk mengadakan pertemuan dengan Son Sann di Mougins, Perancis.²³⁶ Dalam pertemuan tersebut, Sihanouk mengusulkan pembentukan federasi antara FUNCIPPEC dan KPNLF. Namun, usulan ini segera ditolak oleh orang-orang KPNLF anti-Sihanouk. Sikap Son Sann dan pengikutnya ini disebabkan oleh sakit hati dan kecewa atas penolakan Sihanouk untuk bergabung dengan KPNLF dan justru malah membentuk organisasi lain, FUNCIPPEC. Dalam pertemuan itu juga, dapat disimpulkan bahwa Son Sann kurang tertarik dengan gagasan pembentukan koalisi.²³⁷

Pada Agustus 1981, usul pembentukan koalisi ini mulai menunjukkan tanda kegagalan. Hal ini disebabkan KPNLF yang masih tidak dapat berubah atas Khmer Merah. Syarat Son Sann masih sama, yaitu pemimpin-pemimpin atas Khmer Merah harus segera meninggalkan Kamboja dan front koalisi ini harus dipimpin oleh KPNLF.²³⁸ Menanggapi syarat-syarat ini, Khieu Samphan meminta Khmer Merah jangan menghancurkan otonomi dari Khmer Merah dan merusak status legal DK. Dengan adanya pertentangan antara Son San dengan Khieu

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Jacques Bekaret. "Kampuchea "Loose Coalition": a Shoutgun Wedding," *Loc.Cit.*, hlm 3.

²³⁷ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 19.

²³⁸ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 199.

Samphan, dan Son Sann dengan Sihanouk, maka pembentukan koalisi ini mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak masih mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai bagian dari usaha penyelesaian masalah Kamboja, negara-negara ASEAN mendukung usaha kelompok-kelompok perlawanan untuk mewujudkan suatu pemerintahan koalisi. Untuk melawan pemerintahan Heng Samrin yang dibentuk Vietnam, negara-negara ASEAN pun merintis jalan dengan mempertemukan ketiga pemimpin kelompok anti-Vietnam untuk memecahkan masalah kebuntuan di antara mereka.

Dengan dukungan dari ASEAN, ketiga pemimpin tersebut dipertemukan pertama kali pada 2—4 September 1981 di Singapura.²³⁹ Ketika Sihanouk sampai di Singapura, ia menyatakan bahwa dirinya berkeinginan untuk membentuk suatu koalisi dengan bergabung bersama KPNLF dan Khmer Merah tanpa prasyarat apapun bagi mereka.²⁴⁰ Sikap Sihanouk ini dilatarbelakangi karena ia menginginkan perjuangan bersama guna mengusir Vietnam dari Kamboja. Dengan perjuangan bersama perlawanan akan menjadi lebih terkordinasi dan efektif sehingga akhirnya dapat membebaskan Kamboja.

Setelah pertemuan tersebut, dalam pengumuman resminya, mereka menyatakan keinginannya untuk membentuk suatu koalisi bersama yang bertujuan untuk membebaskan Kamboja dari agresi Vietnam. Mereka menyetujui empat poin persetujuan yaitu, mereka setuju membentuk komite *ad hoc* untuk menyusun cetak biru mengenai prinsip-prinsip pembentukan pemerintahan koalisi; menyetujui dan mendukung resolusi yang dihasilkan oleh ICK yang diadakan pada 13—17 Juli 1981 di New York²⁴¹ dan resolusi-resolusi untuk Kamboja yang diputuskan oleh PBB; menyerukan pemberian bantuan bersenjata terhadap perjuangan mereka dalam melawan agresor Vietnam; dan mereka setuju untuk menghindari diri dari bentrokan-bentrokan bersenjata di antara mereka selama periode perundingan mengenai rencana pembentukan koalisi²⁴² serta

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Jacques Bekaret. “Kampuchea “Loose Coalition”: a Shoutgun Wedding,” *Loc.Cit.*, hlm 3.

²⁴¹ Mengenai hasil *International Conference on Cambodia* dapat dilihat di lampiran

²⁴² Pada musim semi dan musim panas 1981, KPNLF dan Khmer Merah terlibat beberapa kali konflik bersenjata. Lihat Jacques Bekaret. “Kampuchea “Loose Coalition”: a Shoutgun Wedding,” *Loc.Cit.*, hlm 3.

mereka juga setuju untuk tidak menyuarakan perbedaan-perbedaan mereka ke depan publik.²⁴³ Namun, penandatanganan persetujuan ini hanya menggunakan nama pribadi saja dan bukan kelompoknya masing-masing. Hal ini karena KPNLF belum mau mengakui FUNCIPPEC yang dibentuk oleh Sihanouk.

Antara 13 September—14 November 1981, komite *ad hoc* ketiga kelompok ini telah mengadakan pertemuan sebanyak sembilan kali di Bangkok untuk membicarakan konsep pembentukan pemerintahan koalisi.²⁴⁴ Dalam pertemuan-pertemuan tersebut terjadi perdebatan-perdebatan seru diantara Khmer Merah dan KPNLF. Son Sann secara lugas meminta jabatan PM dan meminta mayoritas portofolio penting dalam pemerintahan koalisi tersebut jatuh ke dalam KPNLF serta meminta pengasingan pemimpin Khmer Merah keluar dari Kamboja seperti Pol Pot, Ta Mok, Son Sen, dan Leng Sary.²⁴⁵ Hal ini diminta oleh Son Sann supaya Khmer Merah tidak dapat mengeliminir KPNLF. Sebagai jawaban dari permintaan Son Sann, Leng Sary menyatakan bahwa pengasingan beberapa pemimpin Kamboja tidaklah mungkin, “kami adalah patriot”.²⁴⁶

Dalam pertemuan tersebut, Khmer Merah mengusulkan empat prinsip dalam pemerintahan yang akan dibentuk tersebut, yaitu pemerintahan koalisi ini terdiri dari 3 organisasi yang berlandaskan hak kesamaan dan saling menghargai; setiap organisasi mempunyai jumlah representasi yang sama di dalam koalisi ini; setiap keputusan diputuskan melalui konsensus; dan memakai DK sebagai kerangka kerja yang sah untuk koalisi ini.²⁴⁷ Prinsip-prinsip Khmer Merah ini dicurigai oleh Sihanouk dan Son Sann. Hal ini karena Khmer Merah meminta koalisi ini menjadi satu bagian dengan DK. Bila hal ini terjadi, Sihanouk dan Son Sann, akan dieksploitasi oleh Khmer Merah dan akan berada di bawah DK.

Selain itu, Son Sann juga berkeberatan akan prinsip yang mengatakan bahwa setiap kelompok mempunyai kekuatan yang sama dan keputusan penting diambil lewat musyawarah atau konsensus. Prinsip ini dianggap Son Sann hanya akan menguntungkan Khmer Merah yang mempunyai banyak perlengkapan militer dan pasukan. Pada akhirnya, Khmer Merah akan menguasai koalisi dan

²⁴³ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 199.

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ Jacques Bekaret. “Kampuchea “Loose Coalition”: a Shoutgun Wedding,” *Loc.Cit.*, hlm 3-4.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm 4.

²⁴⁷ *Ibid.*

mengeliminir KPNLF di bawah kekuasaan DK. Dihadapkan pada situasi ini, Son Sann menjadi ragu untuk bergabung di dalam koalisi ini. Di satu pihak, Son Sann, ingin mengusir Vietnam dari Kamboja tetapi, di lain pihak, Son Sann merasa rugi bila harus bergabung dalam struktur DK, terlebih para pengikut Son Sann takut untuk bergabung dengan Khmer Merah.²⁴⁸

Awalnya, Sihanouk juga keberatan atas prinsip yang diusulkan Khmer Merah. Alasan yang dikemukakan pun sama dengan anggapan Son Sann. Tetapi, Sihanouk tidak mempunyai pilihan lain karena Vietnam masih bercokol di Kamboja dan demi mendapatkan bantuan perlengkapan militer dari China. Akhirnya Sihanouk pun menyetujui prinsip-prinsip tersebut. Setelah Sihanouk menyetujui *draft* prinsip yang dikemukakan oleh Khmer Merah, pada pertengahan November, Son Sann memutuskan mengundurkan diri dari segala rencana pembentukan koalisi tersebut.²⁴⁹

Pemerintahan koalisi tanpa Son Sann setidaknya akan mengurangi martabat pemerintahan koalisi tersebut di dunia internasional. Walaupun Sihanouk bergabung dalam koalisi ini, DK pun akan kesulitan untuk menyakinkan rakyat Kamboja dan dunia internasional bahwa koalisi ini tidak terdiri DK saja. Hal ini karena *track record* yang pernah dilakukan Khmer Merah ketika berkoalisi dengan Sihanouk dalam FUNK yang akhirnya membawa Kamboja dalam pemerintahan teror 1975—1979.

Sebagai langkah kongkret ASEAN yang ditunjukkan oleh Singapura untuk terus mewujudkan koalisi tersebut, PM Singapura, Sinnathamby Rajaratnam, dan Menlu Singapura, Suppiah Dhanabalan beserta Menlu Thailand, Siddhi Savetsila mengadakan pertemuan selanjutnya yang dihadiri oleh ketiga kelompok tersebut pada 22—23 November 1981 di Bangkok.²⁵⁰ Pertemuan tersebut dihadiri Khieu Samphan, Leng Sary, Son Sann, dan In Tam yang mewakili Sihanouk. Dalam pertemuan tersebut, PM Singapura, Sinnathamby Rajaratnam, Menlu Suppiah Dhanabalan, beserta Menlu Thailand Siddhi Savetsila mengusulkan proposal untuk menyelamatkan koalisi dari kebuntuan. Mereka mengusulkan bahwa setiap faksi atau kelompok dalam koalisi ini akan

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 200.

²⁵⁰ Jacques Bekaret. "Kampuchea "Loose Coalition": a Shoutgun Wedding," *Loc.Cit.*, hlm 6.

tetap mempertahankan identitasnya masing-masing; masing-masing kelompok dapat mempertahankan struktur militer dan politiknya; dan masing-masing kelompok dapat bebas menyebarluaskan program dan falsafah politiknya bagi masa depan Kamboja.²⁵¹

Untuk menggantikan struktur pemerintahan koalisi yang diusung oleh Khmer Merah, yaitu sebuah presidium, 10 kementerian, dan sebuah biro majelis nasional.²⁵² Singapura mengusulkan struktur pemerintahan yang lebih sederhana, yaitu seorang kepala negara, seorang PM, dan seorang wakil PM serta pembentukan 3 kementerian yang mewakili tiga kelompok yang akan bertanggung jawab atas koordinasi pertahanan.²⁵³ Usul Singapura ini disebut *loose coalition*-‘koalisi longgar’. Disebut demikian karena masing-masing kelompok dalam koalisi tersebut masih dapat mempertahankan identitas masing-masing. Usulan ini juga menyatakan bahwa koalisi ini akan otomatis bubar ketika Vietnam keluar dari Kamboja.²⁵⁴ Hal ini dilakukan supaya rakyat Kamboja dapat melaksanakan pemilu dan memilih pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pihak asing.

Pada akhir pertemuan ini, Sihanouk dan Son Sann langsung menyetujui gagasan Singapura. Namun, Khieu Samphan dan Leng Sary meminta waktu dua bulan untuk mempelajari dan mempertimbangkan proposal ini serta berkonsultasi dengan para pengikutnya sebelum Khmer Merah memutuskan untuk menerima atau menolak proposal ini. Pada akhir bulan Januari 1982, akhirnya Khmer Merah telah secara resmi menolak usul Singapura yang disampaikan dalam surat resmi Leng Sary kepada Ketua Komite Tetap ASEAN, Suppiah Dhanabalan.²⁵⁵ Walaupun telah menolak usul Singapura, Khmer Merah dalam nota resminya masih menyarankan pertemuan kembali dengan dua pemimpin kelompok lainnya untuk membahas perwujudan koalisi.

Penolakan DK atas usul tersebut tidak dapat diterima karena Khmer Merah hanya menginginkan koalisi di dalam struktur DK dan bukan koalisi longgar. DK takut organisasinya akan menjadi lemah bila tergabung dengan koalisi longgar

²⁵¹ *Ibid* dan *Sinar Harapan*, 9 Januari 1982. “Son Sann Harapkan Khmer Merah dapat Setujui Koalisi Longgar.”

²⁵² Jacques Bekaret. “Kampuchea “Loose Coalition”: a Shotgun Wedding,” *Ibid*.

²⁵³ *Ibid* dan Macalister, *Op.Cit.*, hlm 20.

²⁵⁴ Lihat *Kompas*, 26 Januari 1982. “Khmer Merah Resmi Tolak Koalisi.”

²⁵⁵ *Ibid*.

tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan panitia *ad hoc*, Son Sann sendiri sudah menolak dibentuknya koalisi dalam struktur DK. Hal ini dianggap KPNLF sebagai usaha mengeleminasi kekuatan KPNLF yang akan membuat KPNLF berada di bawah DK. Son Sann pun setuju dengan koalisi longgar usul Singapura. Namun, Khmer Merah menolaknya. Jelas disini, bahwa untuk mencapai suatu persetujuan di antara dua kelompok ini masih terhambat karena KPNLF dan DK masih tetap berusaha mementingkan kelompoknya masing-masing dan masih menaruh curiga satu sama lain.

Tanggapan Sihanouk atas penolakan Khmer Merah adalah bahwa ia merasa senang DK menolak usul koalisi longgar tersebut, meskipun ia masih bersedia membentuk suatu front dengan mereka.²⁵⁶ Dalam pernyataannya tersebut, Sihanouk mengakui mempunyai perbedaan serius antara China mengenai Khmer Merah yang telah banyak melakukan kejahatan kemanusiaan di Kamboja. Namun, Sihanouk sudah melupakannya supaya China memberikan restu dalam pembentukan koalisi ini dan memberikan bantuan kepada koalisi ini dan FUNCIPPEC. Sihanouk merasa pada tahap ini bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan lain karena Vietnam pun belum menunjukkan niat baiknya untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja.

Menanggapi Sikap Son Sann dan DK, Sihanouk mengambil sikap menunggu. Ia menyadari bahwa persetujuan-persetujuan antara mereka sangat sulit dicapai. Oleh karena itu, jika persetujuan di antara mereka sudah tercapai, Sihanouk pun akan setuju dan ikut bergabung. Sihanouk sendiri sudah bertekad untuk menerima segala persetujuan apa pun yang telah dicapai oleh DK dan KPNLF.²⁵⁷ Melihat sikap Sihanouk ini, bisa disimpulkan bahwa Sihanouk mempunyai sikap yang cenderung kompromistis terhadap kelompok-kelompok lain karena ia tidak memperuncing suasana dengan tidak memberikan prasyarat-prasyarat apapun kepada Son San dan Khmer Merah. Dengan demikian Sihanouk sudah tentu akan menyetujui pemerintahan koalisi jika Son Sann dan Khieu Samphan sudah mencapai persetujuan serta mencapai kata sepakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, Sihanouk dan Khmer Merah sama-sama menganjurkan pertemuan kembali dengan pemimpin-pemimpin kelompok

²⁵⁶ Lihat *Antara*, 30 Januari 1982. "Sihanouk Tentang Penolakan Khmer Merah Terhadap Koalisi."

²⁵⁷ Abdulgaffar Peang-Meth, *Loc.Cit.*, hlm 179.

penentang Vietnam untuk membahas kembali mengenai koalisi tersebut. Akhirnya, pada akhir Februari 1982, Sihanouk dan Khieu Samphan bertemu di RRC setelah China bersedia menjadi tuan rumah pertemuan ketiga kelompok ini.²⁵⁸ Namun, Son Sann tidak dapat menghadiri pertemuan ini karena saat itu, ia sedang berada di Paris.²⁵⁹

Dalam pertemuan tersebut, Sihanouk dan Khmer Merah menyetujui bahwa setiap faksi masih dapat mempertahankan identitasnya masing-masing dan menyetujui pembentukan pemerintahan koalisi. Satu hasil penting dalam pertemuan ini adalah mengenai perubahan sikap Khmer Merah dalam hubungannya dengan pemerintahan DK. Setelah bertemu Sihanouk, Khieu Samphan akhirnya memutuskan untuk tidak mengintergrasikan kelompok-kelompok perlawanan ke dalam institusi DK.²⁶⁰ Akhirnya, Khieu Samphan hanya menekankan bahwa kelompok-kelompok lain harus menghormati status sah pemerintah DK di PBB.²⁶¹

Hal ini merupakan perubahan fundamental dari Khmer Merah yang tidak menginginkan lagi pemerintahan koalisi masuk ke dalam struktur dan berada di bawah pimpinan DK. Berkat pendekatan Sihanouk, Khmer Merah akhirnya bersedia membuat kelonggaran-kelonggaran yang memadai tentang kekuasaan bersama agar usul koalisi ini dapat diterima oleh KPNLF. Di Beijing, Sihanouk dan Khieu Samphan berhasil mencapai beberapa kesepakatan, yaitu jika koalisi terbentuk maka; 1. Ketiga kelompok dalam koalisi ini akan mempunyai peraturan, hak, dan kewajiban yang sama sehingga dapat menumbuhkan persatuan di antara kelompok; 2. Koalisi harus mempunyai program politik yang jelas dan koalisi ini akan tercipta dengan kerangka legitimasi DK karena pemerintahan ini sudah diakui oleh PBB; 3. Ketiga kelompok akan tetap mempunyai otonomi penuh,

²⁵⁸ Awalnya, China menolak untuk menjadi tuan rumah pertemuan ketiga faksi Kamboja anti-Vietnam karena China mengkhawatirkan jika pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka dunia internasional akan menuduhnya sebagai penyebabnya sebab China adalah pendukung utama Khmer Merah.

²⁵⁹ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 22. Berdasarkan penulisan koran, Son Sann saat itu menerima undangan pertemuan lima hari sebelum pertemuan diadakan. Karenanya sulit baginya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Selain itu, ada beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa Son Sann enggan bertemu dengan Khmer Merah karena mempunyai perbedaan mengenai konsep pemerintahan koalisi.

²⁶⁰ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 200.

²⁶¹ *Ibid.*

kebebasan dalam ideologi dan cara berpikir.²⁶² Selesai pertemuan tersebut, Sihanouk menghimbau Son Sann untuk memecahkan perbedaan dengan Khieu Samphan dan masuk ke dalam koalisi.

Hasil persetujuan dari pertemuan antara Sihanouk dan Khieu Samphan langsung ditolak oleh Son Sann. Hal ini disebabkan pertemuan tersebut menyetujui untuk tetap mempertahankan status hukum DK yang berkali-kali telah ditolak oleh Son Sann. Walaupun Son Sann menolak untuk mengakui persetujuan di Beijing, ia masih berminat untuk mengadakan pertemuan dengan Khieu Samphan dan Sihanouk untuk membicarakan masalah koalisi.²⁶³ Ia juga mengatakan bahwa ia bersedia membentuk suatu pemerintahan koalisi tetapi tidak bersedia memasuki suatu aliansi DK.²⁶⁴

Sebagai usaha terus menerus ASEAN untuk membantu terbentuknya suatu koalisi anti-Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia menawarkan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah bagi pertemuan selanjutnya di antara ketiga pemimpin tersebut.²⁶⁵ ASEAN melihat perlunya pemerintahan koalisi ini untuk segera mewujudkan penyelesaian politik Kamboja. ASEAN menganggap penting koalisi tersebut karena bila terbentuk akan terbukalah saluran-saluran bantuan besar dari internasional untuk kelompok-kelompok anti-Vietnam tersebut. Selain itu, dengan pembentukan koalisi ini juga akan memaksa rezim Heng Samrin dan Hanoi untuk berunding demi menyelesaikan masalah konflik Kamboja. Di samping itu, pembentukan koalisi ini akan membantu pelaksanaan resolusi PBB yang bertujuan mencari penyelesaian politik di Kamboja yang diikuti dengan pemilu yang bebas di Kamboja.

Dengan adanya usulan mengenai pembicaraan selanjutnya di ASEAN, Son San pada akhir April 1982 melakukan kunjungan ke Singapura dan Malaysia.²⁶⁶ Kunjungan Son Sann ini ada hubungannya dengan pembicaraan puncak di antara

²⁶² Lihat, *Kompas*, 22 Februari 1982. “Program Politik Koalisi anti-Vietnam.” Berita ini dikutip dari *Xinhua*.

²⁶³ Lihat *Sinar Harapan*, 3 Maret 1982. “Son Sann Tetap Menuntut Koalisi Longgar anti-pendudukan Vietnam.”

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ Menlu Thailand, Siddhi Savetsila telah mengadakan pembicaraan terlebih dahulu dengan Menlu Malaysia, Tan Sri Ghazali Shafie, dan Menlu Singapura, Suppian Dhanabalan mengenai keberlangsungan rencana koalisi. Lihat *Antara*, 31 Maret 1982. “ASEAN Sedang Licinkan Jalan Bagi Pertemuan Ketiga Pemimpin Perlawanan Kamboja.”

²⁶⁶ Berdasarkan penelusuran berbagai koran dari tanggal 24—30 April 1982. (*Antara, Kompas, Merdeka, dan Merdeka*).

ketiga faksi tersebut dalam upaya mewujudkan pemerintahan koalisi.²⁶⁷ Setelah pertemuan tersebut, Son Sann memperlihatkan bahwa dirinya bersedia bekerja sama dengan DK dan FUNCIPPEC dalam sebuah kerangka pemerintahan koalisi.

Setelah semua setuju mengenai pembentukan pemerintahan koalisi, pada bulan Mei 1982, Menlu Thailand, Siddhi Savetsila, mengusulkan struktur pemerintahan koalisi, yaitu kepala negara adalah Sihanouk, PM adalah Son Sann, dan wakil PM adalah Khieu Samphan.²⁶⁸ Hal ini diusulkan oleh Thailand karena Son Sann masih memperlihatkan keengganannya untuk membentuk koalisi dalam struktur DK. Usul ini adalah jalan tengah dari permasalahan KPNLF dengan Khmer Merah. Saran yang penting dalam usul ini adalah DK masih dipertahankan. Akan, tetapi, kepemimpinannya diganti bukan lagi Khieu Samphan, melainkan Sihanouk dan Son Sann.

Dengan usul ini, ASEAN menginginkan pembagian kekuasaan yang adil di antara ketiga kelompok tersebut. Usul ini dinilai cukup adil karena Khmer Merah mempunyai pasukan perlawanan yang paling besar beserta perlengkapan militernya dibandingkan FUNCIPPEC dan Son Sann. Usul ASEAN ini memperlihatkan bahwa ASEAN tidak menginginkan lagi Khmer Merah berkuasa kembali sehingga ASEAN mengusulkan Sihanouk dan Son Sann sebagai pemimpin koalisi tersebut.

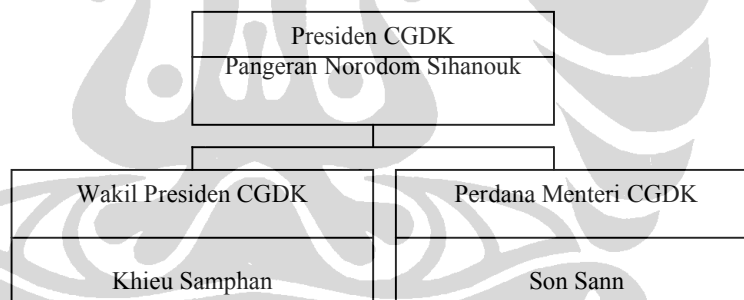
Pada awalnya ada keberatan-keberatan atas usulan Thailand ini seperti Sihanouk yang tidak mau menjadi kepala negara dengan alasan ia tidak mau kekuasaan apa pun karena ia tidak pernah menuntut apa-apa dalam koalisi ini. Khmer Merah pun tidak bersedia menerima suatu koalisi yang dipimpin oleh Sihanouk dan Son Sann. Saat itu, Khmer Merah menyatakan bahwa kelompoknya akan masuk dan bergabung dalam koalisi jika Khmer Merah dapat mempertahankan unsurnya, yaitu kepemimpinan DK. Sikap ini memperlihatkan ketakutan Khmer Merah jika menerima usul ini, kelompoknya akan kehilangan identitasnya dan mempunyai kekuasaan yang lebih kecil daripada kelompok lainnya.

²⁶⁷ Setelah pertemuan Son San dengan Ghzali Shafie, Malaysia menjamin bahwa Malaysia bersedia menjadi tuan rumah pertemuan ketiga faksi tersebut untuk membentuk suatu koalisi. Lihat *Suara Karya*, 27 April 1982. "Malaysia Tuan Rumah Pertemuan Khmer."

²⁶⁸ Lihat, *Antara* 13 Mei 1982. "Sihanouk Menolak Jadi Kepala Negara Kamboja."

Berbeda dengan Khmer Merah, Son Sann langsung menyetujui usulan Thailand ini dan menghimbau Khmer Merah untuk menerima usul tersebut dan memperlihatkan niat baik mereka dalam rencana koalisi ini. Akhirnya, pada awal Juni 1982, Khmer Merah akhirnya setuju untuk menerima usul pembagian kekuasaan koalisi tersebut. Sikap ini diungkapkan oleh Khmer Merah selesai pertemuan antara Khieu Samphan dengan Son Sann. Khieu Samphan setuju untuk menjadi wakil presiden merangkap menlu dan Son Sann sebagai PM. Sebelumnya Khieu Samphan menginginkan Leng Sary sebagai menlu. Namun, Son Sann langsung menolaknya karena Leng Sary adalah aktor di balik pembunuhan masyarakat Kamboja. Perbedaan pendapat ini pun akhirnya dapat diatasi dan membuat ketiga faksi ini setuju dengan usulan Thailand.

Akhirnya, 22 Juni 1982, telah ditandatangani peresmian mengenai pendirian *the Coalition Government of Democratic Kampuchea* di Kuala Lumpur, Malaysia.²⁶⁹ Pemerintahan koalisi ini akan dipimpin oleh Sihanouk sebagai presidennya, Son Sann sebagai perdana menterinya, dan Khieu Samphan sebagai wakil perdana menteri yang mengatur hubungan luar negeri.



Pemerintahan koalisi ini menggunakan legitimasi dan kerangka kerja dari pemerintahan DK yang mempunyai kursi di PBB. Oleh karena itu koalisi ini bernama *the Coalition Government of Democratic Kampuchea* (CGDK) ‘Pemerintah Koalisi Demokrasi Kamboja.’ Cara bekerja CGDK ini akan berpegang pada tiga prinsip bersama, yaitu *tripartism*, *equality*, dan *non – preponderance*.²⁷⁰ *Tripartism* berarti pemerintahan ini melibatkan tiga partai yang berkoalisi, *equality* berarti setiap partai mempunyai kedudukan dan hak yang

²⁶⁹ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 201.

²⁷⁰ *Documents of The Kampuchean Problems 1979 – 1985*. Bangkok: Ministry of Foreign Affairs. 1985. hlm 119-120.

sama serta saling menghargai di antara ketiga faksi yang terlibat, dan *non-preponderance* berarti pemerintahan koalisi ini tidak menerapkan sistem berat sebelah yang berdasarkan jumlah besar massa yang mendukung kelompok – kelompok dalam koalisi ini. Oleh karena itu, tidak satu pun kelompok yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari yang lain.

Dengan terbentuknya pemerintahan koalisi ini, diharapkan dapat membantu tercapainya konsolidasi dan rekonsiliasi damai di Kamboja. Hal ini disebabkan maksud dan tujuan dari pemerintahan ini adalah untuk mengusir kekuasaan Vietnam dari Kamboja, untuk memobilisasi semua usaha dalam melawan dan membebaskan kedaulatan Kamboja dari agresi Vietnam dan mengembalikan kemerdekaan serta kedaulatan Kamboja, serta untuk memperjuangkan terlaksananya implementasi konferensi internasional mengenai Kamboja dan resolusi-resolusi sidang umum PBB yang menyangkut Kamboja.²⁷¹ Selain itu, setelah penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, Kamboja akan menentukan nasibnya sendiri dengan pemilu yang bebas, adil, dan rahasia di bawah pengawasan PBB.²⁷²

Persetujuan koalisi itu juga mencantumkan prinsip operasional yang meliputi :

1. Pemerintah koalisi bekerja berdasarkan legitimasi dan kerangka dasar negara *Democratic Kampuchea* yang menjadi negara anggota PBB. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah koalisi bertekad mempertahankan kursi *Democratic Kampuchea* di PBB.
2. Setiap kelompok peserta pemerintah dalam koalisi akan mempertahankan organisasinya sendiri-sendiri, identitas politiknya, dan kebebasan bertindak, termasuk hak untuk menerima dan mengatur bantuan-bantuan internasional. Selain itu, pemerintah koalisi secara khusus menjamin untuk tidak berhak mengambil keputusan yang mengurangi atau membatasi hak tersebut.

²⁷¹ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 201 dan lihat, *Jurnal Ekuin*, 24 Juni 1982. “Sihanouk Himbau Negara Cinta Damai Bantu Bebaskan Kamboja.”

²⁷² *Ibid.*

3. Cara kerja pemerintah koalisi akan dikendalikan oleh prinsip tiga kelompok, berdasarkan kesamaan dan tidak satu pun kelompok mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari yang lain.²⁷³

Susunan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah koalisi adalah sebagai berikut. Pemerintah koalisi akan dilaksanakan oleh suatu dewan menteri. Dewan itu terdiri dari kabinet inti dan sejumlah komite koordinasi. Kabinet inti terdiri dari Sihanouk, Khieu Samphan, dan Son Sann. Komite koordinasi dibentuk di bidang-bidang yang menyangkut keuangan dan ekonomi, pertahanan, kebudayaan dan pendidikan, dan urusan-urusan sosial. Setiap komite koordinasi akan diketuai oleh tiga orang pejabat setaraf menteri yang mewakili ketiga kelompok dalam CGDK. Jabatan komite koordinasi tersebut bukan bagian dari kabinet inti, melainkan lembaga bawahan dari kabinet inti.

Pembentukan koalisi ini menimbulkan berbagai reaksi dari dunia internasional baik yang pro maupun kontra terhadap pemerintahan koalisi ini. Pendapat yang pro berasal dari negara-negara ASEAN yang memang mempunyai peranan besar dalam pembentukan koalisi ini. Hal ini dilakukan ASEAN sebagai langkah konkretnya mencari penyelesaian politik masalah Kamboja. ASEAN mengharapkan dengan pembentukan pemerintahan koalisi ini, pihak-pihak yang bertikai dapat berunding dan menyelesaikan konflik Kamboja.

Senada dengan ASEAN, China pun mendukung pembentukan koalisi ini karena memang sejak semula China-lah yang mengagas ide pembentukan koalisi ini. China berkepentingan dalam pembentukan koalisi ini karena China menginginkan Kamboja yang netral, terlepas dari pengaruh Vietnam yang didukung Uni Soviet. Amerika Serikat pun menyambut baik pembentukan suatu koalisi kelompok-kelompok Khmer yang menentang Vietnam di Kamboja. *“Amerika Serikat menyatakan pembentukan koalisi ini merupakan suatu langkah positif dalam memberikan kerangka kepemimpinan dan bagi penentuan nasib sendiri oleh rakyat Kamboja.”*²⁷⁴

²⁷³ Lihat *Jurnal Ekuin, Loc.Cit.*, “Sihanouk Himbau Negara Cinta Damai Bantu Bebaskan Kamboja.”

²⁷⁴ Pernyataan ini dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dikutip oleh *Antara*, 23 Juni 1982. “Amerika Serikat Sambut Baik Pembentukan Koalisi Tiga Kelompok Perlawanan Kamboja.”

Berbeda dengan ASEAN, China, dan Amerika Serikat, Vietnam dan PRK tentunya mengecam pembentukan pemerintahan koalisi ini. Rezim Heng Samrin ini mengecam sikap negara ASEAN mengenai Kamboja yang mendukung pembentukan pemerintahan koalisi tersebut.²⁷⁵ Mereka juga menyerukan bahwa masalah Kamboja adalah masalah antara bangsa Indochina dengan ekspansionis China yang tidak ada kaitannya dengan ASEAN. PRK mengatakan bahwa sikap ASEAN ini merupakan bukti turut campurnya ASEAN dalam masalah dalam negeri Kamboja yang merdeka dan berdaulat. Rezim Heng Samrin mengklaim bahwa pihaknya-lah yang merupakan wakil rakyat yang sah dan autentik.

Serupa dengan PRK, pemerintahan Vietnam pun mengeluarkan opini negatif mengenai pembentukan pemerintahan koalisi tersebut. Vietnam mengatakan bahwa pembentukan koalisi tersebut merupakan tipu muslihat China dan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menutup citra buruk kejahatan Khmer Merah guna meneruskan kursi mereka di PBB.²⁷⁶ Vietnam mengatakan bahwa ASEAN telah terjebak dalam perangkap RRC dengan mendukung pemerintahan koalisi tersebut yang tujuannya hanya untuk menentang rakyat Kamboja.

²⁷⁵ Pernyataan ini disiarkan oleh radio Phnom Penh-SPK yang dimonitor di Bangkok, yang kemudian dikutip oleh *Antara*, 23 Juni 1982. "Kamboja Dukungan Vietnam Kecam ASEAN."

²⁷⁶ Pernyataan Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach yang dikutip *Antara*, 24 Juni 1982. "Reaksi Vietnam Atas Pembentukan Koalisi Kamboja."

BAB 4

**Peranan Pangeran Norodom Sihanouk dalam the Coalition Government of
Democratic Kampuchea (CGDK) untuk Proses Rekonsiliasi Damai
Kamboja tahun 1982—1991**

Dalam bab ini akan diuraikan dalam dua periode. Pembagian periode ini penting karena dengan adanya pembabakan seperti ini, proses penyelesaian damai Kamboja dapat terlihat jelas dari tahun ke tahun hingga tahun 1991, puncak penyelesaian politik Kamboja. Periode pertama adalah dari tahun 1982—1987. Periode ini adalah ketika proses rekonsiliasi damai masih belum menemukan bentuk yang sesuai dengan masing-masing pihak, yaitu CGDK dan PRK. Dalam periode ini, pembicaraan negosiasi antara kedua belah pihak masih belum dapat dilaksanakan sehingga pada masa ini, Kamboja belum dapat menyelesaikan konfliknya.

Periode kedua adalah periode dari tahun 1988—1991. Periode ini mencakup berbagai perundingan-perundingan antara pihak-pihak yang bertikai mengenai penyelesaian damai Kamboja. Periode perundingan dimulai dengan adanya pertemuan Sihanouk dan Hun Sen yang kedua (1988), *Jakarta Informal Meeting* (1988 dan 1989), hingga penandatanganan Perjanjian Paris kedua tahun 1991, yang merupakan penyelesaian politik dari konflik Kamboja dan masa dimulainya Kamboja di bawah pengawasan PBB.

4.1 Proses Awal Rekonsiliasi Kamboja 1982—1987

4.1.1 Kursi CGDK di PBB, 1982

Setelah CGDK terbentuk, Sihanouk langsung melakukan lawatan ke negara-negara ASEAN untuk mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih ini dilatarbelakangi karena atas dukungan dan jasa negara-negara ASEAN pembentukan CGDK dapat terwujud.²⁷⁷ Selain itu, dalam kunjungannya tersebut,

²⁷⁷ Setelah menandatangani deklarasi pembentukan koalisi di Malaysia, Sihanouk langsung ke Singapura pada 27 Juni 1982. Lihat *Antara*, 28 Juni 1982. “Pangeran Sihanouk Tiba di Indonesia.” Kemudian berkunjung ke Indonesia pada 29 Juni 1982. Lihat *Kompas*, 30 Juni 1982. “Presiden Soeharto Bertemu Pangeran Sihanouk.” Setelah itu, Sihanouk pada 1 Juli 1982 berkunjung ke Manila. Lihat *Antara*, 2 Juli 1982. “Pangeran Sihanouk Tiba di Manila.” Terakhir Sihanouk

Sihanouk juga meminta bantuan kepada negara-negara ASEAN untuk memberikan bantuan kepada CGDK baik berupa bantuan militer, kemanusiaan, atau keuangan.²⁷⁸ Lawatan ini juga dimaksudkan Sihanouk untuk memmanifestasikan dukungan politik dan moril yang kuat dari ASEAN terhadap koalisi ini.

Setelah melakukan lawatan ke negara-negara ASEAN yang diakhiri di Bangkok, Sihanouk memasuki daerah Kamboja melalu perbatasan Thailand untuk memproklamasikan CGDK secara resmi di bumi Kamboja. Hal ini dilakukan Sihanouk untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa pemerintahannya bukanlah di pengasingan. Upacara ini berhasil dilaksanakan pada 9 Juli 1982 di sebuah daerah hutan Kamboja barat (yang dirahasiakan) dekat Thailand.²⁷⁹ Pada hari tersebut, Sihanouk juga mengumumkan dibentuknya empat komite koordinasi tripartit yang akan bertindak sebagai kementerian.²⁸⁰

Pada awalnya, Sihanouk dan Son Sann menentang pengangkatan para tokoh Khmer Merah yang ada hubungannya dengan pemerintahan teror kemanusiaan, pada empat koordinasi yang memerintah koalisi tersebut. Namun, penentangan tersebut dapat diatasi karena konstitusi koalisi ini tidak membenarkan satu kelompok mendominasi kelompok lainnya. Konstitusi tersebut juga mengatakan bahwa keputusan diambil secara konsensus dan masing-masing

melawat ke Bangkok pada 3 Juli 1982. Lihat *Antara*, 4 Juli 1982. "Pangeran Sihanouk Tiba di Bangkok."

²⁷⁸ Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dengan para pemimpin negara ASEAN, para negara ASEAN saat itu belum memberikan bukti konkret atas bantuan terhadap koalisi ini sesuai dengan permintaan Sihanouk. Namun, negara ASEAN memberikan jaminan diplomatik dan politik kepada Sihanouk bahwa ASEAN akan mendukung penuh CGDK.

²⁷⁹ Macalister Brown dan Joseph J. Zasloff. *Cambodia Confounds the Peacemaker 1979—1998*. New York: Cornell University Press. 1998. hlm 23 dan *Suara Karya*, 12 Juli 1982. "Pemerintah Koalisi Perlawanan Terbentuk."

²⁸⁰ Pengumuman resmi terbentuk CGDK, disiarkan lewat stasiun radio bawah tanah suara demokrasi Kamboja yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan koalisi itu sejalan sejalan dengan deklarasi tiga pihak yang ditandatangani di Kuala Lumpur, 22 Juni 1982. Keempat koordinasi yang bertugas sebagai kementerian-kementerian kabinet pemerintahan tiga pihak adalah sebagai berikut :

1. Komite urusan ekonomi keuangan : Leng Sary (Khmer Merah), Bour Hell (FUNCINPEC), dan Boun Sai (KPNLF)
2. Komite urusan pertahanan : In Tam (FUNCINPEC), Son Sen (Khmer Merah), Im Chhoodeth (KPNLF)
3. Komite pendidikan dan kebudayaan : Thuch Rinh (Khmer Merah), Chak Sorouen (FUNCINPEC), dan Chhoy Vy (KPNLF)
4. Komite urusan kesehatan dan sosial : Dr.Thiounn Thoeun (Khmer Merah), Dr. Baou Kheng (KPNLF), dan Pangeran Noropon Chakrapong (FUNCINPEC).

Lihat *Antara*, 12 Juli 1982. "Pangeran Sihanouk Proklamasikan Pemerintah Koalisi Kamboja."

kelompok mempunyai anggota pada keempat komite tersebut. Jadi, ketika harus mengambil keputusan, Khmer Merah mempunyai satu suara, KPNLF mempunyai satu suara, dan FUNCIPPEC juga mempunyai satu suara. Dengan demikian, Khmer Merah sebagai pihak komunis yang mempunyai persenjataan paling kuat dan banyak tidak akan mendominasi keputusan CGDK karena keputusan tersebut diambil secara konsensus.

Pada hari peresmian CGDK yang disiarkan oleh Radio Demokrasi Kamboja. Sihanouk berseru kepada seluruh bangsa Kamboja di mana pun mereka berada, di dalam, maupun di luar negeri untuk bersama CGDK berjuang melawan pendudukan asing. Sihanouk juga berseru kepada semua pemerintah dan negeri bersahabat untuk mendukung perjuangan gerilya koalisi ini yang bertujuan untuk mengembalikan perdamaian di Kamboja dan mempertahankan perdamaian serta stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Seruan Sihanouk ini telah berhasil membuat perhatian internasional tertuju kepadanya. Sosoknya merupakan satu-satunya tokoh nasional Kamboja yang dikenal oleh dunia internasional karena jasanya yang telah membuat Kamboja merdeka. Dengan tampilnya Sihanouk dalam tubuh CGDK, dunia internasional mengharapkan sosoknya dapat membawa perdamaian di tanah Kamboja.

Setelah CGDK resmi terbentuk di bumi Kamboja, Vietnam pada 15 Juli 1982 menanggapi pergerakan Kamboja tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya akan menarik mundur sebagian pasukan Vietnam di Kamboja.²⁸¹ Hal tersebut dilakukan Vietnam dengan alasan untuk mengurangi ketegangan mengenai Kamboja. Bila ditelusuri sikap Vietnam ini, dapat dilihat sebagai ketakutannya terhadap pembentukan CGDK yang dipimpin oleh Sihanouk. Vietnam pada tahap itu berusaha untuk mengurangi kritikan tajam atas invasinya ke Kamboja. Hal ini dibuktikan pada saat Vietnam menyatakan penarikan mundur pasukannya. Pada saat itu pula, Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, memulai perawatannya ke negara-negara ASEAN. Tujuan lawatan Co Tach adalah untuk berusaha meredakan tekanan-tekanan yang menghendaki Vietnam keluar dari

²⁸¹ Hanoi mengumumkan bahwa 6 unit pasukannya akan ditarik keluar dari Kamboja namun, Vietnam tidak menyebutkan berapa serdadu yang ditariknya tersebut. Macalister, *Op.Cit.*, hlm 24 dan *Jurnal Ekuin*, 21 Juli 1982. "Vietnam Ingkar Janji; Pasukannya Belum Ditarik."

Kamboja serta sekaligus melakukan pembicaraan mengenai penyelesaian Kamboja.

Namun, janji Hanoi tersebut hanya janji belaka. Memang benar ada pasukan Vietnam yang telah ditarik keluar dari Kamboja, tetapi Vietnam hanya melakukan rotasi pasukan.²⁸² Pembicaraan Menlu Vietnam dengan negara-negara ASEAN tidak membuahkan hasil apa pun karena ASEAN tetap meminta penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja sebagai syarat perdamaian. Akan tetapi, Vietnam menolaknya dengan alasan masih adanya ancaman China yang akan mengganggu Vietnam.²⁸³

Sementara itu, CGDK setelah memproklamasikan secara resmi pemerintahannya di dalam teritoril Kamboja, mulai melancarkan aksi-aksi diplomatiknya ke dunia internasional. Hal ini dilakukan karena bertujuan untuk memperoleh dukungan internasional atas CGDK pada sidang majelis umum PBB pada Oktober 1982.²⁸⁴ Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Sihanouk ke Yugoslavia dan Rumania yang akhirnya menghasilkan dukungan kedua negara tersebut terhadap CGDK dan menginginkan perdamaian Kamboja yang ditandai dengan penarikan seluruh pasukan asing di Kamboja.²⁸⁵

Dalam sidang majelis umum tersebut, Sihanouk sebagai kepala negara CGDK menyampaikan pidatonya mengenai Kamboja. Dalam pidatonya, Sihanouk menyerukan Vietnam untuk menandatangani perjanjian damai dan pakta non-

²⁸² Hal ini dibuktikan dengan siaran radio Khmer Merah yang menyiarkan bahwa Vietnam sudah mengirimkan 4300 tentara baru masuk ke daerah Kamboja. Keterangan ini diperkuat dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Vietnam masih mempertahankan pangkalan-pangkalan artileri di Kamboja secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya lihat *Antara*, 21 Juli 1982. "Pasukan Vietnam Meninggalkan Garis Depan."

²⁸³ Menlu Nguyen Co Thach menyatakan bahwa terdapat banyak kegiatan subversive di Indochina yang mengancam kedaulatan Vietnam seperti pemerintahan Pol Pot di Kamboja dan di Vietnam dengan tokoh Hoang Van Hoan yang membelot ke China. Kemudian mengenai persoalan perbatasan antara Vietnam dan China, dan Laos dengan China. Pada saat serangan balasan China ke Vietnam Februari 1979, China juga dituduh melakukan gangguan-gangguan perbatasan di Laos. Co Thach juga menyatakan bahwa ancaman China juga berasal dari Thailand. Hal ini disebabkan karena Thailand digunakan sebagai pangkalan militer terhadap Vietnam ketika Vietnam menghadapi Amerika dan saat ini pun Thailand digunakan sebagai tempat penyaluran suplai China kepada gerilyawan Kamboja. Hal-hal inilah yang menyebabkan Vietnam belum mau menarik pasukannya dari Kamboja.

Lihat *Suara Karya*, 31 Juli 1982. "Netralisasi Kamboja Tidak Terpisahkan dari Netralisasi Asia Tenggara." Suara karya melakukan wawancara lengkap dengan Menlu Co Thach mengenai hasil lawatannya ke negara-negara ASEAN (Singapura, Malaysia, dan Thailand).

²⁸⁴ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 24.

²⁸⁵ Lihat *Antara*, 14—18 Agustus 1982.

agresi dengan CGDK secepat mungkin.²⁸⁶ Sihanouk mengajukan tawaran tersebut kepada Vietnam agar Vietnam menghormati integritas wilayah kedua negara dan hidup bertetangga dalam garis perbatasan kedua negara yang sebenarnya.

Damai Kamboja akan terlaksana jika Vietnam mau menarik semua pasukannya dari Kamboja dan diikuti pula pemilu yang bebas di bawah pengawasan PBB. Setelah pasukan Vietnam dapat ditarik, Kamboja kembali menjadi negara yang merdeka sehingga dapat menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangganya, termasuk Vietnam tanpa membedakan sistem politik yang dianut oleh negara tetangganya. Dalam pidatonya, Sihanouk juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada PBB karena selama ini telah menolak dalih dari rezim yang dilantik oleh sebuah negara asing. Rezim Phnom Penh sama sekali tidak mempunyai eksistensi yang nyata karena dikendalikan oleh Vietnam.²⁸⁷

Pendirian Sihanouk tersebut sejalan dengan pendapat ASEAN yang menuangkan usul resolusi ke dalam sidang umum majelis tersebut. *“ASEAN menegaskan penyelesaian yang adil mengenai masalah Kamboja adalah bergantung pada penarikan mundur semua pasukan asing dari Kamboja, pemulihan dan pemeliharaan kemerdekaan kedaulatan serta keutuhan wilayah Kamboja dan hak rakyat Kamboja untuk menentukan nasib mereka sendiri”*.²⁸⁸

Menanggapi seruan Sihanouk dalam pidatonya dan resolusi ASEAN, Vietnam dengan Menlu Nguyen Co Thach menyatakan bahwa keadaan di Kamboja sekarang ini tidak dapat diubah lagi, yakni hanya rezim Hemg Samrinlah pemerintahan yang sah di Phnom Penh.²⁸⁹ Tidak hanya Vietnam yang

²⁸⁶ Lihat *Antara*, 1 Oktober 1982. “Sihanouk Usulkan Penandatanganan Perjanjian Damai dan Pakta non-Agresi dengan Vietnam.”

²⁸⁷ Pidato Sihanouk terdapat dalam *Antara*, 1 Oktober 1982. “Sihanouk: Pasukan pro-Koalisi Kampuchea anti-Vietnam Kuasai Wilayah Luas.”

²⁸⁸ Teks resolusi yang dipaparkan ASEAN juga meminta janji agar semua negara tidak akan mempengaruhi dan tidak campur tangan dalam masalah Kamboja. Resolusi ini pun menyatakan terima kasih ASEAN kepada negara-negara penyumbang, PBB, dan lembaga-lembaga lain yang telah menyediakan bantuan bagi rakyat Kamboja, yang masih membutuhkan bantuan, khususnya bagi mereka yang berada dalam pengungsian di sepanjang perbatasan Thailand—Kamboja. Penambahan resolusi ASEAN kali ini hanyalah mengenai penyebutan pemerintahan koalisi yang dipimpin Sihanouk. Resolusi ASEAN ini hanya mengulangi resolusi tahun sebelumnya dalam ICK.

Lihat *Merdeka*, 2 Oktober 1982. “Sihanouk Serukan Hanoi Teken Perjanjian Damai.”

²⁸⁹ Lihat *Antara*, 20 Oktober 1982. “Posisi ASEAN dalam Penyelesaian Masalah Kampuchea di PBB Makin Kuat.”

mengajukan protesnya terhadap langkah ASEAN dan Sihanouk, pemerintahan Heng Samrin juga turut mengajukan keberatannya karena dimasukkannya masalah Kamboja dalam agenda majelis umum PBB. Rezim tersebut menyatakan bahwa Kamboja tidak mempunyai masalah apa-apa untuk diperdebatkan dalam PBB. Menlu PRK, Hun Sen, menyatakan setiap perdebatan mengenai Kamboja merupakan bukti nyata adanya campur tangan yang sama sekali tidak dapat diterima dan setiap resolusi tidak akan diterima apabila tidak ada partisipasi wakil PRK.²⁹⁰

Walaupun mendapat penentangan dari pihak Vietnam, Soviet, dan negara-negara blok timur lainnya, kecuali Rumania, CGDK berhasil lolos dari komite surat kepercayaan majelis umum PBB. CGDK diusulkan dan direkomendasikan untuk menduduki kursi Kamboja dalam PBB. Rekomendasi tersebut dapat diluluskan dengan mayoritas 2/3 jumlah suara anggota PBB. Vietnam dan sekutunya langsung menyerukan penolakan terhadap komite *credentials*, surat kepercayaan. Penolakan tersebut dilatarbelakangi karena mereka beranggapan CGDK adalah pemerintahan yang semu belaka.

Menanggapi seruan tersebut, Sihanouk langsung menegaskan bahwa pemerintahannya bukan di pengasingan. Pemerintahan CGDK beroperasi di daerah nasional Kamboja yang telah dibebaskan dari kehadiran pasukan Vietnam. CGDK beropersi di daerah barat laut, barat daya, dan timur Kamboja untuk berjuang membebaskan Kamboja dari Vietnam. Sihanouk menyatakan bahwa dengan mengakui pemerintahan dukungan Vietnam, PRK, atau membiarkan kursi Kamboja di PBB kosong berarti sama saja membiarkan Kamboja dikolonisasi oleh Vietnam.²⁹¹

Akhirnya Majelis Umum PBB memutuskan dengan suara 90 setuju, lawan 29, dan 26 abstain, dan 11 absen untuk yang keempat kali dalam empat tahun berturut-turut mendukung pemerintahan DK yang kini dipimpin oleh Sihanouk

²⁹⁰ Pernyataan ini adalah sebuah pesan Hun Sen kepada Sekjen PBB, Javier Peres yang disiarkan oleh radio Phnom Penh-SPK. Lihat *Merdeka*, 25 Oktober 1982. "Phnom Penh Protes dimasukkannya Soal Kamboja di Majelis Umum PBB."

²⁹¹ Sihanouk menyatakan hal tersebut pada suatu perdebatan mengenai laporan komite kredensial majelis umum PBB yang merekomendasikan penerimaan kredensial CGDK. Lihat *Antara*, 26 Oktober 1982." Sihanouk: Demokrasi Kamboja Bukan Pemerintahan Pengasingan."

dengan bentuk pemerintah koalisi untuk duduk di PBB.²⁹² Hal ini membuktikan bahwa naiknya Sihanouk ke panggung politik dalam tubuh CGDK telah menjadi faktor penting dalam proses perolehan suara *credentials* di PBB. *Image* buruk Khmer Merah di PBB digantikan oleh sosok Sihanouk yang dihormati oleh internasional telah membantu CGDK dalam mempertahankan kursinya di PBB.²⁹³ Dalam sidang tersebut juga dihasilkan ketetapan resolusi damai yang digagas oleh ASEAN sebagai upaya rekonsiliasi damai di Kamboja.²⁹⁴ Resolusi yang digagas ASEAN tersebut mengacu pada ICK tahun 1981, yang pada intinya menginginkan penarikan mundur seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja demi tercapainya damai Kamboja.

4.1.2 Legitimasi CGDK, 1983

Tahun 1983 adalah tahun legitimasi dari CGDK. Pada tahun ini, CGDK mulai melakukan aktivitas internasionalnya untuk memperoleh bantuan dari negara-negara internasional maupun pengakuan internasional atas CGDK. Dalam usaha tersebut, para pemimpin CGDK, khususnya Sihanouk, melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan. Seperti kunjungan ke negara ASEAN, China, dan Perancis.²⁹⁵

Tahun 1983 adalah tahun pembuktian pemerintahan ini. Hal ini dibuktikan pada akhir Januari 1983, Sihanouk telah melakukan sidang rapat kabinet koalisinya di suatu tempat, di bagian barat Kamboja, daerah yang telah dikuasai oleh pasukan koalisi.²⁹⁶ Dalam rapat kabinet tersebut, hanya Sihanouk dan Khieu Samphan yang hadir dan memimpin rapat tersebut. Son Sann tidak menghadiri

²⁹² Lihat *Antara*, 27 Oktober 1982. “*Xinhua*: Soviet Tidak Dapat Melepaskan Diri dari Tanggung Jawabnya atas Agresi Vietnam di Kamboja.”

²⁹³ Hasil dari peranan Sihanouk dalam perjuangan memperoleh suara CGDK melalui pidatonya di PBB dapat dilihat dari perolehan suara yang didapat oleh CGDK. Pada tahun 1982, CGDK mendapat 90 suara setuju, sedangkan pada tahun 1981, ketika belum terbentuk CGDK yang dipimpin oleh Sihanouk, Khmer merah hanya mendapat 79 suara setuju, 36 menentang dan 30 abstain. Lihat *Antara*, 7 September 1982. “Khmer Merah Harapkan Suara-Suara yang Menyokong Kelanjutan Kedudukannya di PBB.”

²⁹⁴ Resolusi ASEAN tersebut didukung sebagian besar anggota PBB dengan memperoleh suara 105 setuju, 23 menentang, dan 10 abstain. Lihat, Macalister Brown, *Op.Cit.*, hlm 24.

²⁹⁵ Berdasarkan penelusuran sumber koran, Sihanouk berkunjung ke Thailand (Januari), Perancis (April), dan Cina (Mei dan Desember)

²⁹⁶ Lihat *Sinar Harapan*, 27 Januari 1983. “Sihanouk Adakan Rapat Kabinet Koalisi anti-Vietnam.”

siang tersebut karena pada saat itu, ia sedang melakukan lawatan ke negara-negara Eropa untuk mencari dukungan bagi pemerintahan koalisi.

Setelah pertemuan tersebut, *komunike* singkat dikeluarkan yang pada intinya mereka bertekad bulat untuk meningkatkan kerja sama di antara mereka, khususnya dalam bidang militer dan diplomasi untuk mengarahkan perjuangan yang lebih efisien serta secepatnya membebaskan Kamboja dari agresor Vietnam.²⁹⁷ Dalam konferensi pers tersebut, Sihanouk juga menyatakan bahwa CGDK akan memberikan tempat kepada Heng Samrin jika pihaknya dapat netral dan melakukan devietnamisasi. Menanggapi pernyataan Sihanouk, Menlu PRK, Hun Sen, mengatakan bahwa ia tidak akan mengadakan suatu dialog dengan pemimpin CGDK, Sihanouk.²⁹⁸ Ia hanya menginginkan suatu dialog dengan China, Amerika Serikat, dan ASEAN, bukan dengan CGDK. Hun Sen juga menyatakan bahwa, “Penyelesaian militer lah satu-satunya jalan untuk melayani perlawanan-perlawanan reaksioner dalam koalisi tersebut”.²⁹⁹

Sementara itu, Menlu Vietnam, Nguyen Co Tach, pada Maret 1983, mengusulkan diadakannya perundingan tanpa syarat antara blok Indocina dan ASEAN, baik secara bilateral maupun multilateral untuk membicarakan berbagai masalah dalam bidang kemerdekaan dan keamanan yang dihadapi kawasan Asia Tenggara.³⁰⁰ Menlu Co Tach menyatakan bahwa Vietnam dan Laos dapat mewakili pihak Indocina, mengingat penolakan ASEAN untuk mengakui PRK.

Menanggapi usulan tersebut, China langsung menolak dan menentang usul Vietnam yang dianggap hanya sebagai taktik Vietnam untuk mengelabui ASEAN dalam masalah Kamboja.³⁰¹ ASEAN pun menolak usul Vietnam untuk berdialog dengan negara-negara Indocina.³⁰² Dalam penolakannya, ASEAN menyatakan bahwa ASEAN terbuka kepada Vietnam untuk berdialog dan menyakinkan pihaknya ikut serta dalam konferensi internasional prakarsa PBB mengenai konflik

²⁹⁷ Komunike ini lahir dari pernyataan Sihanouk yang mengadakan konferensi pers di Bangkok setelah rapat koalisi yang dikutip oleh *Suara Karya*, 29 Januari 1983. “Sihanouk Siap Rujuk dengan Heng Samrin.”

²⁹⁸ Pernyataan Hun Sen ini merupakan hasil dari wawancara Hun Sen dengan AFP, yang dikutip oleh *Antara*, 5 Februari 1983. “Phnom Penh Menolak Dialog dengan Sihanouk.”

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ Lihat *Merdeka*, 8 Maret 1983. “Menlu Co Thach: ASEAN dan Indochina agar Berunding Tanpa Syarat.”

³⁰¹ Lihat *Antara*, 22 Maret 1983. “Cina Menentang Usul Pertemuan ASEAN-Indocina.”

³⁰² Usulan Vietnam ini diputuskan melalui sidang tahunan para Menlu ASEAN pada akhir Maret 1983.

Kamboja, yang telah dimulai sejak bulan Juli 1981, ICK, demi tercapainya suatu penyelesaian politik secara luas bagi Kamboja.

Setelah pengakuan CGDK yang mewakili kursi Kamboja di PBB, pada 30 April, CGDK menerima surat kepercayaan dari Dubes China, Malaysia, Bangladesh, dan Mauritania.³⁰³ Sihanouk menyambut para tamu CGDK di daerah Kamboja yang sudah dibebaskan, yang ia sebut *Kampuchea Zone*, di daerah Phnom Malai, di Propinsi Battambang.³⁰⁴ Kota ini terletak dekat daerah perbatasan Kamboja—Thailand.

Dalam hukum internasional, kriteria pengakuan sebagai suatu negara atau pemerintahan adalah secara nyata mengontrol daerah dan populasi penduduk serta adanya organisasi administratif untuk mengatur wilayah teritorial suatu negara tersebut. Oleh karena itu, Sihanouk menyambut resmi para dubes asing yang menyampaikan surat kepercayaan mereka (*Credentials*) terhadap CGDK di daerah Kamboja, bukan di tempat kediaman Sihanouk di pengasingan, Beijing atau Pyongyang.

Dalam bidang politik, pada Mei 1983, Sihanouk mengusulkan ide rekonsiliasi nasional yang pemerintahannya terdiri dari empat partai.³⁰⁵ Ia mengatakan bahwa kerukunan empat kelompok dapat menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil setelah pemerintah PRK dibubarkan. Namun, usulan tersebut mendapat reaksi keras dari Khmer Merah dan Son Sann yang masih menolak bergabung dengan rezim Heng Samrin. Vietnam pun juga menolak usul Sihanouk mengenai pembentukan pemerintah koalisi Kamboja empat kelompok dengan memasukkan Heng Samrin ke dalam CGDK. Penolakan ini disampaikan oleh Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, yang dalam pernyataannya hanya mengakui pemerintahan PRK sebagai pemerintahan sah Kamboja.³⁰⁶

Pada Juni 1983, secara mengejutkan Sihanouk mengajukan pengunduran dirinya sebagai Presiden CGDK karena berselisih paham dengan DK.³⁰⁷ Sihanouk

³⁰³ Lihat, *Antara*, 1 Mei 1983. "Sihanouk Terima Surat Kepercayaan." dan Macalister, *Op.Cit.*, hlm 25.

³⁰⁴ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 24.

³⁰⁵ Lihat *Kompas*, 30 Mei 1983. "Sihanouk Pribadi Setuju Heng Samrin Ikut Koalisi."

³⁰⁶ Penolakan Vietnam ini dapat dilihat dari wawancara Co Tach dengan AFP di Hanoi, yang dikutip oleh *Kompas*, 4 Juni 1983. "Menlu Vietnam Tolak Gagasan Sihanouk."

³⁰⁷ Lihat, *Sinar Harapan*, 15 Juni 1983. "Sihanouk ingin Mengundurkan Diri karena Bentrok dengan Khieu Samphan."

menyatakan perselisihan itu timbul setelah Sihanouk mengusulkan untuk rujuk dengan Heng Samrin. Usulan Sihanouk tersebut sebenarnya bertujuan untuk mempertimbangkan penyelenggaraan pemilu yang diikuti oleh semua kelompok Kamboja dengan tujuan memperlunak pendirian keras Vietnam. Namun, DK menolaknya karena menganggap PRK sebagai pengkhianat bangsa.

Akan tetapi, pada akhir Juni 1983, Sihanouk menarik permintaan pengunduran dirinya kembali sebagai Presiden CGDK.³⁰⁸ Hal ini dikarenakan dua anggota lainnya dari CGDK telah menyetujui usaha Sihanouk melakukan pendekatan terhadap rezim Heng Samrin. Hal ini mungkin hanya siasat Sihanouk dengan dalih mengundurkan diri supaya kelompok-kelompok lain mau menerima pendapat Sihanouk. Sihanouk menyadari bahwa dua kelompok lainnya memerlukan sosoknya dalam koalisi. Hal ini disebabkan koalisi tanpa Sihanouk akan memperlemah kedudukan posisi CGDK dalam dunia internasional jika hanya Son Sann dan Khieu Sampahn yang tergabung dalam CGDK.

Usaha diplomatik selanjutnya pada tahun 1983 dilakukan oleh ASEAN yang menginginkan permasalahan Kamboja cepat selesai. Pada Juni 1983, ASEAN mengadopsi kebijakan lain terhadap negara-negara Indochina yang intinya berisikan dua poin penting. **Pertama**, penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja setelah sebelumnya diadakan gencatan senjata oleh semua pihak yang bertikai. **Kedua**, penegasan kembali ASEAN yang mendukung CGDK serta keinginan untuk berdiskusi dan bertemu dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik ini dalam mencapai penyelesaian politik Kamboja.³⁰⁹ Walaupun usulan ASEAN ini melibatkan Vietnam dan PRK, saat itu Vietnam menolak gagasan ASEAN tersebut.

Dalam sidang majelis umum PBB, kembali dikeluarkan resolusi PBB yang isinya sama dengan tahun 1982 dengan perolehan suara 105 setuju, 23 menentang, dan 19 abstain.³¹⁰ Kursi Kamboja di PBB tetap dipertahankan oleh CGDK tanpa persetujuan komite *credentials* karena Vietnam dan sekutu-sekutunya tidak menantang *credentials* terhadap CGDK.

³⁰⁸ Lihat *Suara Karya*, 25 Juni 1983. "Sihanouk Tarik Permintaan Pengunduran Dirinya."

³⁰⁹ Sorpong Peou. 1997. *Conflict Neutralization in the Cambodia War From Battlefield to Ballot Box*. New York: Oxford University Press. hlm 29.

³¹⁰ The Institute of Asian Studies Chulalongkorn University. *The Kampuchean Problem in Thai Perspective*. Bangkok. 1985. hlm 97.

4.1.3 Keadaan Tetap, 1984

Pada Januari 1984, Sihanouk kembali memimpin rapat kabinet koalisi dan kemudian menerima dua surat kepercayaan dari Yugoslavia dan Mesir di daerah teritorial Kamboja yang sudah dibebaskan.³¹¹ Sementara CGDK melakukan rapat kerja kabinetnya, pada akhir Januari 1984, para Menlu Indocina juga melakukan pertemuan di Laos, Vientiane.³¹² Dalam pertemuan tersebut, para Menlu Indocina mengeluarkan *komunike* bersama, yaitu empat usul bagi ASEAN untuk meredakan ketegangan di Asia Tenggara. Usul tersebut adalah:

1. Persetujuan terurai dengan ASEAN yang meletakkan dasar penyelesaian semua pertikaian secara berangsur-angsur. Persetujuan itu harus dijamin dan diawasi oleh dunia internasional.
2. Perundingan dengan Thailand untuk menciptakan zona keamanan di kedua perbatasan perbatasan Thailand—Kamboja di bawah pengawasan internasional.
3. Perundingan dengan RRC yang dimaksudkan untuk menarik keluar semua pasukan Vietnam dari Kamboja, mengakhiri ancaman RRC, dan mengakhiri penggunaan wilayah Thailand oleh pasukan Khmer Merah.
4. Perundingan dengan semua negara yang bersangkutan untuk menarik semua pasukan asing dari Asia Tenggara.³¹³

Dalam *komunike* tersebut juga dikatakan bahwa ketiga negara Indocina siap mengadakan dialog dengan ASEAN untuk mengakhiri ketegangan di Asia Tenggara.

Menanggapi usulan-usulan menlu Indochina tersebut, Sihanouk menyatakan bahwa, “*Seharusnya Vietnam tidak mengusulkan berunding dengan ASEAN, melainkan seharusnya dengan CGDK yang merupakan organisasi penentangannya karena ini menyangkut masalah Kamboja yang diinvasi Vietnam*”.³¹⁴ Sihanouk juga menyatakan bahwa ia bersedia berunding dengan Vietnam secara resmi tetapi, Sihanouk tidak mau memprakarsai pertemuan

³¹¹ Berdasarkan penelusuran koran – koran Indonesia (Kompas, Sinar Harapan, dan Antara) dari tanggal 25—30 Januari 1984.

³¹² Lihat *Kompas*, 31 Januari 1984. “Komunike Bersama Para Menlu Indocina.”

³¹³ *Ibid.*

³¹⁴ Lihat, *Antara* 1 Febuari 1984. “Sihanouk Serukan Dialog langsung Vietnam.”

tersebut. Sihanouk pun menyerukan kepada Vietnam bahwa pihaknya harus menarik mundur seluruh pasukannya dari Kamboja.

ASEAN pun menanggapi dingin usulan Indochina tersebut mengenai perundingan regional Asia Tenggara. ASEAN menganggap “*perundingan tersebut tidak relevan karena Vietnam menolak membahas masalah Kamboja yang dipandang ASEAN sebagai penyebab ketidakmantapan di kawasan ini*”.³¹⁵ Sihanouk dan ASEAN tetap menginginkan penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja. Namun, Vietnam melalui Menlu Co Tach mengenyampingkan penarikan sepihak oleh Vietnam dari Kamboja. Vietnam menyatakan penarikan hanya memungkinkan apabila China mengakhiri ancamannya terhadap Vietnam.³¹⁶

Pada Juni 1984, Vietnam mulai menarik sebagian pasukannya di Kamboja sesuai dengan kesepakatan untuk menarik pasukan Vietnam setiap tahun dalam pertemuan para pemimpin Indochina di Vientiane tahun 1983.³¹⁷ Penarikan ini mencakup dua brigade, sebuah resimen dan sejumlah batalion dari Kamboja utara dan barat laut yang akan berjumlah 10.000 pasukan.³¹⁸ Namun, penarikan ini hanya tipu muslihat, yang sebenarnya dilakukan Vietnam hanyalah melakukan perotasian pasukan di Kamboja.³¹⁹

Dalam bidang diplomasi, pada Maret dan Agustus 1984, Sihanouk kembali berusaha untuk menyelesaikan masalah Kamboja ini dengan mengusulkan agar mengadakan pembicaraan dengan rezim Heng Samrin guna membentuk kerukunan nasional, yaitu pemerintahan koalisi bersama untuk mengakhiri pertikaian antar faksi di Kamboja.³²⁰ Sihanouk menyatakan bahwa empat

³¹⁵ Lihat *Suara Karya*, 1 Februari 1984. “ASEAN Sambut Dingin Seruan Indochina.”

³¹⁶ Lihat *Antara*, 10 Maret 1984. “Vietnam Serukan Kompromi Mengenai Masalah Kampuchea.”

³¹⁷ Lihat *Kompas*, 22 Juni 1984. “Vietnam Tarik Sebagian Pasukannya di Kamboja.”

³¹⁸ *Ibid.*

³¹⁹ Hal ini dibuktikan oleh keterangan dari KPNLF bahwa pada Juli 1984 sekitar 14.000 anggota militer Vietnam baru ditempatkan di Kampuchea untuk menggantikan 10.000 pasukan Vietnam yang ditarik. Pasukan baru tersebut akan ditempatkan di Siem Reap, Battambang, dan Pailin (Berita ini dikutip dari radio KPNLF yang dimonitor di Bangkok dan dikutip oleh *Antara*, 17 Juli 1984. “Sekitar 14.000 Pasukan Baru Ditempatkan di Kamboja.”

Berita mengenai jumlah pasukan baru Vietnam yang masuk ke Kamboja berbeda-beda. KPNLF menyatakan 14.000 pasukan namun Khmer Merah menyatakan lebih dari 12.600 pasukan Vietnam baru ditempatkan di Kamboja yang akan tersebar di utara dan timur laut Kamboja (Lihat *Antara*, 24 Juli 1984. “Khmer Merah: Vietnam Kirim Pasukan Segar ke Kampuchea.”

³²⁰ Lihat, *Sinar Harapan*, 13 Agustus 1984. “Usulkan Pembicaraan Bagi Pembentukan Pemerintahan Rekonsiliasi.”

kelompok utama Kamboja harus ikut ambil bagian dalam sebuah pemerintahan transisi guna mengakhiri perang Kamboja ini. Semua pihak harus ikut dalam proses demokrasi dan hasil akhirnya diputuskan oleh rakyat Kamboja sendiri tanpa intervensi dari pihak asing.³²¹

Menanggapi hal tersebut, PRK langsung menolak usul Sihanouk mengenai kerukunan nasional yang menginginkan pembentukan pemerintahan empat pihak. Hal ini tentu saja ditolak oleh PRK karena PRK adalah pemerintahan efektif Kamboja yang memegang kekuasaan secara *de facto* di sebagian besar wilayah Kamboja. PRK tentunya tidak mau menyerahkan kekuasaannya tersebut dan melebur ke dalam pemerintahan koalisi yang akan membuat kekuasaannya menjadi terbatas.

Pada bulan September 1984, diadakanlah sidang tahunan Majelis Umum PBB. Dalam sidang tersebut, Sihanouk menyampaikan pidatonya yang berisi antara lain menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Vietnam, tetapi, dengan syarat bahwa pasukan Vietnam harus ditarik terlebih dahulu dari Kamboja.³²² menanggapi tawaran tersebut, Menlu Vietnam, Nguyen Co Tach, menolak tuntutan penarikan sepihak pasukan Vietnam dari Kamboja.³²³ Pihaknya hanya akan melakukan penarikan pasukan dari Kamboja jika tidak ada lagi ancaman dari China, baik dari saluran China yang menyokong kelompok perlawanan maupun dari saluran Thailand yang digunakan oleh China sebagai tempat penyaluran bantuan bagi kelompok perlawanan.

Dalam sidang Majelis Umum PBB tersebut, PBB mengeluarkan resolusi yang sama dari tahun lalu, yaitu menyerukan penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dengan suara 110 setuju, 22 menentang, dan 18 suara abstain.³²⁴ Dalam sidang majelis umum PBB, kursi Kamboja pun tetap dipertahankan oleh CGDK tanpa melalui pemungutan suara karena negara-negara sosialis pro-Vietnam tidak menantang *credentials* CGDK.

³²¹ Lihat *Antara*, 13 Maret 1984. "Sihanouk Serukan Pembentukan Pemerintahan Perukunan Kembali."

³²² Lihat *Antara*, 27 September 1984. "Sihanouk Tawarkan Perdamaian kepada Hanoi."

³²³ Lihat, *Antara*, 11 Oktober 1984. "Vietnam Tolak Tuntutan Penarikan Sepihak Pasukan Vietnam dari Kampuchea."

³²⁴ Lihat *Suara Karya*, 2 November 1984. "MU PBB serukan Vietnam Mundur dari Kamboja."

Pada tahun 1984, perundingan antara CGDK dengan PRK maupun Vietnam belum berhasil terlaksana. Masing-masing pihak masih keras dengan pendiriannya dan belum mau mencoba untuk kompromistis satu sama lain. Hal ini terlihat dari sikap CGDK dan Vietnam-PRK. CGDK menyatakan bahwa penarikan mundur seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja adalah syarat mutlak proses awal rekonsiliasi damai. Di lain pihak, Vietnam menyatakan bahwa tidak akan menarik mundur pasukannya dari Kamboja selama masih adanya ancaman dari China dan Khmer Merah.

Sebenarnya, Sihanouk sudah mengusulkan pemerintahan empat pihak sehingga PRK dapat bergabung dengan CGDK. Dengan demikian, akan memberikan pandangan kepada Vietnam bahwa tidak ada ancaman China karena semua pihak terlibat. Khmer Merah harus netral dan lepas dari pengaruh China. Selain itu, PRK pun harus netral dan lepas dari pengaruh Vietnam. Namun, usulan sudah tersebut ditolak Vietnam dan PRK.

4.1.4. Proposal Damai Pertama Kamboja yang Dikeluarkan Vietnam, 1985

Pada tahun 1985, tampaknya Vietnam mulai memperlihatkan kemauannya untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Hal ini dibuktikan ketika negara-negara Indochina bertemu di Ho Chi Minh pada Januari 1985. Mereka menawarkan lima poin proposal penyelesaian damai kepada ASEAN, yaitu :

1. Penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja setelah dilakukannya pengeluaran atau penyisihan organisasi rezim Pol Pot dari tanah Kamboja.
2. Menghormati hak rakyat Kamboja untuk menentukan nasibnya sendiri dan melakukan pemilu yang bebas di pengawasan internasional.
3. Membangun Asia Tenggara sebagai zona damai dan stabil di mana negara-negara yang berbeda sistem sosial dan ekonominya hidup berdampingan dengan damai tanpa intervensi dari pihak luar.
4. Menghormati semua negara luar untuk menghargai hak-hak nasional negara-negara Asia Tenggara.

5. Membangun jaminan internasional dan pengawasan internasional dalam mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan mengenai penyelesaian damai Kamboja.³²⁵

Namun, Sihanouk sebagai Presiden CGDK menolak proposal yang diajukan oleh Vietnam karena masih adanya kehadiran pasukan Vietnam di Kamboja. CGDK menginginkan seluruh pasukan Vietnam ditarik pada saat perundingan damai masih berlangsung. Jadi, penarikan pasukan Vietnam secara keseluruhan adalah hal yang mutlak bagi CGDK. Sihanouk juga menyatakan bahwa syarat Vietnam yang menetapkan penyingkiran secara politik dan militer Khmer Merah tidak dapat dimungkinkan karena Khmer Merah merupakan kelompok yang paling kuat di antara kelompok perlawanan lainnya.³²⁶ Di samping itu, China tidak akan membiarkan pejuang-pejuang nasionalis Kamboja berunding tanpa Khmer Merah yang merupakan pendukung utama kelompok tersebut dan juga negara penyokong bantuan terbesar bagi CGDK.

Sementara itu, sebagai usaha untuk memperbaiki citra buruk Khmer Merah, pada Juli 1985, Khmer Merah menyatakan tujuan baru mereka, yaitu bahwa mereka akan mendukung pemerintahan Kamboja selanjutnya yang akan menganut sistem liberal kapitalis dalam bidang ekonomi dan sistem politik pemerintahan parlementer.³²⁷ Khmer Merah juga menyatakan bahwa mereka siap untuk menjaga Kamboja tetap netral, tidak memihak, dan melakukan pemilu di bawah pengawasan PBB. Selain itu, pada saat yang bersamaan, Khmer Merah juga menunjukkan sikap moderat dengan bersedia menerima keikutsertaan PRK di dalam pemerintahan koalisi di masa depan dengan syarat bahwa mereka tidak lagi mempunyai hubungan spesial dengan Vietnam.³²⁸

Pada September 1985, Khieu Samphan juga mengumumkan pembubaran dewan tertinggi NADK dan pengunduran diri Pol Pot sebagai penglima tertingginya. Empat bulan kemudian setelah Vietnam mengajukan syarat bahwa pihaknya akan menarik pasukan dari Kamboja jika Pol Pot disingkirkan. Pol Pot pun menyatakan apabila Vietnam bersedia menarik mundur seluruh pasukannya

³²⁵ Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 30.

³²⁶ Lihat *Antara*, 2 Februari 1985. "Sihanouk Nyatakan Usul-Usul Vietnam Tidak Bermanfaat

³²⁷ Jonathan, Stromseth. "Time on Whose Side in Cambodia?" dalam *ISIS Paper* 1988. hlm. 1-43. Bangkok: Institute of Security and International Studies, Chulalongkorn University. hlm 13.

³²⁸ *Ibid.*

dari Kamboja dan mengizinkan pengawasan internasional untuk memonitor gerak penarikan mundurnya, ia akan mengundurkan diri dari segala kegiatan politik dan militer untuk selamanya.³²⁹

Sementara itu, Uni Soviet dan Vietnam memasuki dimensi baru ketika pada tahun 1985 terjadi perubahan orientasi politik luar negeri Uni Soviet terhadap Vietnam. Michael Gorbachev justru berpendapat bahwa berlanjutnya konflik antarkelompok di Kamboja dianggapnya hanya akan merintangikan kepentingan eksternal Uni Soviet yang menginginkan perbaikan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan China, ASEAN, Amerika, dan negara lainnya. Kondisi tersebut dapat dimengerti karena pada saat itu, pemerintahan Michael Gorbachev sedang membangun citra baru Uni Soviet dengan *Glasnot* dan *Perestroika*-nya.³³⁰

Negara pertama yang menanggapi perubahan orientasi Uni Soviet adalah China. China mengajukan tuntutan bagi perbaikan hubungan antara keduanya terletak pada kesungguhan Soviet untuk menekan Vietnam agar menarik mundur pasukannya dari Kamboja. Tuntutan Cina tersebut disampaikan melalui presiden Rumania ketika berkunjung ke Beijing tahun 1985.³³¹

Ketika terjadi perubahan sikap negara penyokongnya, sikap politik pemerintahan Vietnam terbukti berubah. Hal ini disebabkan, Uni Soviet mulai merasakan beban berat untuk membiayai kebijakan luar negeri intervensif dan mahal yang akhirnya membuat Gorbachev melakukan pembaruan terhadap aktivitas politik luar negerinya. Kebijakan Soviet untuk menarik armada militernya dibarengi dengan pengurangan bantuan secara berangsur kepada Vietnam telah melunakkan sikap Vietnam untuk bersedia menerima anjuran untuk menempuh proses damai di Kamboja.³³² Menanggapi tekanan-tekanan dari pihak

³²⁹ *Ibid.*, hlm 13-14.

³³⁰ Pada 11 Maret 1985, Michael Gorbachev terpilih sebagai pemimpin Uni Soviet. Untuk mengejar keteringgalan pembangunan dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakatnya, Gorbachev melaksanakan ide-ide pembaharuan di Soviet. Salah satu pembaharuan yang berpengaruh pada perkembangan politik dunia saat itu adalah *Glasnot* (keterbukaan) dan *Perestroika* (restrukturisasi ekonomi). Oleh karena itu, pada masa tersebut, Soviet mulai mengadakan hubungan baik dengan negara-negara lain demi tercapainya perbaikan kehidupan sosial politik ekonomi di Uni Soviet.

³³¹ Mohammed Noordin Soppie. "The Cambodian Conflict 1979 – 1989" dalam *ISIS Paper*. 1989. hlm. 1-27. Kuala Lumpur: Institute of Strategic and International Studies. hlm 8.

³³² Kesediaannya Uni Soviet mendesak Vietnam menerima jalan damai merupakan hasil negoisasinya untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan China. Lihat, Werner Draughn. "the

internasional, akhirnya pada Agustus 1985, Vietnam menjanjikan bahwa pihaknya akan menarik mundur pasukannya secara keseluruhan pada tahun 1990 baik masih ada Pol Pot ataupun tidak.³³³

Setelah proposal damai Vietnam tersebut ditolak oleh CGDK, ASEAN khususnya Indonesia dan Malaysia mengajukan usul pembicaraan yang kemudian dikenal dengan “*Proximity Talks*”.³³⁴ Usul pembicaraan ini melibatkan berbagai pihak yang bertikai di Kamboja, baik CGDK, PRK, maupun Vietnam. ASEAN dalam pertemuan ini hanya akan menjadi mediator bagi semua pihak. ASEAN mengusulkan bahwa pembicaraan tersebut akan mengarah pada gagasan penarikan mundur seluruh pasukan asing dari Kamboja, pembentukan suatu komisi pengawas PBB, rekonsiliasi nasional, penentuan nasib sendiri, dan pelaksanaan pemilu di bawah pengawasan PBB.

Senada dengan ASEAN yang mengusulkan hal tersebut, Sihanouk pun mengusulkan sebuah “*Cocktail Party*” internasional untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian konflik Kamboja.³³⁵ Usulan tersebut membawa Vietnam, China, dan Uni Soviet dan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja serta ke negara terkait lainnya ke meja perundingan untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Usulan ini pun ditanggapi positif oleh ASEAN, khususnya Indonesia yang menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk pertemuan *Cocktail Party* tersebut. Namun, hingga akhir tahun 1985 pelaksanaan dari usulan ini belum dapat dilakukan karena masih adanya hambatan dari pihak Vietnam dan PRK.

Sementara itu, dalam sidang majelis umum PBB yang diselenggarakan pada Oktober 1985, kembali menegaskan resolusi ASEAN yang menginginkan penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja untuk mencapai penyelesaian damai politik di Kamboja dengan suara 114 setuju,²¹ menentang, dan 16 abstain.³³⁶ Kursi Kamboja di PBB pun masih tetap dipertahankan oleh CGDK tanpa adanya proses voting negara anggota PBB karena Vietnam dan sekutunya tidak menantang CGDK dalam surat kepercayaan.

Indochina Conflict and the Position of Countries Involved” dalam *Contemporary Southeast Asia*. Volume 5, No 1 January 1983. Pasir Panjang: ISEAS. hlm 98-99.

³³³ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 29.

³³⁴ Nazaruddin, Nasution dkk. 2002. *Pasang Surut Hubungan Diplomati Indonesia Kamboja*. Phnom Penh: Kedutaan Besar Republik Indonesia. hlm 106.

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 31.

4.1.6. Proposal Damai Pertama yang Dikeluarkan CGDK, 1986

Pada tahun 1986, baik PRK dan Vietnam mulai merubah sikapnya dan mulai berusaha untuk memecahkan masalah konflik Kamboja. Perubahan sikap ini disebabkan mulai adanya usaha normalisasi hubungan antar China dan Soviet sehingga membuat Vietnam mulai memikirkan proses perundingan untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Hal ini dibuktikan karena pada awal tahun 1986, PM PRK, Hun Sen³³⁷ mengajak Sihanouk untuk bergabung dengan PRK dan bersama melawan Khmer Merah.³³⁸ Namun, Sihanouk menolak tawaran tersebut karena tidak mau meninggalkan teman satu koalisinya, yaitu Khieu Samphan, Son Sann. Pada saat yang bersamaan, PRK juga mengekspresikan untuk memulai negoisasi perundingan serta menyelesaikan konflik Kamboja yang berlarut-larut. Namun, pihak PRK menekankan pengusiran Pol Pot dan kelompoknya adalah hal yang penting guna tercapai rekonsiliasi damai yang sesungguhnya di Kamboja.

Menanggapi hal tersebut, CGDK menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dengan Vietnam dan PRK dalam kerangka *Proximity Talks* yang telah diusulkan oleh ASEAN. Sebagai langkah awal CGDK, CGDK mengajukan delapan poin proposal kepada Vietnam dan PRK pada Maret 1986, yaitu:

1. CGDK meminta Vietnam memulai bernegosiasi yang bertujuan untuk mendiskusikan proses penarikan mundur pasukan Vietnam. CGDK tidak meminta Vietnam untuk menarik seluruh pasukannya secara langsung bersamaan, tetapi CGDK menerima proses penarikan tersebut dalam dua fase waktu yang berbeda. Negara lain boleh ikut ambil bagian dalam negoisasi ini yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah politik di Kamboja.
2. Setelah mendapat kesepakatan mengenai proses penarikan mundur pasukan Vietnam di Kamboja, perlu diadakannya gencatan senjata di

³³⁷ Mulai tahun 1985, Hun Sen menjabat sebagai PM PRK menggantikan Chan Si yang meninggal pada Desember 1984. Hun Sen sebelumnya telah menjabat sebagai menlu PRK sejak Januari 1979. Awal karir politiknya adalah dimulai ketika ia masuk organisasi Khmer Merah pada tahun 1970 yang bertujuan menjatuhkan Lon Nol. Setelah Khmer Merah berhasil menguasai Phnom Penh pada 1975, Hun Sen menjadi deputi pemimpin daerah zona timur bersama Heng Samrin.

³³⁸ *Ibid.*

antara semua pihak untuk mengimplemtasikan kesepakatan penarikan mundur secara damai.

3. Proses penarikan mundur dan gencatan senjata harus di bawah pengawasan PBB.
4. Setelah tahap pertama penarikan mundur pasukan Vietnam selesai, Heng Samrin dan faksinya bernegoisasi damai dengan CGDK yang bertujuan untuk membangun persatuan dengan CGDK, menjadi persatuan empat faksi yang dipimpin oleh Sihanouk, Son Sann, dan Khieu Samphan. Dengan semangat persatuan nasional dan rekonsiliasi nasional, setiap partai dalam pemerintahan koalisi empat pihak ini akan memiliki hak yang sama dalam bidang politik nasional Kamboja.
5. Keempat partai yang nantinya tergabung dalam CGDK akan melaksanakan pemilu di bawah pengawasan dan para pengamat dari PBB.
6. Kamboja akan menjadi negara merdeka serta bersatu yang mempunyai integritas teritorial di tanah air Kamboja. Setelah diadakannya pemilu, Kamboja akan diperintah oleh pemerintahan demokrasi yang damai, netral, dan tidak memihak serta bebas tanpa adanya intervensi dari pasukan asing. Kenetralan Kamboja akan dijamin oleh PBB dan para pengamat PBB lainnya di tanah Kamboja selama dua hingga tiga tahun.
7. Kamboja akan meyambut semua negara baik barat maupun timur, negara netral dan tidak memihak untuk membantu Kamboja membangun kembali negaranya.
8. Kamboja yang merdeka, bersatu di wilayah teritorialnya sendiri, damai, netral, dan tidak memihak menginginkan untuk mengadakan perjanjian dengan Vietnam yang pada intinya berisikan perjanjian non-agresi dan hidup berdampingan dengan damai serta membangun kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara kedua belah pihak.³³⁹

Delapan poin proposal ini dilihat oleh kacamata PRK sebagai usaha untuk mengeliminasi PRK dan menggantikan pemerintahan PRK yang sekarang berkuasa menjadi hanya sekadar bagian dari pemerintahan koalisi empat pihak. PRK juga menolak proposal karena tidak mengindikasikan penyingkiran Khmer

³³⁹ Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 30-31.

Merah. PRK menganggap Khmer Merah adalah organisasi yang berbahaya sehingga mereka tidak mau berkerja sama dengan Khmer Merah. PRK tidak mempercayai bahwa pemerintahan koalisi empat pihak dapat berjalan dengan perbedaan yang begitu besar diantara empat kelompok tersebut. Disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, PRK dan Vietnam memutuskan untuk menolak proposal CGDK ini.

Sesungguhnya, delapan poin proposal yang diajukan oleh CGDK dapat dilihat sebagai upaya kompromistis dari CGDK. Bila diperhatikan pada poin pertama, CGDK tidak lagi meminta penarikan seluruh pasukan Vietnam dari Kamboja sebagai syarat mutlak untuk berunding. Usul pembentukan pemerintahan koalisi empat pihak tersebut juga merupakan usaha nyata CGDK untuk segera menyelesaikan masalah konflik ini. Hal ini disebabkan semua pihak di CGDK, akhirnya mau bekerjasama dengan PRK, yang pada tahun-tahun sebelumnya ditolak oleh Khmer Merah. Disebabkan penolakan PRK dan Vietnam atas proposal ini, hingga akhir tahun 1986, pembicaraan damai kedua pihak yang bertikai belum dapat dilaksanakan. Namun, walaupun begitu pada tahun 1986 ini kedua pihak yang bertikai baik PRK maupun CGDK telah siap untuk berupaya melakukan perundingan dan usaha untuk menyelesaikan konflik Kamboja

4.1.7. Pertemuan Pertama Sihanouk dan Hun Sen, 1987

Pada tahun 1987, proses rekonsiliasi di antara kedua belah pihak yang bertikai mulai menunjukkan kemauan untuk berunding satu sama lain demi menyelesaikan damai Kamboja. Hal ini dibuktikan pada Februari 1987, Sihanouk menyatakan keinginannya untuk mengadakan pembicaraan informal dengan PRK, Hun Sen.³⁴⁰ Keinginan Sihanouk, disambut baik oleh Hun Sen yang menyatakan hal serupa dengan Sihanouk. Akhirnya, pada September 1987, kementerian luar negeri PRK menyatakan kesiapannya untuk berbicara tanpa prasyarat apapun dengan Sihanouk.³⁴¹ Saat itu, PRK juga mengumumkan bahwa pihaknya siap berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi empat pihak dan juga menyatakan kesiapannya untuk berbicara dengan pihak DK yaitu, Khieu Samphan.

³⁴⁰ *Ibid.*, hlm 31-32.

³⁴¹ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 39.

Setelah mengumumkan kesiapannya tersebut, PRK mengusulkan lima poin solusi rekonsiliasi masalah Kamboja. Solusi ini merupakan gagasan rekonsiliasi nasional yang diawali dengan eksperisi keinginan PRK untuk berbicara dengan CGDK. PRK lebih memilih Sihanouk untuk berdiskusi mengenai proses rekonsiliasi Kamboja karena Sihanouk adalah tokoh nasional Kamboja. Lima poin yang diusulkan oleh PRK pada 8 Oktober 1987 adalah:

1. Untuk membawa rekonsiliasi damai bagi Kamboja, PRK menyatakan bahwa pihaknya siap bertemu dengan *Samdech* Norodom Sihanouk (yang terhormat Norodom Sihanouk) sebagai pemimpin dari kelompok oposisi untuk melakukan diskusi mengenai solusi damai konflik Kamboja dan rekonsiliasi nasional. Dalam bidang pemerintahan, PRK siap menawarkan Sihanouk pada posisi paling tinggi sebagai pemimpin negara Kamboja untuk rekonsiliasi damai dan kemerdekaan Kamboja. PRK akan menerima dan menyambut baik individu dan kelompok-kelompok oposisi, kecuali Pol Pot dan yang terkait dekat dengannya, untuk ikut ambil bagian dari dalam rekonsiliasi nasional ini.
2. Pasukan Vietnam akan ditarik dari Kamboja jika semua bantuan persenjataan terhadap oposisi PRK dihentikan.
3. Setelah penarikan mundur pasukan Vietnam, pemilu yang bebas akan dilaksanakan di Kamboja dengan pengawasan internasional serta pembentukan pemerintahan koalisi akan dilaksanakan demi tercapainya perdamaian, kemerdekaan, demokrasi, netralitas di Kamboja
4. Membicarakan perundingan damai dengan pihak Thailand mengenai masalah perbatasan agar daerah tersebut menjadi damai. Pelaksanaan hasil perundingan perdamaian perbatasan tersebut dapat diawasi oleh pengamat internasional. PRK juga mau melakukan pembicaraan dengan organisasi kemanusiaan dunia untuk mendiskusikan masalah pengungsi-pengungsi Kamboja. PRK berniat untuk melakukan *repatriation* 'pemulangan kembali' pengungsi-pengungsi tersebut yang tinggal di daerah perbatasan Thailand.

5. Perlu diadakannya konferensi internasional untuk menjamin kesepakatan yang telah diraih oleh pihak- pihak Kamboja.³⁴²

Namun, Usulan ini langsung ditolak oleh Sihanouk dan menyatakan bahwa usulan delapan poin CGDK haruslah dijadikan basis dialog untuk memperoleh damai di Kamboja dan Sihanouk pun meminta tahap pertama penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja sebagai syarat dari perundingan rekonsiliasi nasional.³⁴³

Walaupun, Sihanouk menyatakan penolakannya terhadap usul lima poin PRK, tetapi ia masih berminat untuk melakukan pertemuan dengan Hun Sen. Akhirnya pertemuan pertama Sihanouk dan Hun Sen dilaksanakan pada 2—4 Desember 1987 di Fere en Tardenois, di luar Paris, Perancis.³⁴⁴ Pada pertemuan tersebut, Hun Sen menceritakan bahwa pihaknya meminta pertolongan Vietnam untuk menggulingkan Pol Pot karena pada saat itu tidak ada negara yang dapat menolong Kamboja selain Vietnam.³⁴⁵ Hun Sen pun menyatakan bahwa pasukan Vietnam di Kamboja akan ditarik secara keseluruhan pada tahun 1990.³⁴⁶ Kemudian Hun Sen mengajak Sihanouk untuk bergabung dengannya demi tercapai damai di Kamboja.

Pada kesempatan tersebut, Sihanouk pun menyatakan penolakannya atas tawaran PRK yang menginginkan dirinya menjadi pemimpin tertinggi Kamboja. Sihanouk mengatakan bahwa dirinya akan kembali pulang ke Phnom Penh sebagai presiden CGDK dan bukan presiden dari *People Republic*,PRK.³⁴⁷ Sihanouk menyatakan pada pertemuan tersebut bahwa pendekatan perlu diadakan dari pihak Vietnam dan China guna mencapai rekonsiliasi sesungguhnya di Kamboja.

Pada pertemuan hari berikutnya, Hun Sen menjanjikan bahwa dirinya tidak akan mendiskriminasikan pihak oposisi yang pulang kembali ke Phnom Penh. Namun, hal ini pun ditolak oleh Sihanouk yang tidak akan pulang ke Kamboja dengan label PRK. Hun Sen mengakhiri pertemuan kali ini dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengakui pemerintahan CGDK.

³⁴² Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 33.

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 117.

³⁴⁵ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 40.

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ *Ibid.*

Pernyataan Hun Sen ini pun membuat Sihanouk geram dan menyatakan juga bahwa CGDK tidak akan mengakui rezim komunis di Kamboja dan PRK.

Pertemuan pertama Sihanouk dan Hun Sen menghasilkan beberapa komunikasi penting, yaitu mereka setuju mengenai suatu penyelesaian politik konflik Kamboja dan setuju diadakannya suatu konferensi internasional mengenai Kamboja.³⁴⁸ Konferensi tersebut dapat diadakan jika semua faksi Kamboja mencapai unsur kata sepakat mengenai unsur pemerintahan koalisi tersebut. Selain itu, pertemuan ini juga menghasilkan persetujuan mereka bahwa konflik Kamboja harus diselesaikan secara politik oleh para empat faksi Khmer tersendiri dan menyebutkan bahwa proses damai Kamboja harus merefleksikan damai, merdeka, demokrasi, berdaulat, dan netral Kamboja.³⁴⁹

Pada akhir pertemuan ini, mereka pun setuju untuk berdiskusi kembali dalam pertemuan selanjutnya. Pertemuan tersebut direncanakan dihadiri oleh empat faksi Kamboja.³⁵⁰ Hal ini digagas supaya empat faksi tersebut dapat menyelesaikan friksi di antara mereka sehingga damai dapat tercipta di Kamboja.

Pertemuan ini tidak membuahkan keputusan apa pun mengenai kepastian penarikan pasukan Kamboja dari Kamboja. Namun, walaupun begitu, pertemuan pertama ini adalah langkah awal yang baik dalam mencari penyelesaian konflik ini. Dengan adanya pertemuan ini, wakil dari masing-masing kelompok mulai menunjukkan indikasi baik bahwa mereka siap untuk berdamai dan mencari jalan tengah penyelesaian konflik ini. Dalam pertemuan ini, PRK juga telah menyetujui bentuk pemerintahan koalisi empat pihak yang bertujuan untuk mengakomodasi faksi-faksi Kamboja demi tercapainya perdamaian di Kamboja.

Pada 9 Desember 1987, Son San dan Khieu Samphan menolak untuk bernegosiasi dengan Hun Sen, dalam pembicaraan yang direncanakan oleh Sihanouk dan Hun Sen.³⁵¹ Mereka menolak menghadiri pertemuan empat pihak tersebut karena mereka menginginkan pihak Vietnam hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa negosiasi mengenai Kamboja harus melibatkan partisipasi langsung Vietnam karena Vietnam adalah pihak yang

³⁴⁸ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 235.

³⁴⁹ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 40-41 dan Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 33.

³⁵⁰ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 40-41.

³⁵¹ Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 33.

menginvasi Kamboja. Penolakan Son San dan Khieu Samphan juga disebabkan rasa kecewa mereka bahwa tidak adanya keputusan mengenai kepastian penarikan mundur pasukan Vietnam pada saat pertemuan pertama Sihanouk dan Hun Sen.

Menanggapi pernyataan Son Sann, pada 10 Desember 1987, Vietnam melalui kementerian luar negerinya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ikut dalam pembicaraan tersebut.³⁵² Alasan yang dikemukakan oleh Vietnam adalah permasalahan antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja harus dibicarakan dengan mereka sendiri dan Vietnam tidak mau intervensi dalam permasalahan antar faksi tersebut.

Akhirnya pada 15 Desember 1987, Sihanouk menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi kembali dengan PRK dalam pembicaraan dua pihak yaitu CGDK dan PRK di Saint Germain-en-laye, Perancis.³⁵³ Dua hari berikutnya, Hun Sen pun menyatakan kesediannya untuk berbicara kembali dengan Sihanouk. Son Sann, PM CGDK, menyambut baik pertemuan tersebut sebagai upaya proses penyelesaian konflik Kamboja. Namun, Son Sann tidak berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut yang direncanakan melibatkan empat faksi, kecuali apabila Vietnam ikut serta dalam pembicaraan tersebut.

4.2 Proses Lanjutan Rekonsiliasi Kamboja 1988—1991

4.2.1 Pertemuan Kedua Sihanouk dan Hun Sen, 1988

Pertemuan kedua Sihanouk dan Hun Sen berlangsung pada tanggal 20—21 Januari 1988 di Saint-Germain-en Laye, dekat Paris.³⁵⁴ Pada permulaan pertemuan tersebut, Hun Sen mengumumkan bahwa final penarikan mundur pasukan Vietnam dimajukan menjadi September 1989.³⁵⁵ Perbedaan pendapat antara Sihanouk dan Hun Sen mewarnai jalannya pertemuan kali ini.

Dalam pertemuan ini Sihanouk menuntut penarikan pasukan Vietnam secepat mungkin dari Kamboja. Ia juga menginginkan pemerintahan PRK harus dirombak dan ketika sudah dirombak, PRK masuk ke dalam pemerintahan koalisi empat pihak yang berfungsi sebagai pemerintahan sementara. Sihanouk

³⁵² Macalister, *Op.Cit.*, hlm 42.

³⁵³ *Ibid.*

³⁵⁴ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 117.

³⁵⁵ Macalister Brown, *Op.Cit.*, hlm 47.

menyatakan bahwa pemerintahan koalisi empat pihak haruslah memegang peranan dalam mengorganisir pemilu. Pemilu Kamboja akan diawasi oleh pasukan penjaga perdamaian internasional. Pasukan tersebut akan bertugas mengawasi perpolitikan Kamboja dalam mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan damai hingga waktu yang telah ditentukan.³⁵⁶ Dapat diamati tuntutan-tuntutan Sihanouk ini sesungguhnya untuk mengakomodasi dua kepentingan yang berbeda yaitu Khmer Merah dan PRK.

Namun, Hun Sen menolak tuntutan tersebut. Hun Sen menyatakan bahwa sebelum pasukan Vietnam ditarik mundur dari Kamboja, Khmer Merah harus terlebih dahulu dieliminasi. Kemudian setelah itu, pemerintahan sementara dapat terbentuk setelah diadakannya pemilu di bawah kontrol PRK. Penolakan Hun Sen ini dilatarbelakangi oleh sikap PRK yang berpendapat bahwa pembubaran pemerintahannya hanya akan menimbulkan kekacauan yang akan dieksploitasi oleh Khmer Merah sehingga dapat mengakibatkan Khmer Merah berkuasa kembali.³⁵⁷ Selain itu, Hun Sen juga tidak menginginkan adanya pasukan penjaga perdamaian internasional di Kamboja yang bertugas mengawasi perpolitikan Kamboja. Hal ini ditolak oleh Hun Sen karena dengan adanya pasukan tersebut kedalautan PRK akan terganggu dan terancam. PRK pun bersikeras bahwa harus ada perlucutan senjata Khmer Merah terlebih dahulu sebelum Khmer Merah masuk dalam pemerintahan koalisi tersebut.

Pendapat Hun Sen tersebut disanggah oleh Sihanouk. Sihanouk menyatakan bahwa ia tidak menginginkan PRK dibubarkan, tetapi dirombak. Sihanouk mengusulkan pembentukan pemerintahan koalisi empat pihak sebagai pemerintahan sementara. Koalisi ini nantinya akan menyelenggarakan pemilu di Kamboja. Jadi, semua pihak yang bertikai dapat ikut bergabung. Keputusan bahwa suatu kelompok menang dalam pemilu ialah terletak di tangan rakyat yang berhak menentukan siapakah pemerintahan Kamboja selanjutnya. Selain itu, Sihanouk juga menegaskan kepada PRK bahwa pasukan penjaga perdamaian internasional sangat diperlukan di Kamboja untuk menghindari konflik berkebar kembali di Kamboja.

³⁵⁶ Tuntutan-tuntutan Sihanouk dapat dilihat di Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 33-34.

³⁵⁷ Penolakan Hun Sen dapat dilihat di *Ibid.*

Keberatan PRK atas tuntutan Sihanouk ini disebabkan strategi Hun Sen yang ingin melemahkan organisasi penentangannya dengan cara tetap mempertahankan *status quo* pemerintahannya. Pada intinya, pertemuan kali ini tidak menghasilkan keputusan damai yang penting. Hal ini disebabkan PRK masih memomorsatukan kepentingan golongannya dibandingkan.

Dua pihak yang saling bertentangan ini belum dapat setuju dengan rezim apa yang memerintah Kamboja di masa depan. Sementara Sihanouk menginginkan *power sharing*, 'pembagian kekuasaan' di antara keempat faksi dan penempatan penjaga perdamaian internasional untuk menjamin keberlangsungan damai Kamboja. Tetapi, Hun Sen masih ingin terus mempertahankan *status quo* pemerintahannya di Kamboja. PRK menginginkan kerjasama dengan Sihanouk sebagai partner mereka, tetapi itu juga jika Sihanouk mau membantu PRK dalam mempertahankan pemerintahan PRK. Selain itu, PRK juga hanya mau penempatan para pengamat asing saja dan bukan pasukan penjaga perdamaian yang jelas ia anggap sebagai usaha pelanggaran kedaulatan PRK.

Pertemuan kali ini hanya menghasilkan satu kesepakatan, yaitu mereka setuju bahwa Kamboja harus independen, netral, tidak memihak, dan mempunyai parlemen pemerintahan yang dipilih secara bebas.³⁵⁸ Pertemuan tersebut gagal memutuskan suatu kesepakatan damai karena pada saat itu, Sihanouk tidak memperlihatkan kekuatan politik yang kuat (CGDK). Hal ini disebabkan Son Sann dan Khieu Samphan tidak hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendukung Sihanouk sehingga mengakibatkan posisi Sihanouk kurang kuat dan lemah dalam tawar menawar politik dengan Hun Sen pada pertemuan kali ini.

Setelah pertemuan kedua Sihanouk dan Hun Sen yang tidak memperlihatkan kemajuan yang berarti, ASEAN khususnya Indonesia berinisiatif untuk menghidupkan kembali gagasan *Cocktail Party* yang telah diusulkan sebelumnya pada tahun 1985. ASEAN berharap dengan adanya pertemuan ini maka rekonsiliasi damai akan segera tercapai di Kamboja. *Cocktail party* ini kemudian dikenal dengan *Jakarta Informal Meeting*.

³⁵⁸ *Ibid.*, hlm 33.

4.2.2 Jakarta Informal Meeting I, (JIM I) 1988

JIM I berlangsung di Bogor pada tanggal 25—28 Juli 1988 yang dihadiri oleh 6 negara ASEAN³⁵⁹, Laos, Vietnam, dan empat faksi yang bertikai di Kamboja, yaitu Hun Sen, Khieu Samphan, Son Sann, dan Pangeran Ranariddh (putera Sihanouk).³⁶⁰ Tujuan diadakannya JIM adalah untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dan negara-negara yang berkepentingan dalam masalah Kamboja untuk segera mencari penyelesaian damai Kamboja.

Sihanouk dalam JIM I ini tidak ikut serta dalam perundingan dan pertemuan ini. Dirinya diwakili oleh anaknya, Ranariddh. Namun, Sihanouk saat itu hadir dalam di Jakarta untuk memenuhi undangan pribadi Presiden RI, Soeharto.³⁶¹ Walaupun, ia tidak menghadiri secara langsung dalam pertemuan JIM I ini, Sihanouk tetap mempunyai andil besar dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam JIM I ini. Hal ini dikarenakan, Sihanouk mempunyai wakil kepercayaan Ranariddh, yang selalu melaporkan perincian sidang JIM.

JIM I diselenggarakan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan pertemuan antara keempat faksi.³⁶² Pertemuan JIM ini merupakan peristiwa pertama keempat faksi dapat bertemu bersama dan berbicara langsung mengenai konflik Kamboja. Pada awal pertemuan, 25 Juli 1988. Hun Sen langsung mengajukan proposal damai yang pada intinya menginginkan pembentukan pemerintahan rekonsiliasi nasional yang terdiri dari empat faksi dan dipimpin oleh Sihanouk.³⁶³ Namun, hal tersebut harus diawali oleh penyingkiran para pemimpin Khmer Merah, Pol Pot, dan orang-orang terdekatnya. Kemudian setelah dilakukan penyingkiran Pol Pot, maka akan diadakan pemilu di bawah manajemen PRK. Menanggapi hal tersebut, Khieu Samphan langsung menolak usul yang diajukan oleh Hun Sen mengenai penyingkiran para pemimpin Khmer Merah dan meminta penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja secepatnya.³⁶⁴

³⁵⁹ Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Brunei. Brunei masuk menjadi anggota ASEAN pada tahun 1985 setelah pada tahun 1984, Brunei memperoleh kemerdekaan dari Inggris.

³⁶⁰ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 122.

³⁶¹ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 49.

³⁶² Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 122.

³⁶³ Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 35.

³⁶⁴ *Ibid.*

Selanjutnya pada tahap kedua, pertemuan dihadiri oleh semua peserta JIM I untuk membicarakan masalah aspek eksternal konflik Kamboja.³⁶⁵ Pada keesokan harinya, 26 Juli 1988, meskipun Sihanouk tidak menghadiri pertemuan JIM I, Sihanouk menyatakan penolakannya atas proposal yang diajukan oleh Hun Sen. Sihanouk pun tetap pada pendiriannya yang menginginkan pembentukan pemerintahan koalisi empat pihak sebagai pemerintahan sementara yang menyelenggarakan pemilu di bawah pengawasan penjaga perdamaian internasional di Kamboja. Tuntutan Sihanouk pun langsung ditolak oleh PRK dan Vietnam yang menginginkan pemilu di bawah kontrol PRK. Sikap PRK ini, secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pihaknya tidak mau membubarkan pemerintahannya yang sudah berkuasa di Kamboja sejak tahun 1979.

Menurut ketua sidang JIM I, Menlu Indonesia, Ali Alatas, ada tiga isu penting yang menjadi pokok perhatian dalam sidang JIM ini. **Pertama** adalah mengenai penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja. **Kedua** adalah mencegah kembali berkuasanya rezim Pol Pot. **Ketiga** adalah mengenai penghentian bantuan dari negara luar kepada semua faksi di Kamboja dalam hal bantuan bidang militer dan persenjataan sebagai bentuk proses damai konflik ini.³⁶⁶

Dalam perdebatan di sidang JIM I, Khieu Samphan menyatakan keberatannya dalam hal pengkaitan penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dengan pencegahan kembalinya rezim teror Pol Pot. Hal ini disebabkan PRK meminta pengeliminasian terlebih dahulu pemimpin-pemimpin Khmer Merah sebelum pasukan Vietnam ditarik dari Kamboja. PRK menyatakan hal tersebut penting karena untuk mencegah rezim Pol Pot berkuasa kembali.

Khmer Merah pun menanggapi pernyataan PRK dengan mengatakan bahwa itu semua hanya dalih Vietnam untuk menanggukkan penarikan mundur pasukannya. Khieu Samphan menyatakan bahwa penarikan pasukan Vietnam harus diwujudkan secara total dan tanpa pra-kondisi dan pernyataan apapun dari Vietnam.³⁶⁷ Akhirnya, faksi Khmer Merah pun menveto semua persetujuan

³⁶⁵ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 123.

³⁶⁶ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 49.

³⁶⁷ Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 35.

mengenai penyingkiran Pol Pot. Menanggapi hal tersebut, PRK pun tetap bersikeras menginginkan penyingkiran Pol Pot dan orang-orang terdekatnya.

Sebagai hasilnya, JIM I tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Dalam pertemuan ini hanya dihasilkan *consensus statement* yang menyatakan disepakatinya pembentukan kelompok kerja informal diskusi antara faksi-faksi yang bertikai dan negara-negara yang peduli dengan Kamboja yang bertujuan mempelajari aspek-aspek khusus penyelesaian politik Kamboja.³⁶⁸ Dengan adanya pernyataan ini dapat diamati bahwa semua pihak yang bertikai mempunyai indikasi untuk segera menyelesaikan konflik Kamboja ini. Tidak ada *draft* kesepakatan apapun dalam JIM I ini. Permasalahan mengenai pemerintahan koalisi, pembagian kekuasaan, peranan penjaga perdamaian internasional dan penarikan mundur pasukan Vietnam belum dapat dipecahkan dalam pertemuan kali ini.

Walaupun adanya *deadlock* pada JIM I, tetapi para faksi tersebut tidak menyerah dalam proses rekonsiliasi damai Kamboja. Hal ini pun dibuktikan, ketika perundingan JIM selesai, para faksi dan negara-negara yang peduli dengan masalah Kamboja membentuk kelompok kerja untuk menyiapkan pertemuan selanjutnya. Rapat persiapan pertemuan selanjutnya diadakan di Jakarta dari tanggal 17—19 Oktober 1988 dengan 50 delegasi yang terdiri dari 6 negara ASEAN, Vietnam, PRK, KPNLF, dan FUNCIPPEC.³⁶⁹ Khmer Merah tidak menghadiri pertemuan kelompok kerja tersebut karena telah berselisih sebelumnya dengan PRK pada JIM I.

Oleh karena, Khmer Merah tidak menyetujui usul-usul yang dilontarkan PRK, maka pada 22 November 1988, Khmer Merah mengajukan proposal sendiri mengenai partisipasi setiap faksi dalam proses damai Kamboja, yaitu:

1. Vietnam harus menarik semua pasukannya dari Kamboja dengan jadwal pasti yang pelaksanaannya akan diawasi oleh pihak internasional sebagai kunci penting dalam kesepakatan damai Kamboja.
2. Penarikan mundur tersebut diikuti oleh gencatan senjata terhadap semua faksi Kamboja.

³⁶⁸ *Ibid.*

³⁶⁹ *Ibid.*, hlm 36.

3. Setelah penarikan mundur pasukan Vietnam, akan dibentuk pemerintahan koalisi empat pihak yang dipimpin oleh Sihanouk dengan pengawasan internasional dan sekaligus pengawasan terhadap kekuatan bersenjata faksi-faksi di Kamboja.
4. Khmer Merah menyetujui bahwa pihaknya tidak akan memonopoli kekuatan politik di Kamboja.
5. Pemilihan Majelis Nasional Kamboja akan diselenggarakan untuk menentukan konstitusi baru Kamboja.
6. Akan ada hanya 40.000 pasukan bersenjata di Kamboja, dimana setiap faksi menyumbangkan 10.000 pasukan.
7. Kamboja akan independen, damai, netral, dan tidak memihak.
8. Kamboja akan mengadopsi sistem multipartai dan ekonomi bebas.
9. HAM harus dihargai di Kamboja.
10. Akan diadakan konferensi internasional yang melibatkan lima anggota Dewan Keamanan Tetap PBB yang akan menjamin usaha-usaha perdamaian, yang telah disebutkan di atas.
11. Akan dibentuk pasukan penjaga perdamaian internasional di Kamboja untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang telah diraih.³⁷⁰

Setelah Khmer Merah mengajukan proposalnya, Khmer Merah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan semua pihak dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Sihanouk dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.³⁷¹

Serupa dengan Khmer Merah, Sihanouk pun juga mengajukan proposal damai pada 30 November 1988, dengan disertai pernyataan bahwa ia tidak akan bertemu dengan Hun Sen lagi jika proposal ini tidak disetujui oleh Hun Sen. Isi dari proposal ini adalah:

1. Kepastian tanggal mengenai penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja.
2. Secara bersama melakukan pembubaran CGDK dan PRK dalam rangka pembentukan pemerintahan koalisi empat pihak.
3. Diselenggarakan pemilu di bawah kontrol pengawasan internasional.

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ *Ibid.*

4. Pembentukan pemerintahan koalisi empat pihak sebagai pemerintahan sementara beserta kekuatan militer bersama.
5. Kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional di bawah PBB.

Kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional di bawah PBB akan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa Khmer Merah tidak akan memonopoli kekuasaan pemerintahan koalisi.
- b. Untuk memastikan bahwa Vietnam menepati janjinya untuk menghormati kemerdekaan integritas teritorial Kamboja. Dengan kata lain, pasukan tersebut penting untuk menghalangi agresi dan keterlibatan kembali Vietnam di Kamboja.
- c. Untuk menghindari perang sipil berkobar di Kamboja.
- d. Pasukan penjaga perdamaian internasional akan bertugas di Kamboja selama satu atau dua tahun untuk mengawasi pemilu dan pembentukan pemerintahan baru hasil pemilu.³⁷²

Sementara, Sihanouk memaparkan usulan-usulannya, di tempat lain Hun Sen sudah menolak proposal yang diajukan oleh Khmer Merah karena butir keenam dan kesebelas. Hun Sen menyatakan bahwa adanya ide mengenai pasukan penjaga perdamaian internasional telah melanggar kedaulatan pemerintahan Kamboja sekarang dan hal itu tidak dapat diterima oleh PRK. Dengan adanya penolakan Hun Sen mengenai adanya pasukan penjaga perdamaian internasional di proposal Khmer Merah, maka secara tidak langsung, Hun Sen telah menolak proposal yang diajukan oleh Sihanouk yang sama-sama menyebutkan perlunya pasukan penjaga perdamaian internasional di Kamboja di bawah pengawasan PBB. Hun Sen menyatakan bahwa pihaknya hanya akan menerima pembentukan komisi kontrol kekuatan bersenjata di Kamboja dan tidak menginginkan peranan PBB lebih lanjut. Sebab, PBB adalah kepanjangan tangan dari Amerika dan China, yang telah mengakui CGDK sebagai wakil Kamboja di PBB.

Di lain pihak, setelah kelompok kerja bertemu dan melakukan perundingan maka disepakati kembali untuk mempertemukan kembali empat faksi

³⁷² *Ibid.*, hlm 36-37.

Kamboja guna menyelesaikan kebuntuan di antara mereka dalam perundingan JIM II.

4.2.3 *Jakarta Informal Meeting II, (JIM II) 1989*

JIM II dilaksanakan pada 19—21 Februari di Bogor, Indonesia.³⁷³ Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi empat faksi yang bertikai, Laos, Vietnam, dan keenam negara ASEAN. Penyelenggaraan JIM II ini dilaksanakan di tengah suasana mulai membaiknya hubungan China dan Soviet. Hal ini pun dibuktikan dengan adanya persetujuan mereka, bahwa Soviet setuju untuk melakukan penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, yang sejalan dengan pengurangan bantuan senjata China kepada faksi Kamboja anti-Vietnam.³⁷⁴

Meskipun, pihak-pihak eksternal di luar Kamboja sudah memperlihatkan sikap yang mendukung proses perdamaian Kamboja. Namun, pada JIM II lagi-lagi tidak menghasilkan sebuah kesepakatan bersama antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja karena tidak adanya kebulatan suara dan kesatuan pendapat di semua poin-poin pembicaraan. Poin-poin pembicaraan tersebut adalah mengenai pemerintahan koalisi empat pihak, prosedur pemilu, dan mengenai mekanisme kontrol pengawasan internasional yang bertugas untuk memastikan penghentian bantuan bersenjata bagi semua faksi di Kamboja dan memastikan bahwa tidak adanya faksi Kamboja yang memonopoli kekuasaan.³⁷⁵

Perbedaan pendapat mengenai poin-poin ini terjadi antara PRK dan CGDK. PRK menginginkan pemerintahannya tetap ada selama dilaksanakan pemilu atau dengan kata lain pihaknya tidak mau dibubarkan demi mempertahankan *status quo*-nya yang kemudian dapat meraih suara lebih banyak pada penyelenggaraan pemilu. Selain itu, PRK juga keberatan dengan adanya pasukan penjaga perdamaian internasional di Kamboja. yang dianggap oleh PRK sebagai usaha pelanggaran kedaulatan terhadap pemerintahannya. Hun Sen hanya mengizinkan komisi pengawasan saja. Namun, pihak CGDK menginginkan pengawasan internasional dan kekuatan yang lebih besar seperti pasukan penjaga

³⁷³ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 33.

³⁷⁴ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 52.

³⁷⁵ *Ibid.*

perdamaian di bawah pengawasan PBB untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan pemilu Kamboja. Oleh karena, adanya perdebatan dan pertentangan dalam poin-poin pembicaraan tersebut maka pada JIM II, kembali tidak menghasilkan suatu kesepakatan apapun.

Setelah JIM I dan JIM II tidak menghasilkan kesepakatan damai apa pun, maka untuk segera menyelesaikan kebuntuan antara SOC³⁷⁶ dan CGDK, akhirnya Menlu Indonesia, Ali Alatas, mengundang Hun Sen dan Sihanouk ke Jakarta untuk melanjutkan pertemuan berikutnya. Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan pada 2—3 Mei 1989.³⁷⁷ Pada pertemuan itu dari pihak CGDK, bukan hanya Sihanouk yang hadir, tetapi Son Sann juga ikut hadir dalam pertemuan itu untuk memperkuat elemen perlawanan dari CGDK.

Pada pertemuan tersebut, Sihanouk dan Hun Sen setuju untuk menghentikan penerimaan bantuan senjata dari negara luar sebagai langkah awal proses rekonsiliasi Kamboja. Selain itu, mereka juga menyetujui untuk mengadakan konferensi internasional untuk membentuk mekanisme kontrol yang bertujuan untuk memonitor penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan damai antara faksi-faksi yang bertikai.³⁷⁸

Pihak pertama yang mengusulkan perlunya penyelenggaraan konferensi internasional untuk penyelesaian politik Kamboja adalah Pangeran Sihanouk. Usulan ini pun diajukan bersamaan dengan keinginan negara ASEAN untuk memperluas kerangka JIM. ASEAN melihat bahwa perlunya memperluas kerangka JIM dengan melibatkan negara-negara di luar kawasan seperti Amerika, Uni Soviet, China, dan Jepang untuk mengadakan suatu konferensi internasional demi menyelesaikan damai Kamboja.³⁷⁹ Setelah ASEAN mengusulkan hal tersebut, Perancis pun menyambut baik hal tersebut dan berkeinginan untuk mengadakan konferensi internasional mengenai Kamboja di Perancis. Perancis

³⁷⁶ Pada 29 April—1 Mei 1989, dalam sidang majelis nasionalnya, PRK mengubah namanya menjadi SOC-*State of Cambodia* dan menjadikan agama Buddha sebagai agama nasional serta mengubah haluan politik luar negeri menjadi netral. Kebijakan ini ditujukan untuk mengakomodasi tuntutan perubahan konstitusi dalam konteks negosiasi rekonsiliasi nasional yang tengah digencarkan. Lihat Frederick Z. Brown “Cambodia in 1991: “An Uncertain Peace” dalam *Asian Survey*. Volume XXXII, No 1. California: University of California Press. hlm 93-94.

³⁷⁷ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 53.

³⁷⁸ *Ibid.*

³⁷⁹ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 136.

menyadari bahwa sudah tiba waktunya untuk menyelesaikan perbedaan yang ada di antara keempat faksi yang bertikai pada konferensi internasional. ASEAN pun menanggapi positif usul Perancis yang menginginkan penyelenggaraan konferensi internasional mengenai Kamboja di negaranya.

4.2.4 *the First Paris Conference on Cambodia, 1989*

Akhirnya konferensi internasional mengenai Kamboja diadakan di Paris selama satu bulan dari 30 Juli – 30 Agustus 1989.³⁸⁰ Dalam konferensi tersebut hadir delegasi empat faksi yang bertikai (Sihanouk, Son Sann, Khieu Samphan, dan Hun Sen), kelima anggota dewan keamanan tetap PBB,³⁸¹ 6 negara ASEAN, Laos, Vietnam, Australia, India, Kanada, Jepang, dan Zimbabwe (sebagai delegasi dari organisasi non-blok) serta sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar.³⁸²

Isu penting dalam pembicaraan konferensi paris pertama ini adalah :

1. Kepastian penarikan mundur pasukan Vietnam
2. Penghentian bantuan militer asing kepada empat faksi Kamboja
3. Pengakuan terhadap masalah pengungsi Kamboja dan masalah kemanusiaan lainnya
4. Rekonstruksi Kamboja di masa depan
5. Mencegah kembalinya rezim Khmer Merah berkuasa di Kamboja
6. Akan dibentuk sebuah mekanisme kontrol internasional – *international control mechanism*
7. Pengakuan mengenai permasalahan penduduk Vietnam yang telah menetap di Kamboja
8. Mengenai masalah pembagian kekuasaan dalam pembentukan pemerintahan koalisi empat pihak sebagai pemerintahan sementara, dan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu.³⁸³

Dalam pertemuan tersebut terjadi banyak perdebatan di antara para partisipan khususnya para delegasi Kamboja dan Vietnam. Perdebatan tersebut diawali dengan pembicaraan khusus mengenai penyebab awal konflik Kamboja. SOC dan Vietnam langsung menyatakan bahwa awal konflik ini adalah bermula

³⁸⁰ Macalister, *Op.Cit.*, hlm 54.

³⁸¹ Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Inggris, dan Perancis.

³⁸² *Ibid*, hlm 55.

³⁸³ Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 38.

dari rezim teror Pol Pot. Pasukan Vietnam datang ke Kamboja untuk membebaskan negara Kamboja dari teror pembunuhan Khmer Merah.³⁸⁴ Tentu saja pendapat ini disanggah oleh Khmer Merah yang mengatakan bahwa alasan tersebut dipakai oleh Vietnam dan SOC sebagai kedok untuk menutupi agresi dan kolonisasi yang dilakukan oleh Vietnam. Khmer Merah menyatakan Vietnam telah melanggar kedaulatan Kamboja sebagai negara yang merdeka.

Perdebatan ini membuat Sihanouk memberikan pernyataan dengan penekanan bahwa pergerakan kami (CGDK) adalah pergerakan yang melawan sebuah usaha kolonialisme dan okupasi Vietnam di Kamboja. ia menambahkan bahwa perang Kamboja ini bukanlah perang antara orang Kamboja dengan orang Kamboja lainnya melainkan, perang nasional untuk membebaskan Kamboja dari kolonisasi Vietnam.³⁸⁵ Pro kontra mengenai definisi konflik Kamboja menunjukkan suatu manifestasi perbedaan yang besar antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja. Perdebatan dan perbedaan pendapat antara faksi-faksi yang bertikai juga masih terus berlangsung dalam konferensi internasional ini ketika dalam sidang tersebut membicarakan *power sharing* dan peranan PBB dalam proses rekonsiliasi damai Kamboja.

Dalam hal ini, Hun Sen tetap pada pendiriannya bahwa Khmer Merah tidak boleh ikut dalam pemerintahan koalisi yang akan dibentuk. Hal ini diajukan oleh Hun Sen dengan tujuan untuk mencegah kembali berkuasanya rezim Pol Pot terlebih setelah penarikan mundur pasukan selesai dilakukan oleh Vietnam. SOC juga menolak pemerintahannya dibubarkan sebelum diadakannya pemilu.³⁸⁶ Bisa dilihat dari sikap Hun Sen bahwa pihaknya masih berkeinginan untuk mempertahankan *status quo*-nya sebagai rezim yang berkuasa di Kamboja secara *de facto*. Hun Sen tetap meminta pemerintahannya-lah yang menyelenggarakan pemilu. Jika diamati dengan adanya permintaan SOC bahwa pihaknya-lah yang menyelenggarakan pemilu, jelas memperlihatkan bahwa SOC menginginkan jaminan bahwa pihaknya akan memenangkan pemilu dan menjadi pemerintahan baru Kamboja.

³⁸⁴ *Ibid.*

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm 38-39.

³⁸⁶ *Ibid.*, hlm 39.

Menanggapi sikap Hun Sen tersebut, Sihanouk tetap menuntut dan menekan Hun Sen supaya menerima usul yang diajukan Sihanouk. Sihanouk berpandangan bahwa DK harus diikuti sertakan karena dengan cara inilah aktivitas politik kelompok tersebut dapat diawasi. Namun, walaupun begitu, Hun Sen tetap menolak dengan alasan bahwa DK adalah mantan rezim teror. Usulan Sihanouk lainnya adalah pembubaran pemerintahan SOC dan CGDK secara bersamaan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang bertanggung jawab akan penyelenggaraan pemilu.

Son San dan Khieu Samphan mendukung usulan Sihanouk tersebut yang dinilai dapat mencakup semua pihak Kamboja yang bertikai dan dapat menciptakan suasana pemilu yang bebas dan adil. Namun, usulan Sihanouk ini langsung ditolak oleh Hun Sen yang masih memainkan strategi politik dan militernya untuk mempertahankan *status quo*-nya setelah penarikan mundur pasukan Vietnam.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa CGDK dan SOC berbeda pandangan mengenai siapa yang memegang peranan dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara CGDK menginginkan pembentukan pemerintahan koalisi empat pihak sebagai penyelenggara pemilu. Akan tetapi, SOC menginginkan SOC-lah yang menyelenggarakan pemilu dan pembentukan pemerintahan koalisi setelah diadakannya pemilu tanpa mengikutsertakan DK.

Sementara itu, Hun Sen pun tidak menyetujui adanya peranan PBB dalam bentuk pengawasan internasional karena PBB telah mengakui CGDK sebagai pemerintahan yang menduduki kursi Kamboja di PBB. Hun Sen menilai bahwa PBB akan berlaku berat sebelah dan condong ke CGDK. Hun Sen hanya menginginkan pembentukan pengawasan internasional sama seperti *international control and supervision mechanism (ICSM)*, yang dulu pernah dibentuk pada tahun 1954—1975 untuk mengawasi perkembangan politik di Indocina.³⁸⁷

Hun Sen hanya menginginkan pembentukan ICSM yang beranggotakan Kanada, Indonesia, dan Polandia yang bertugas untuk memonitor penarikan mundur pasukan Vietnam dan pengawasan pemilu di Kamboja.³⁸⁸ Intinya, usul Hun Sen ini berupaya untuk membatasi gerak keterlibatan PBB di Kamboja

³⁸⁷ *Ibid.*, hlm 40.

³⁸⁸ *Ibid.*

sehingga SOC dapat tetap mempertahankan kekuasaannya baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu.

Namun, pihak perlawanan tetap pada pendiriannya bahwa mereka setuju untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian di bawah pengawasan PBB yang beroperasi di Kamboja selama lima tahun. Diharapkan dengan adanya pasukan penjaga perdamaian, Kamboja akan terhindar dari kekuatan yang akan memonopoli kekuasaan di Kamboja. Selain itu, pembentukan pengawasan internasional ini akan mencegah kembali berkuasanya rezim Pol Pot dan menghindari kembalinya Vietnam ke Kamboja.

Banyak para pengamat dalam konferensi tersebut mempunyai pendapat yang sama dengan CGDK bahwa diperlukan pasukan penjaga perdamaian karena Vietnam dan SOC dinilai belum dapat dipercaya. Dengan banyaknya pendapat yang mendukung pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional di Kamboja, pada hari terakhir konferensi tersebut, Vietnam dan SOC pun menyetujui pembentukan *International Control Mechanism* (ICM) yang bertujuan untuk memantau penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan nantinya mengawasi pelaksanaan gencatan senjata kedua belah pihak yang bertikai.³⁸⁹

Pada akhirnya, Konferensi Paris pertama ini gagal memperoleh suatu kesepakatan dan konsensus bersama mengenai penyelesaian damai Kamboja. Hal ini disebabkan sikap Hun Sen yang masih menginginkan pengusuran DK dan tetapnya status pemerintahannya. Dengan tidak adanya kesatuan pendapat dan kesepahaman mengenai rekonsiliasi di antara keempat faksi yang bertikai, khususnya DK dan SOC, maka Konferensi Paris pertama ini ditunda dengan tanpa penyelesaian politik secara komprehensif.

Sementara itu, pada akhir 26 September 1989, Vietnam bersedia menarik pasukannya dari Kamboja sebagai bentuk tekanan internasional terhadap SOC agar bersedia menerima rumusan rekonsiliasi nasional bersama ketiga kelompok perlawanan Kamboja.³⁹⁰ Bila ditelaah lebih lanjut kebijakan Vietnam untuk

³⁸⁹ *Ibid.*

³⁹⁰ Macalister, Op.Cit., hlm58.

menarik pasukannya dari Kamboja juga dipengaruhi oleh beberapa aspek baik eksternal maupun internal.

Secara eksternal, dicapainya pendekatan antara Uni Soviet dan China,³⁹¹ memberikan timbal balik dari China untuk menghentikan bantuan ekonomi dan militernya kepada kelompok perlawanan dan sepakat mendorong seluruh kelompok yang bertikai di Kamboja untuk menyelesaikan konfliknya di bawah pengawasan PBB. Peradaan ketegangan internasional dan upaya mengakhiri perang dingin yang berkepanjangan yang dipelopori oleh Michael Gorbachev, terbukti berhasil menurunkan perasaan saling mencurigai antara Vietnam dan China.

4.2.5 Usulan Australia

Kegagalan dalam konferensi Paris pertama mengenai penyelesaian damai Kamboja telah membuat pertempuran kembali berkecamuk di antara pasukan ketiga kelompok perlawanan melawan pasukan SOC.³⁹² Di tengah berkobarnya pertempuran tersebut, munculah usulan Australia yang dipelopori oleh Gareth Evans pada 24 November 1989.³⁹³ Usul ini menekankan peran serta PBB sebagai pemerintahan transisi di Kamboja hingga terbentuknya pemerintahan baru Kamboja melalui pemilu. Pada intinya, proposal Evans ini berisikan mengenai: 1. Peranan PBB sebagai pemerintahan administrasi transisi di Kamboja; 2. Pembentukan *International Control Mechanism* untuk memastikan,

³⁹¹ Pada Mei 1989, tercapai kesepakatan antara Uni Soviet dan China, yang tercemin dalam *komunike* bersama ketika Gorbachev mengunjungi China 15—19 Mei 1989. Kesepakatan itu antara lain: 1. Menghargai keputusan Vietnam untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja yang dijadwalkan berakhir pada September 1989 melalui verifikasi internasional dikaitkan dengan penghentian bantuan militer asing kepada keempat kelompok Kamboja; 2. Menunjukkan kepedulian untuk menghindarkan terjadinya perang saudara di Kamboja setelah penarikan mundur pasukan Vietnam; 3. Mendukung rekonsiliasi nasional di antara keempat kelompok Kamboja yang bertikai setelah proses penarikan mundur pasukan Vietnam selesai; 4. Mengajukan dialog intensif di antara keempat kelompok Kamboja dengan negara-negara luar yang sanggup mendukung kemungkinan dicapainya rekonsiliasi nasional; 5. Mengajukan pelaksanaan konferensi internasional mengenai Kamboja.

Untuk lebih jelasnya lihat Sarasin Viraphol. "the Paris Conference on Cambodia: the Soviet Factor". dalam *Indochina Report*. No. XXI, Oktober—Desember 1989.

³⁹² Macalister, *Op.Cit.*, hlm 59.

³⁹³ Pada sidang tahunan majelis umum PBB tahun 1989, salah satu peserta sidang, Stephen Solarz, ketua Komite Urusan Luar Negeri Asia Pasifik mengusulkan adanya peranan sementara PBB di Kamboja pada masa transisi pemerintahan sebelum terbentuknya pemerintahan baru. Ide tersebut kemudian diperbaharui dan dilengkapi oleh Gareth Evans, menteri luar negeri dan perdagangan Australia. Untuk lebih jelasnya lihat Sina Than. "Cambodia 1990 Towards a Peaceful Solution" dalam *Southeast Asian Affairs*. 1991. hlm. 83-103. Pasir Panjang: ISEAS. hlm 84.

memonitor penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, dan memonitor gencatan senjata semua pihak yang bertikai di Kamboja; 3. Kursi Kamboja di PBB harus dikosongkan dan kemudian diduduki kembali setelah terlaksananya pemilu di bawah pengawasan PBB.³⁹⁴

Sihanouk langsung merasa keberatan atas poin ketiga mengenai kekosongan kursi Kamboja di PBB. Hal ini ditakutkan Sihanouk, jika hal itu terjadi maka Kamboja akan kehilangan kemerdekaannya. Namun, Khieu Samphan menyambut positif usulan ini mengenai peranan PBB dan Hun Sen pun menyambut positif usulan Evans ini, tetapi ia tetap menekankan kekosongan kursi Kamboja di PBB.³⁹⁵ Hal ini diminta Hun Sen karena selama ini, kursi Kamboja di PBB dipegang oleh CGDK. Untuk itu, kosongnya kursi Kamboja di PBB diperlukan supaya PBB dapat bersikap netral.

Untuk mengantisipasi perkembangan di tingkat internasional yang semakin baik, Indonesia dalam kapasitasnya sebagai salah satu ketua bersama konferensi Paris pertama mengundang kembali peserta JIM untuk bertemu di Jakarta untuk mengadakan *Informal Meeting on Cambodia*.

4.2.6 Pertemuan *Informal Meeting on Cambodia* (IMC I), 1990

Pada 26—28 Februari 1990 dilaksanakan pertemuan informal mengenai Kamboja di Jakarta.³⁹⁶ Pertemuan tersebut dihadiri oleh keempat faksi yang bertikai di Kamboja, delegasi Vietnam, Laos, negara ASEAN, Perancis, Australia dan utusan PBB, Rafeuddin Ahmed.³⁹⁷ JIM dan IMC merupakan prosedur diplomasi yang berbeda. JIM murni mengacu pada usaha diplomasi pada tingkat regional Asia Tenggara, sedangkan IMC lebih mengacu sebagai tindak lanjut dari Konferensi Paris Pertama. IMC ini adalah untuk memfasilitasi proses damai diantara keempat kelompok Kamboja yang bertikai setelah Konferensi Paris pertama gagal memperoleh kesepakatan.

³⁹⁴ *Ibid.*

³⁹⁵ Macalister Brown, *Op.Cit.*, hlm 59.

³⁹⁶ *Ibid.*, hlm 61.

³⁹⁷ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 142.

Sementara itu perkembangan positif berasal dari SOC, pada Desember 1989 yang mengatakan siap untuk membubarkan kabinetnya dan menerima kontrol PBB dalam pemilu di Kamboja.³⁹⁸ Selain itu, pada 3 Februari 1990, Sihanouk mengumumkan perubahan nama CGDK menjadi *National Government of Cambodia* (NGC) untuk menggantikan simbol Khmer Merah dan lagu kebangsaan supaya lebih bersifat kesatuan nasional Kamboja.³⁹⁹ Hal ini dimaksudkan Sihanouk untuk memberikan suasana positif dalam proses damai Kamboja yang tengah berlangsung.

Setelah lima jam sesi diskusi dalam IMC, empat faksi menandatangani *komunike* bersama mereka untuk pertama kalinya yang berisi beberapa poin:

1. Mereka menyetujui kehadiran PBB pada tingkat tertentu di Kamboja selama periode transisi dengan tugas mengatur pemilihan yang bebas dan adil. Proses pemilu harus berlangsung adil secara adil, sederhana, dan semua pemilih diberikan hak, kesempatan, dan kebebasan yang sama. Selain itu, PBB juga bertugas untuk mengawasi dan memonitor penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, memonitor penghentian bantuan militer asing kepada empat faksi Kamboja serta mengawasi gencatan senjata di antara kelompok-kelompok Kamboja
2. Selama masa transisi tersebut, akan dibentuk *Supreme National Council* (SNC) 'Dewan Agung Nasional' sebagai lambang kedaulatan dan kesatuan nasional Kamboja.
3. SNC beranggotakan empat faksi Kamboja. Komposisi SNC harus diputuskan oleh faksi-faksi Kamboja tersendiri. SNC yang terbentuk akan menduduki kursi negara di PBB dan badan internasional lainnya.
4. Tugas PBB akan berakhir setelah diresmikan pemerintahan Kamboja yang demokratis melalui pemilu, dan
5. Mereka menyetujui bahwa perlunya diadakan kembali Konferensi Paris selanjutnya untuk mencari penyelesaian politik Kamboja sehingga tercipta perdamaian di Kamboja.⁴⁰⁰

³⁹⁸ Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 41.

³⁹⁹ Sina Than, *Loc.Cit.*, hlm 84.

⁴⁰⁰ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 142-144.

4.2.7 Dokumen PBB, 1990

Sementara para faksi Kamboja sedang melakukan pertemuan IMC I di Jakarta, usulan Australia ini mendorong lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggali lebih lanjut berbagai aspek penyelesaian politik konflik Kamboja. Pada awal Januari 1990, kelima anggota tersebut mulai membicarakan kemungkinan pembentukan pemerintahan sementara di Kamboja di bawah pengawasan PBB.⁴⁰¹ Pemerintahan sementara ini bertugas supaya rakyat Kamboja dapat menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya setelah melakukan enam kali pertemuan guna merumuskan solusi politik Kamboja, pada 26 Agustus 1990, kelima negara dewan keamanan PBB tersebut telah menghasilkan dokumen yang berjudul *Frame Work For Comprehensive Political Settelement of the Cambodia*⁴⁰² yang merupakan sebuah dokumen kumpulan solusi politik untuk Kamboja.

Dalam dokumen tersebut meliputi lima aspek di antaranya adalah:

1. Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan SNC sebagai satu-satunya sumber legitimasi Kamboja selama periode transisi. Komposisi keanggotaan SNC berdasarkan kesepakatan keempat kelompok Kamboja. SNC menjadi pemegang kedaulatan yang mewakili Kamboja dalam urusan luar negeri Kamboja pada masa transisi. SNC akan menduduki kursi Kamboja di PBB dan semua badan internasional lainnya. Di dalam SNC tidak akan ada kelompok yang mendominasi satu sama lain. Pada saat penandatanganan kesepakatan komprehensif ini untuk mengakhiri permusuhan serta menyiapkan pemilu adil dan bebas, SNC akan mendelegasikan *United Nations Transitional Autorithy in Cambodia* (UNTAC) untuk menjamin implementasi kesepakatan-kesepakatan politik yang telah diraih.

⁴⁰¹ Sina Than, *Loc.Cit.*, hlm 90.

⁴⁰² Frank Frost. "The Cambodia Conflict The Path Towards Peace" dalam *Contemporary Southeast Asia*. Volume 13, Number 2, September 1991. hlm.119-161. California: University of California Press. hlm 143.

2. Dewan Keamanan PBB mengusulkan yang termasuk masalah kemiliteran mencakup pembuktian penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, jaminan bahwa kekuasaan tersebut tidak akan kembali ke Kamboja, pengawasan pelaksanaan gencatan senjata, dan penghentian suplai bantuan militer asing kepada kelompok-kelompok Kamboja, serta proses pengelompokkan kembali 70 persen masing-masing kekuatan militer kelompok Kamboja akan dilakukan oleh unsur-unsur UNTAC.
3. Dewan keamanan PBB akan bertugas menciptakan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur. Untuk itu, kekuasaan administrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pemilu akan diambil alih oleh UNTAC.
4. Dewan Keamanan PBB mengusulkan agar penyelesaian menyeluruh atas konflik Kamboja harus didasarkan penghormatan terhadap HAM.
5. Dewan Keamanan PBB mengharapkan Kamboja mencantumkan pasal kemerdekaan, kedaulatan, netralitas, integritas wilayah dan persatuan nasionalnya dalam konstitusi Kamboja untuk menjamin kesepakatan damai yang telah diraih dapat dilaksanakan secara menyeluruh.⁴⁰³

Setelah adanya dokumen yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB, Indonesia kembali mengadakan pertemuan IMC kedua untuk membahas dokumen tersebut di antara keempat faksi tersebut dan negara-negara yang terlibat dalam proses rekonsiliasi damai Kamboja

4.2.8 Pertemuan *Informal Meeting on Cambodia II (IMC II)*, 1990

Pada 9—10 September 1990 telah dilaksanakan pertemuan informal mengenai Kamboja yang kedua di Jakarta.⁴⁰⁴ Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi empat faksi yang bertikai, delegasi Perancis, delegasi Indonesia, dan delegasi PBB. Pada pertemuan tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan bersama yaitu:

1. Keempat faksi menerima *framework document* yang dirumuskan oleh kelima anggota Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Mereka menegaskan kesediaannya untuk memfinalkan dokumen

⁴⁰³ *Ibid.*, hlm 143-146.

⁴⁰⁴ Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 42.

tersebut ke dalam penyelesaian politik Kamboja secara menyeluruh melalui Konferensi Paris kedua tahun 1991.

2. Mengenai sifat dan fungsi SNC seperti yang dinyatakan pada dokumen tersebut, ke empat faksi Kamboja setuju :
 - a. SNC adalah satu-satunya badan yang sah dan berkuasa pada masa transisi untuk menetapkan kemerdekaan, keadaulatan, dan kesatuan Kamboja.
 - b. SNC sendiri terdiri dari para individu yang mencerminkan semua aspirasi politik rakyat Kamboja.
 - c. SNC menduduki kursi Kamboja di PBB dan setiap badan internasional lainnya.
 - d. Setelah SNC menandatangani penyelesaian menyeluruh konflik Kamboja, SNC segera mendelegasikan semua wewenang yang diperlukan kepada PBB mengenai pelaksanaan penyelesaian tersebut.
 - e. Semua keputusan SNC akan dicapai melalui konsensus di antara para anggotanya.
3. Susunan anggota SNC terdiri dari keempat faksi yang ada di Kamboja.
4. SNC akan terdiri dari 12 Anggota, 6 anggota dari SOC dan 6 anggota lainnya dari NGC: 2 anggota dari FUNCIPPEC, 2 anggota dari KPNLF, dan 2 anggota dari DK. Anggota ketiga belas SNC adalah presiden SNC.⁴⁰⁵

4.2.9 Pertemuan-Pertemuan SNC

Negoisasi demokrasi tidak berhenti setelah persetujuan pembentukan SNC. Banyak perdebatan politik di antara keempat kelompok tersebut antara lain mengenai perdebatan siapakah yang menjadi presiden SNC. Dalam grup perlawanan, mereka setuju untuk menjadikan Sihanouk sebagai ketua SNC. Namun, Hun Sen menolaknya dan hanya akan menerima Sihanouk sebagai presiden, jika dirinya menjadi wakil ketua SNC. Untuk membahas permasalahan tersebut, SNC beberapa kali mengadakan sidang.

⁴⁰⁵ Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 146-147 dan Sorpong Peou, *Op Cit.*, hlm 42 – 43.

Dalam beberapa kali sidang SNC, menunjukkan perkembangan yang positif dimana dalam beberapa tahap pertemuan berhasil dirumuskan beberapa persetujuan penting, dimana secara ringkas akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Pertemuan Jakarta (2—4 Juni 1991)

Dalam pertemuan tersebut, Sihanouk dan Hun Sen mencapai kesepakatan bahwa peran PBB akan dibatasi, dengan hanya beranggotakan 700 orang. Mereka juga menyetujui untuk tidak lagi menerima bantuan militer dari negara lain. Dalam pertemuan ini, Sihanouk dan Hun Sen menyetujui formula kepemimpinan SNC, yaitu Sihanouk dan Hun Sen, wakil ketua SNC. Namun, hal ini diprotes oleh Khieu Samphan yang menyatakan keberatan atas keputusan yang menjadikan Hun Sen sebagai wakil ketua karena dinilai akan merugikan posisi Khieu Samphan dan kelompoknya. Dengan adanya protes Khieu Samphan, maka kesepakatan antara Sihanouk dan Hun Sen batal diluluskan.⁴⁰⁶

B. Pertemuan Pattaya I (24—28 Juni 1991)

Dalam pertemuan ini, Khieu Samphan menyetujui usul Hun Sen untuk menempatkan markas SNC di Phnom Penh dengan syarat bahwa masing-masing anggota SNC diperbolehkan membawa pegawai militernya masing-masing. Apabila markas SNC sudah berfungsi, negara-negara luar termasuk PBB agar segera menempatkan wakil-wakilnya di Kamboja. Kemudian, keempat faksi juga menyetujui diperlukan bendera dan lagu nasional Kamboja yang baru untuk memperkuat persatuan nasional di antara mereka. Namun, tidak menghilangkan identitas masing-masing faksi.⁴⁰⁷

C. Pertemuan Beijing (16—17 Juli 1991)

Dalam pertemuan ini berhasil disepakati bahwa yang menjadi pemimpin SNC adalah Sihanouk dengan sebuah catatan dirinya bersedia melepaskan jabatannya dalam NGC dan menjalankan perannya secara netral.

D. Pertemuan Pattaya II (26—29 Agustus 1991)

Dalam pertemuan ini, keempat faksi ini menyetujui beberapa poin penting:

1. Melakukan perlucutan senjata sebesar 70 persen terhadap kekuatan tempur masing-masing pihak, sedangkan sisanya direncanakan digabung untuk

⁴⁰⁶ Untuk lebih jelasnya lihat Sorpong Peou, *Op.Cit.*, hlm 44.

⁴⁰⁷ Untuk lebih jelasnya lihat Frank Frost, *Loc.Cit.*, hlm 155.

membentuk angkatan bersenjata baru yang akan menjadi bagian dari pemerintahan rekonsiliasi yang akan dibentuk.

2. Peserta yang boleh mengikuti pemilu dibatasi untuk partai-partai politik yang memiliki minimal 5000 pendukung.
3. Mendesak PBB dan masyarakat internasional agar menyediakan bantuan untuk pembangunan nasional Kamboja untuk infrastruktur yang hancur akibat perang.
4. Menegaskan kembali hubungan antara SNC dan UNTAC. SNC akan memberikan pertimbangan bagi UNTAC berdasar pertimbangan seluruh anggota SNC dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai supervisor dan penjaga perdamaian di Kamboja. Keputusan akhir pertimbangan tersebut akan diajukan oleh Sihanouk sebagai ketua.⁴⁰⁸

Setelah dokumen PBB telah disepakati semua pihak yang bertikai di Kamboja, maka untuk mengesahkan dokumen tersebut yang merupakan solusi politik Kamboja, diadakanlah Konferensi Paris 1991, sebagai konferensi akhir bagi penyelesaian damai Kamboja.

4.2.10 *the Second Paris International Conference on Cambodia, 1991*

Konferensi Paris ini merupakan puncak keberhasilan penyelesaian konflik politik Kamboja setelah melalui serangkaian kegiatan diplomasi dari tahun 1982. Akhirnya dalam sidang Konferensi Paris kedua tersebut ditandatangani perjanjian Paris oleh faksi-faksi Kamboja, yang diwakili oleh SNC dan 19 negara peserta Konferensi Paris ini.⁴⁰⁹ Isi pokok dari naskah perjanjian Paris tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Final Act* konferensi Paris mengenai Kamboja
2. Persetujuan mengenai penyelesaian politik secara menyeluruh konflik Kamboja dengan lampiran-lampirannya berupa mandat *United Nations Transitional Authority of Cambodia* (UNTAC) mengenai masalah militer,

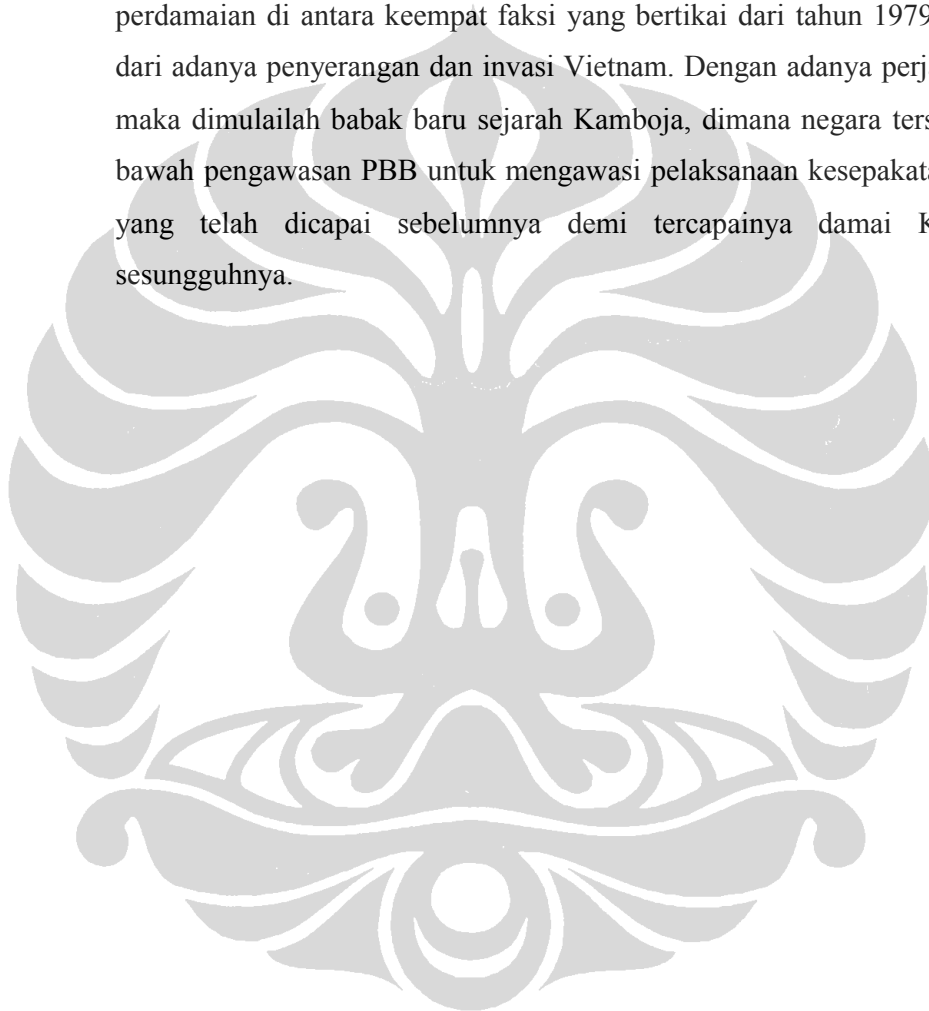
⁴⁰⁸ Untuk lebih jelasnya lihat Mike Yeong. "Cambodia 1991: Lasting Peace or Decent Interval" dalam *Southeast Asia Affairs*. 1992. Pasir Panjang: ISEAS. hlm 115 -116.

⁴⁰⁹ 19 peserta tersebut ialah: Amerika Serikat, Australia, Brunei, Kanada, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kamboja, Laos, Malaysia, Perancis, Filipina, RRC, Singapura, Thailand, Uni Soviet, Vietnam, Yugoslvasia, dan Zimbabwe. Untuk lebih jelasnya lihat Nazarudin, *Op.Cit.*, hlm 150-151.

pemilu, repatriasi para pengungsi Kamboja, dan prinsip-prinsip konstitusi baru untuk Kamboja

3. Persetujuan tentang kedaulatan, kemerdekaan integrasi wilayah, netralitas, dan keutuhan wilayah Kamboja.
4. Deklarasi mengenai rehabilitasi dan pembangunan Kamboja.⁴¹⁰

Dengan adanya Konferensi Paris kedua, Oktober 1991 maka disepakatilah perdamaian di antara keempat faksi yang bertikai dari tahun 1979, yang dimulai dari adanya penyerangan dan invasi Vietnam. Dengan adanya perjanjian Paris ini maka dimulailah babak baru sejarah Kamboja, dimana negara tersebut berada di bawah pengawasan PBB untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya demi tercapainya damai Kamboja yang sesungguhnya.



⁴¹⁰ Himpunan Naskah Perjanjian Paris Mengenai Kamboja. Direktorat Asia Pasifik, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 1991.